

Studi terhadap Konsep dan Persepsi
tentang Islamic Terrorism
Dari Era Klasik hingga Era Modern

ISLAMIC TERRORISM

(THE AMBIGUITY BETWEEN
ACCUSATION AND JUSTIFICATION)

RIDWAN ROSDIWAN

DWI SURYA ATMAJA

PERPUSTAKAAN NASIONAL:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISLAMIC TERRORISM
(The Ambiguity between
Accusation and Justification)
(16 x 24 cm = x + 127)

ISBN: 978-602-0868-65-3

Judul Buku:
ISLAMIC TERRORISM
(The Ambiguity between
Accusation and Justification)

Penulis:
RIDWAN ROSDIWAN & DWI SURYA ATMAJA

Kreatif:
SETIA PURWADI

Cetakan : Oktober 2016

Diterbitkan oleh:
IAIN Pontianak Press
Jalan Letjend Soeprapto No, 19
Pontianak - Kalimantan Barat

ABSTRAK

Bagaimanakah evolusi terminologi dan diskursus terrorisme global dalam sejarah latar belakangnya serta mengapa kemudian berkembang dan identik dengan Islam?; Bagaimanakah bentuk diskursus terrorisme global yang cenderung selalu melibatkan Islam? Apakah berbentuk monolitik? Adakah diskursus lain yang menjadi antithesis dari mainstream?; Bagaimanakah masyarakat Muslim merespon diskursus global terrorisme yang mendeskreditkan mereka? Adakah hubungan evolutif antara diskursus terrorisme modern di tengah masyarakat Muslim dengan latar belakang sejarah diskursus sebelumnya?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti menghimpun, menyeleksi dan melakukan kategorisasi serta klasifikasi teks-teks sebelum masa runtuhnya kekhilafahan Utsmani atau sebelum abad 20 (klasik); dan buku-buku, artikel, jurnal atau makalah online era setelahnya (modern). Teks-teks tersebut kemudian dianalisa dengan metode *Critical Discourse Analysis*. Hasil analisis diposisikan sebagai draft yang diuji, dimatangkan dan didalamkan melalui metode FGD (*Focused Group Discussion*) yang tidak hanya melibatkan mereka yang *concern* terhadap issue *Islamic Terrorism* namun juga mereka yang dikategorikan sebagai *fundamentalist* dan *radicalist*.

Hasil analisa dan pengolahan data berupa konstruk, konsep dan perspektif tentang *Islamic Terrorism* kemudian didisplay dalam format 5

(lima) bab, yakni: Deskripsi tentang latar belakang, perumusan masalah dan metode penelitian; Diskursus kesejarahan terminologi Terorisme Islam; Pengaruh Diskursus Global Terorisme Islam; Konsep Terorisme (*hira>bah*) dalam Diskursus Dunia Islam Klasik.

Meski bernuansa simplifikasi, *Islamic Terrorism* merupakan terma yang secara historis berevolusi, bergerak dan berubah namun mengarah pada kecenderungan ambiguitas. Mula pertama dalam tradisi Barat (abad 18), ia dideklarasikan sebagai kebijakan intimidatif pemerintahan revolutionary Perancis (Maximilien Robespierre) untuk mengatasi ancaman gerakan-gerakan yang menginginkan restorasi kekuasaan raja terguling. Se abad kemudian (1870-an), sekelompok masyarakat menamakan diri mereka sebagai teroris dalam memperjuangkan kemerdekaan. 10 tahun kemudian (1880) di Jerman, Johann Most menulis buku berjudul "*Advice for Terrorist.*" Dengan kata lain. Terma terorisme bergeser dari instrument kebijakan yang digunakan oleh penguasa menjadi instrument perjuangan arus bawah.

Cikal bakal terorisme modern sulit dipisahkan dari sejarah pembentukan *pseudo-nation states* di Timur Tengah dan Central Asia paska PD I yang pada dasarnya merupakan zonasi dominasi kampiun PD I. Akibat langsung dari ketergesaan pembentukan pemerintahan di Negara-negara ini menghasilkan ketegangan dan kekisruhan antar kelompok-kelompok ethno-religius yang tak kunjung usai sampai hari ini (Sunni-Syi'ah, Muslim-Yahudi, Muslim-Hindu, dll). Aksi kekerasan dan terror yang mernjadi metode kejuangan arus bawah ini kemudian melebar dan menyebar ke tempat dan pihak yang dipandang berkaitan atau mendukung pihak lawan.

Uniknya, dalam diskursus Islam klasik dikenal terma "hira>bah" yang mengandung makna terror dan kekerasan yang serupa. Akan tetapi, *the ruling elites* pada saat itu memasukkan pelaku aksi "hira>-bah" ini ke dalam kategori *Criminal Law* biasa.

KATA PENGANTAR

Teori yang diluncurkan oleh Samuel Philip Huntington di tahun 1993 tentang *the Clash of Civilization* mungkin kurang berpengaruh jika bukan karena posisinya sebagai *the White House Coordinator of Security Planning for the National Security Council* pada masa pemerintahan Jimmi Carter. Teori ini menyatakan bahwa paska perang dingin, perang tidak lagi antar Negara namun antar budaya dan ancaman terbesar bagi dominasi Barat berasal dari ekstrimist Islam. Linear dengan pemikiran ini, di tahun 1997 dunia menyaksikan kehadiran *Project for the New American Century* (PNAC) dan perannya dalam Perang Iraq. Obsesi *American Leadership* yang identik dengan Reaganite Policy of Military Strength and Moral Clarity ini seakan mendapat tamparan keras oleh tragedi pembajakan dua pesawat komersial (United Airlines dan American Airlines) yang menabrakkan dirinya ke menara kembar WTC (World Trade Center) di New York pada Selasa pagi 11 September 2001. Tragedi dramatis ini segera direspons oleh Amerika Serikat dengan mengumumkan perang terhadap terorisme dan memburu Osama bin Laden beserta jaringan al-Qaeda yang dipimpinya. Tidak hanya al-Qaeda tetapi siapa dan apa pun yang dipandang menghalangi serangan ini dijungkir-balikkan, terma-

suk pemerintahan Taliban di Afghanistan. Perang yang dipelopori oleh Amerika Serikat ini segera menyebar ke berbagai Negara; dan akhirnya Indonesia pun di tahun 2010 ikut serta memunculkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang eselonisasi kepalanya setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Persoalannya kemudian adalah: “Apa yang dimaksud dengan terminologi “terorisme”. “Mengapa term terorisme seringkali berlabel Islam?” Jika terorisme merupakan isme (paham) yang berimplikasi pada dampak “teror” yang dihasilkannya, sementara Islam secara literal bermakna “damai”, maka kedua terma ini tentunya *mismatch* (tidak sesuai) bahkan *paradox* (bertentangan) untuk dipasangkan! Pertanyaan dan pernyataan ini menunjukkan keresahan terhadap seringnya fenomena “terorisme” menggunakan simbol-simbol agama.

Lebih lanjut, ketika aksi terorisme dihubungkan dengan fundamentalisme, Bruce B. Lawrence dalam *Defenders of God* mengingatkan bahwa mereka yang tulus memperjuangkan sistem kehidupan menurut doktrin-doktrin agama eksis dan dapat ditemukan dalam setiap agama. Mereka yang dengan penuh kesalehan berupaya “*reaching the heaven on Earth*” eksis sepanjang sejarah peradaban.

Berlatarkan pemikiran di atas. Ridwan Rosdiawan menggandeng Dwi Surya Atmaja guna mendiskusikan dan melakukan pendalaman-pendalaman atas materi ini dengan tujuan mengurai realitas di balik pameo: “*One man’s terrorist is anoter man’s freedom-fighter.*”

Meskipun kami berdua belum puas karena pada dasarnya masih banyak detail dan argumen yang dapat ditampilkan, namun pertimbangan teknis terutama sekali cepatnya pergeseran dan perubahan setting politik dan sosial belakangan ini mendorong kami untuk mengambil keputusan mempublikasikan tulisan ini guna menghimpun respon pembaca. Dengan demikian, edisi mendatang diharapkan menjadi jauh lebih baik. Pada titik ini saja, bantuan dari

berbagai pihak dan berbagai komunitas sangat membantu. Tanpa kontribusi mereka akan sangat sulit bagi kami dalam menyusun konstruk berpikir pada buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ~ 3

KATA PENGANTAR ~ v

DAFTAR ISI ~ ix

BAB I. PENDAHULUAN ~ 1

A. Latar Belakang ~ 1

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah ~ 5

C. Signifikansi Dan Tujuan Penelitian ~ 6

D. Metode Penelitian Dan Sumber Bacaan ~ 7

BAB II. “TERRORISME ISLAM”:

EVOLUSI IDIOMATIK BERBASIS POLITIK ~ 11

A. Sejarah Dan Evolusi Konsep Terrorisme ~ 12

B. Formulasi Diskursus Terrorisme Islam ~ 26

C. Karakteristik Narasi Diskursus Terrorisme Islam ~ 37

BAB III. IMPLIKASI DISKURSUS GLOBAL

TERRORISME ISLAM ~ 53

A. Munculnya Counter-Critics ~ 56

B. Pola “Conditioning” Serta Efeknya Dalam Disseminasi
Diskursus Terrorisme Islam ~ 64

**BAB IV. TERRORISME DALAM DISKURSUS
DUNIA ISLAM ~ 75**

- A. Menyusun Diskursus Terrorisme Dalam Tradisi
Keilmuan Islam Klasik ~ 80
- B. Diskursus Terrorisme Di Tengah Masyarakat
Muslim Modern ~ 92

BAB V. PENUTUP ~ 105

- A. Kesimpulan ~ 105
- B. Saran ~ 109

REFERENSI ~ 111

INDEKS ~ 125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efek kehancuran menara kembar WTC (World Trade Center) di New York akibat serangan pada tanggal 11 September 2001 seakan membentuk konsensus dunia bahwa terorisme adalah musuh nomor satu bersama. Sebab, terorisme bisa menyerang pihak mana saja dan dapat terjadi pada saat yang tak terduga. Romantisme masa perang dunia pun kembali dalam bentuk persekutuan antar negara-negara kembali terjadi dengan slogan heroism “demi kepentingan ketertiban dunia.” Bedanya, jika pada masa-masa perang dunia sebelumnya kekuatan musuh begitu nyata baik secara institusi, sistem maupun struktur personelnya, musuh pada kampanye perang global kali ini berbentuk sebuah bayangan yang bisa saja bersembunyi di bawah selimut, yaitu terorisme.

Dalam perjalanannya, kampanye perang baru pimpinan AS ini berhasil mengidentifikasi dan kemudian menyerang serta menghancurkan target-targetnya. AS beserta koalisinya memulai operasi ini dengan aksi penyerangan militer di Afghanistan dengan target menghancurkan organisasi Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang dituduh sebagai otak serangan terorisme besar di AS serta

menggulingkan pemerintahan Taliban yang melindungi organisasi tersebut. Front-front peperangan berikutnya pun terjadi secara simultan di beberapa negara berupa penangkapan dan penghancuran pihak-pihak yang dicurigai sebagai operatif atau pendukung organisasi-organisasi yang dituduh berkaitan dengan aksi-aksi terror. Kampanye perang ini terus berlangsung tidak hanya menggunakan pendekatan aksi militer, tetapi juga melibatkan front perang dalam bidang finansial berupa pembekuan dana-dana dan dalam bidang ideology berupa propaganda deradikalisasi. Dalam sebuah pidatonya pada saat pertama kali pihak Amerika Serikat melancarkan serangan ke Afghanistan, President George W. Bush menyatakan bahwa: *“This military action... is a part and another front of the long war against terrorism that have been joined through diplomacy, intelligence, the freezing of financial assets and the arrest of known terrorist...”*¹

Kemarahan pemerintah dan rakyat Amerika Serikat atas peristiwa terrorisme yang melanda negerinya memang telah mendorong mereka untuk melakukan sebuah aksi retaliasi besar-besaran yang bersifat global. Mereka bertekad untuk menumpas habis musuh-musuh sampai ke akar-akarnya bahkan hingga benar-benar menghilangkan potensi kembalinya ancaman terror untuk selamanya. Hal ini juga tergambar dari pernyataan President Bush di peringatan 100 hari pertama kampanye perang global melawan terrorisme yang dipimpinnya. Pada kesempatan tersebut Bush juga mendeskripsikan “siapa” musuh utama yang tengah dikejanya:

...The American people need to know that we are facing a different enemy than we have ever faced. This enemy hides in shadows, and has no regard for human life. This is an enemy who preys on innocent and unsuspecting people... This enemy attacked not just our people, but all freedom loving

¹ “Presidential Address to the Nation”, Oct. 7, 2001, www.whitehouse.gov/news/releases/2001/20011007-8.html

people everywhere in the world...

... We put the world's financial institutions on notice: if you do business with terrorist, if you support them or sponsor them, you will not do business with the United States of America...

... This new enemy seeks to destroy our freedom and impose its views. We value life; the terrorists ruthlessly destroy it. We value education; the terrorists do not believe women should be educated or should have health care, or should leave their homes. We value the right to speak our minds; for the terrorists, free expression can be grounds for execution. We respect people of all faiths and welcome the free practice of religion; our enemy wants to dictate how to think and how to worship even to their fellow Muslims...

...The attack took place on American soil, but it was an attack on the heart and soul of the civilized world. And the world has come together to fight a new and different war, the first, and we hope the only one, of the 21st century. A war against all those who seek to export terror, and a war against those governments that support or shelter them...²

Ungkapan Bush tersebut jelas menggambarkan elemen Muslim yang ber-"haluan lain" sebagai musuh utamanya. Secara spesifik, musuh yang dimaksud tak lain adalah Osama bin Laden, Al-Qaeda, Pemerintahan Taliban, serta organisasi-organisasi atau individu lain yang berafiliasi dengan mereka. Namun, di sisi lain, ternyata musuh atau target dari serangan balas dendam Amerika Serikat tersebut ternyata tidak sepenuhnya merupakan Muslim yang berhaluan lain. Mereka mempunyai pendukung dan simpatisan yang luas di dunia Islam. Osama bin Laden, Al-Qaeda dan pemerintahan Taliban yang

² Executive Summary, "The Global War on Terrorism: The First 100 Days", on www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/100dayreport.html

menjadi target serangan Amerika Serikat sangat sarat dan kental dengan simbol-simbol Islam. Keduanya bahkan telah menyangkal keterlibatan mereka dalam serangan teroris 11 September yang terjadi di Amerika, serta beralasan bahwa adalah kewajiban agama mereka untuk tidak menyerah kepada tuntutan AS. Mereka juga menggunakan dalil-dalil agama dalam menjustifikasi perlawanan terhadap AS jika negara itu memulai aksi serangan militernya.³

Maka tak heran jika target-target dari aksi kampanye perang global ini kemudian menjadi tampak sangat monolitik. Artinya, tak dapat dipungkiri bahwa mayoritas sasaran yang dituduh terlibat dalam aksi terror adalah individu maupun institusi baik berupa organisasi ataupun negara yang notabene identik dengan Islam. Kondisi ini pada perkembangan selanjutnya sangat berpengaruh pada stigmatisasi bahwa budaya terror tumbuh subur di tengah penduduk Muslim dan bahwa Islam adalah sumber inspirasi dari terorisme. Nuansa ini begitu terasa jika melihat fenomena-fenomena tindakan hukum dan politis yang cenderung diskriminatif seperti pada aksi-aksi penangkapan tanpa keterangan serta pengawasan yang ketat terhadap individual Muslim di wilayah internasional.

Pada ranah wacana pun fenomena stigmatisasi ini tak bisa dihindarkan. Setelah peristiwa 11 September 2001 konsep tentang teroris dan terorisme cenderung tereduksi sedemikian rupa, sehingga ketika kata “teroris” atau “terorisme” terekspresikan maka gambaran yang akan timbul pada benak mayoritas masyarakat adalah organisasi al-Qaeda dan kelompok teroris Islam lainnya. Stigmatisasi pun kemudian berkembang tanpa bisa dicegah yang menyamakan kaum fundamentalis sebagai teroris, dan lebih jauh lagi mengidentikkan Muslim dengan teroris dan Islam dengan Terorisme. Fenomena wacana seperti ini akan sangat mudah ditemukan

3 “Bin Laden Calls on Pakistanis to Fight the US”, *Associated Press*, September 24, 2001. Lihat juga “Mullah Omar on His Own words”, *Voice of America*, September 26, 2001, dan “Taliban Stands Firm on Bin Laden”, *Afghan Islamic Press*, September 21, 2001.

khususnya pada literature-literatur kontemporer yang mengkhususkan kajiannya dalam isu terorisme.

Kondisi tersebut jelas menjadi stimulus tantangan tersendiri bagi masyarakat Muslim dan Dunia Islam. Terorisme bukan fenomena eksklusif yang didominasi oleh entitas komunitas ideologi tertentu mengingat fakta bahwa tradisi dan peluang terjadinya kekerasan memang eksis hampir di setiap agama atau ajaran. Namun fenomena wacana global tentang terorisme dewasa ini cenderung membentuk sebuah konstruksi konsep di ranah sosial yang menempatkan masyarakat Muslim pada posisi tersudut. Adalah sebuah permasalahan konseptual terbesar bagi masyarakat Muslim umumnya ketika agama yang mereka yakini sebagai jalan keselamatan dan pembawa kedamaian bagi dunia kemudian disandingkan dengan label atau term horror yang sangat destruktif seperti terorisme.

Berbagai segmen masyarakat di dunia Islam pun kemudian menaruh perhatian yang besar terhadap berkembangnya wacana problematic ini dengan mencoba memberikan berbagai macam klarifikasi. Tujuannya jelas mengarah pada rehabilitasi nama dari agama agung yang mereka anut dengan membangun argument-argumen dan rasionalisasi distingtif yang memisahkan kemaslahatan agama dari pola destruktif yang inherent dalam terorisme. Argumen dan rasionalisasi yang dibangun tentu akan berlandaskan pada berbagai perspektif yang multi-dimensional dan akan sangat dipengaruhi oleh konteks kultur tradisi, keilmuan serta historisitas dari masing-masing segmen yang menyuarakannya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, Sebuah kajian khusus yang menyoroti bagaimana komunitas Muslim merespon terhadap stigmatisasi terorisme yang melingkupi agamanya akan memberikan peta gambaran umum dari dinamika sosial dan politis dunia Muslim dewasa ini. Dunia Muslim adalah sebuah entitas yang unik di mana

tingkat primordialisme begitu kuat terikat pada tradisi cultural historisnya. Oleh karenanya dalam setiap kajian tentang ekspresi konseptual-ideologis masyarakat Muslim, latar belakang historis dari wacana yang menjadi fokus semestinya mendapatkan perhatian yang serius.⁴

Berangkat dari konsep tersebut, kajian dalam penelitian ini akan mengambil fokus untuk menjawab pertanyaan utama: “Bagaimanakah segmen masyarakat Muslim menyikapi wacana terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam?” pertanyaan umum tersebut kemudian dijabarkan dalam rincian pertanyaan berupa:

1. Bagaimanakah evolusi terminologi dan diskursus terorisme global dalam sejarah latar belakangnya serta mengapa kemudian berkembang dan identik dengan Islam?
2. Bagaimanakah bentuk diskursus terorisme global yang cenderung selalu melibatkan Islam? Apakah berbentuk monolitik? Adakah diskursus lain yang menjadi antithesis dari mainstream
3. Bagaimanakah masyarakat Muslim merespon diskursus global terorisme yang mendiskreditkan mereka? Adakah hubungan evolutif antara diskursus terorisme modern di tengah masyarakat Muslim dengan latar belakang sejarah diskursus sebelumnya?

C. Signifikansi dan Tujuan Penelitian

Diskursus Terorisme yang mencuat menjadi fenomena global di awal millennium ini mempunyai karakteristik kental berupa stigmatisasi yang kuat terhadap Islam. Sehingga, citra Islam sebagai agama pembawa kedamaian yang telah survive melewati lebih dari 14 abad tantangan evolusi sejarah dan kini menjadi sumber kebenaran yang diyakini oleh lebih dari 1,4 miliar penduduk bumi kembali diuji. Oleh karenanya, kehadiran kajian-kajian yang membahas tentang bagaimana masyarakat Muslim memandang konsep terorisme dewasa ini yang sarat stigmatisasi terhadap Islam akan

4 Bernard Lewis, *What Went Wrong*,

memberikan peta gambaran tentang bagaimana masyarakat Islam berupaya menyikapi tantangan stimulus terberat yang menyerang aspek paling fundamental dari keyakinannya.

Konstruksi sikap masyarakat Muslim terhadap sebuah diskursus yang menyelubungi keyakinannya juga akan memberikan gambaran kontekstual dari dinamika dan dialektika pemikiran di Dunia Islam yang berinteraksi dengan trend sosio-kultural dan sosio-politis pada ruang dan waktu dimana diskursus tersebut mengemuka. Dengan menganalisis faktor-faktor kontekstual tersebut serta menempatkannya dalam hirarki genealogis dan sekuensial sejarah maka akan memberikan sebuah potret dari pola perkembangan khazanah tradisi keilmuan dan evolusi sosial dunia Islam.

Dari sisi akademik, kajian kontekstual seputar diskursus yang mengglobal di dunia Islam juga akan menawarkan sebuah trend alternatif dalam perbendaharaan metodologi studi Islam. Oleh karenanya, penelitian ini disamping bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana sikap masyarakat Muslim kontemporer dalam menghadapi diskursus terrorisme yang sering dikaitkan dengan Islam juga berusaha untuk menelusuri jejak-jejak sejarah wacana dalam khazanah keilmuan klasik Islam yang fokus kepada topic yang identik dengan wacana terrorisme masa kini. Minimnya studi dalam lingkup tema tersebut memberikan ruang eksplorasi yang begitu luas bagi diselenggarakannya pembahasan lebih lanjut.

D. Metode Penelitian dan Sumber Bacaan

Penelitian ini akan mengambil bentuk survey pustaka dengan mengkaji teks-teks pembahasan Islam dan terrorisme yang diekspresikan oleh para tokoh dan intelektual masyarakat Muslim. Pada tahap awal, teks-teks tersebut dipilah dan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, klasik dan modern. Teks-teks klasik yang dimaksud adalah buku-buku atau monograf yang telah terpublikasikan sebelum masa runtuhnya kekhilafahan Utsmani atau sebelum abad 20.

Sedangkan teks-teks modern adalah buku-buku, artikel, jurnal atau makalah online yang eksis setelahnya. Klasifikasi dasar ini ditujukan untuk memenuhi logika framework dari tema inti penelitian ini.

Pada tahap berikutnya, teks-teks klasik yang akan dijadikan sebagai sumber bahan bacaan utama akan bersandar pada karya-karya klasik yang tergolong otoritatif berupa karangan-karangan dari para tokoh utama empat mazhab mainstream dalam tradisi legal Islam. Pengambilan sampel dari aspek legal ini berangkat dari asumsi bahwa karya-karya dalam bidang tersebut banyak mendapatkan perhatian serta mempunyai pengaruh yang lebih luas dalam konstruksi pemikiran sosial masyarakat Muslim pada masanya. Karya-karya yang akan menjadi bahan rujukan utama di antaranya adalah: Al-Barr, Ibn 'Abd, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*, Al-Kasani, Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud, *Bada' al-Shana' l fi Tartib al-Syara' i*, Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah*, 'Abd al-Wahhab, al-Qadhi, *al-Ma'unah 'ala Madzhab 'Alim al-Madinah*, Al-Sawi, Ahmad, *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, Al-Dasuqi, Syams al-Din, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Al-Qurthubi, Ibn Anas, Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Imam al-Syafi' i*, al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, dan Al-Qarafi, Syihab al-Din, *al-Dzakirah*. Adapun sumber bahan bacaan dalam karya-karya kontemporer masih terlalu sulit untuk menentukan teks-teks yang definitive mengingat banyaknya material serta keluasan wacana yang telah beredar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebuah framework klasifikasi tema disusun terlebih dahulu setelah itu baru dicari sampel-sampel teks yang memenuhi criteria klasifikasi tersebut.

Setelah proses klasifikasi, teks-teks tersebut kemudian akan di analisa secara lebih mendalam menggunakan sebuah metode yang disebut dengan *Critical Discourse Analysis*. Metode analisa ini digunakan karena manfaatnya telah terbukti dalam membedah latar

belakang kekuasaan, dominasi, bias serta afiliasi dibalik konstruksi teks-teks yang menjadi pusat wacana dalam kehidupan sosial dan politis.⁵

5 Teun A. Van Dijk, "*Critical Discourse Analysis*", *Discourse*,

“TERRORISME ISLAM”: EVOLUSI IDIOMATIK BERBASIS POLITIK

Penggunaan istilah terrorisme dari masa ke masa selalu diliputi oleh kontroversi. Keluasan cakupan wacana, banyaknya faktor sumber daya manusia yang terlibat dan terdampak, efek sosio-politis serta kerugian material yang ditimbulkan adalah sebagian latar belakang yang menyebabkan tidak pernah ada satu konsensus pun yang bisa mendefinisikan terrorisme secara utuh. Publik biasanya hanya mampu sebatas mendeskripsikan intensitas kehororan aksi dan dampaknya tanpa bisa mengurai detail spesifikasi dan karakteristiknya. Terrorisme seringkali terka-mouflage dalam aksi-aksi kekerasan yang bahkan mengatasnamakan symbol-symbol luhur kemanusiaan seperti penumpasan kezaliman, penegakkan kebenaran dan keadilan atau perjuangan demi pembebasan dan kemerdekaan. Sebaliknya, labelisasi terrorisme juga sering digunakan sebagai alat penguasa lalim untuk mendelegitimasi suara perlawanan yang menentangnya. Adalah sebuah fenomena yang lazim ditemukan dalam setiap konflik besar dimana satu pihak menuduh rivalnya sebagai teroris. Teroris dan terrorisme adalah musuh, tetapi menyusun identifikasinya dalam sebuah consensus sebagai musuh bersama adalah dilemma yang tak berujung.

A. Sejarah Dan Evolusi Konsep Terrorisme

Dalam tradisi Barat, istilah terrorisme telah populer digunakan sejak akhir tahun 1700-an.¹ Pada sebuah Konvensi Nasional di Perancis pasca keberhasilan gerakan revolusi menggulingkan dan mengakhiri kekuasaan monarkhi di negeri itu, salah satu pimpinan gerakan revolusioner yang bernama Maximilien Robespierre mendeklarasikan bahwa “*Terrorisme*” adalah salah satu instrument dari sistem kebijakan pemerintahan yang dipimpin gerakannya. Sistem kebijakan “terror” ditujukan untuk melindungi pemerintahan revolusi dari ancaman musuh-musuh rakyat yang menginginkan kembali restorasi kekuasaan raja terguling.² Sedangkan pada kamus-kamus Bahasa Inggris, kata terrorisme pertama kali tercatat pada tahun 1798 yang didefinisikan sebagai ‘penggunaan terror secara sistematis sebagai sebuah kebijakan’.³ Sampai pada titik ini, awal penggunaan istilah terrorisme umumnya berimplikasi makna metode kebijakan intimidatif yang diambil oleh sebuah pemerintahan dalam mempertahankan stabilitas kekuasaannya.

Perkembangan selanjutnya kemudian menunjukkan transformasi dari penggunaan kata terrorisme. Pada tahun 1870 di Rusia, sebuah kelompok gerakan rakyat mengenalkan diri mereka

1 Ada pula petunjuk yang mengisyaratkan bahwa istilah “Terror” sebagai akar kata dari “terrorisme” telah digunakan sejak tahun 105 SM pada masa kekaisaran Romawi. “*Terror Cimbricus*” adalah istilah yang merujuk pada peristiwa kerusuhan dan situasi darurat di kota Roma sebagai akibat dari serangan yang dilakukan oleh suku Cimbri ke ibukota Romawi tersebut. Mark Burgess, *A Brief History of Terrorism*, (Washington DC: Center for Defense Information, 2003) at <https://www.ciaonet.org/wps/bum09/> diakses tanggal 23 Juli 2013

2 Myra Williamson, *Terrorism, War and International Law: The Legality of the Use of Force against Afghanistan in 2001*, (London: Ashgate Publishing, 2009), hal. 38.

3 Douglas Harper, “Terrorism”, *Dictionary.com: Online Etymology Dictionary*, at <http://dictionary.reference.com/browse/terrorism>, diakses tanggal 23 Juli 2013

sebagai terroris yang melakukan perlawanan terhadap penguasa.⁴ Seorang penulis anarkis Jerman, Johann Most, juga menunjukkan nuansa perlawanan arus bawah dalam mendefinisikan terrorisme melalui satu judul bukunya “*Advice for Terrorists*” yang ditulis pada tahun 1880.⁵ Dua contoh di atas menunjukkan bahwa istilah terrorisme telah mengalami pergeseran dalam satu abad kemudian. Dari sebuah sistem kebijakan yang dipraktikkan oleh penguasa menjadi sebuah upaya yang digagas oleh arus bawah. Inilah yang menjadi titik awal dari penerapan istilah terrorisme pada masa-masa berikutnya, dimana istilah tersebut umumnya merujuk pada aksi-aksi yang dilakukan oleh entitas-entitas sub-nasional atau non-pemerintahan yang ditujukan untuk menggoyahkan stabilitas status quo kekuasaan.

Meski impresi positif berupa kesan kental perjuangan begitu kentara dalam pengistilahannya, kesan bahwa terrorisme adalah ‘sesuatu yang menyeramkan’ tetaplah eksis. Kekhawatiran terhadap terrorisme jelas dirasakan oleh kalangan pemangku jabatan mengingat aksi-aksi terror kekerasan kerap mengancam kelanggengan kekuasaan mereka. Bukti nyata dari kekhawatiran ini terekam dalam upaya yang digagas oleh delegasi dari beberapa negara yang tergabung dalam Liga Bangsa-bangsa (League of Nations). Lembaga yang merupakan cikal bakal dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) ini sejak pertamakali pembentukannya telah memasukkan isu terrorisme sebagai agenda utama pembahasan mereka dalam sebuah konvensi. Konvensi dengan mengambil tema pencegahan dan represi terhadap terrorisme yang diselenggarakan pada tahun 1930-an ini mendefinisikan terrorisme sebagai sebuah ‘aksi criminal yang menargetkan instabilitas suatu Negara berdaulat dengan menciptakan sebuah kondisi terror di tengah-tengah kehidupan mas-

4 Martha Crenshaw, *Terrorism in Context*, (Penn: Penn State University Press, 1995), hal. 77

5 Martha Crenshaw, *Terrorism in Context*,... hal. 44

asyarakat'.⁶ Draft konvensi tersebut juga merinci aktivitas-aktivitas yang dikategorikan aksi criminal terrorisme seperti:

1. Kejahatan terencana yang menyebabkan kematian, luka berat atau terbelenggunya keleluasaan gerak dari/terhadap para kepala Negara atau penerusnya, terhadap istri atau suami dari kepala Negara tersebut, atau terhadap individu-individu yang memangku jabatan public sehingga fungsi jabatannya terganggu.
2. Pengrusakan massif dan terstruktur terhadap property public yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Kejahatan terencana yang membahayakan hidup para pemangku jabatan penting public
4. Merencanakan serangan dengan kemungkinan akibat seperti yang disebut di atas
5. Memproduksi, menerima, memiliki atau memasuk senjata, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang mengakibatkan kejahatan-kejahatan seperti disebut di atas.⁷

Meski kemudian draft ini tidak diberlakukan, agenda konvensi tersebut menunjukkan adanya konotasi politis dan emosional dari kata 'terrorisme'. Definisi dari draft ini mewakili kepentingan para penguasa yang mulai menggeser stigma terrorisme sebagai alat perjuangan kaum tertindas. Jika sebelumnya terrorisme berkonotasi positif yang mengandung semangat perjuangan, pasca konvensi Liga bangsa-bangsa kata tersebut mulai menunjukkan nuansa horrornya.⁸

6 Teks asli dari draft konvensi ini dapat ditemukan dengan mudah dalam buku-buku dengan tema terrorisme internasional. Beberapa diantaranya seperti, Roza Pati, *Due Process and International Terrorism*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2009), atau Alex Conte, *Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism*, (Heidelberg: Springer, 2010). Lihat juga Myra Williamson, *Terrorism, War and International Law: The Legality of the Use of Force against Afghanistan in 2001*, (London: Ashgate Publishing, 2009).

7 Lihat Roza pati, *Due Process and International Terrorism*, hal. 279.

8 Sebelum Konvensi Liga Bangsa-bangsa tahun 1937, istilah terrorisme

Aksi-aksi kekerasan yang menciptakan suasana teror di tengah kehidupan publik seperti yang menjadi koncern di kalangan delegasi Konvensi Liga Bangsa-bangsa di atas mulai menunjukkan peningkatan drastis di beberapa belahan dunia pasca berakhirnya Perang Dunia (PD) pertama. Para sejarawan di bidang konflik kawasan menggarisbawahi periode interval 1914-1922 sebagai embrio dari merebaknya aktivitas teror bertujuan politis yang terjadi pada fase-fase berikut.⁹ Pemecahan wilayah Timur Tengah dan Central Asia yang mulanya berada dalam satu pengelolaan terstruktur dibawah kekuasaan Usmaniyah (*Ottoman*) Turki dan Kekaisaran Jerman serta Astro-Hungaria menjadi Negara-negara kecil federal otonom adalah pangkal permasalahannya. Pihak Sekutu Amerika dan Eropa yang memenangkan PD I dan duduk dalam perundingan *Paris Peace Conference*¹⁰ menikmati kekuasaan penuh untuk mele-

mengalami masa *turn-over* dalam konotasinya. Masa-masa awal terbentuknya aturan perang (*Laws of War*) juga dipengaruhi oleh wacana terorisme ini dimana seringkali pihak-pihak yang berperang sering melakukan tindakan biadab atas nama perjuangan. Tahun 1899 muncul sebuah klausul umum yang bernama *the Martens Clause* diterima secara luas sebagai etika perang yang membedakan kategori tindakan yang dapat diterima dalam perang dan tindakan yang termasuk kejahatan perang. Klausul Martens ini kemudian banyak mempengaruhi pandangan terhadap istilah terorisme. Lihat V. Pustogarov, "*Fyodor Fyodorovich Martens (1845-1909) – a Humanist of Modern Times*", *International Review of the Red Cross (IRRC)*, No. 312, May-June 1996, hal. 300-314.

9 Lihat misalnya D. Fromkin, *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, (New York: Henry Holt, 1992), I. Hilton, "*The Pashtun code*" dalam *New Yorker*, 77(38), (2001), hal. 58-71, dan Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, (New Haven and London: Yale Nota Bene, 2001)

10 Paris Peace Conference adalah sebuah perundingan internasional yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari pihak sekutu yang memenangkan PD I dengan mengalahkan koalisi kekuatan Kekaisaran Jerman dan Kesultanan Turki Usmani. Pertemuan yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1919 ini banyak dihadiri oleh kepala negara dan raja dari seluruh dunia kecuali Jerman dan Russia dan diprakarsai oleh empat kekuatan negara besar yang dikenal dengan istilah *The Big Four*, yaitu Amerika Serikat dengan Presiden Woodrow Wilson sebagai kepala delegasinya, Inggris dengan Perdana Menteri David Lloyd George, Perancis

takkan batas-batas wilayah taklukkan mereka di kawasan lingkaran minyak itu dengan sama sekali tidak melibatkan masukan pertimbangan dari pihak yang terkalahkan yang telah lama menjadi 'tuan' sebelumnya.¹¹

Pembentukan *pseudo nation-states* yang dilakukan oleh kampiun PD I dalam bentuk pemilahan territorial dengan menempatkan pemerintahan boneka di kawasan Timur Tengah dan Central Asia tentu saja didasari oleh pertimbangan geopolitis yang menjamin keberlangsungan dominasi control di kawasan tersebut. Tetapi, pada praktik dan perkembangan selanjutnya, pola pemilahan ini tampak seperti dilakukan secara gegabah¹² yang akhirnya justru menjadi cikal bakal api kekacauan yang tak pernah padam hingga saat ini. Inggris dan Perancis, dua negara yang paling berperan dalam zonasi ini, masing-masing mengatur pola komposisi system pemerintahan, penguasa, dan segmentasi populasi yang menempati wilayah yang baru mereka bentuk. Pengaturan territorialisasi tampak serampangan jika ditinjau dari perspektif potensi konflik karena keputusan Konferensi Paris member mandate kepada dua negara ini

dengan Perdana Menteri Georges Clemenceau dan Italia dengan Perdana Menteri Vittorio Orlando. Beberapa kesepakatan yang berhasil dicapai dalam perundingan tersebut bisa dikatakan sebagai tonggak yang menentukan sejarah dunia pada perjalanan selanjutnya. Beberapa diantaranya seperti pembentukan Liga Bangsa-bangsa, Perjanjian Versailles dengan pihak Jerman, pelimpahan penguasaan wilayah-wilayah di bawah administrasi Jerman dan Usmaniyah di seluruh dunia terutama kepada Inggris dan Perancis, serta pembentukan batas-batas wilayah negara baru dengan basis nasionalisme. Lihat misalnya, The Editors of Encyclopaedia Britannica, "*Paris Peace Conference*", *Encyclopaedia Britannica*, online version at <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/443901/Paris-Peace-Conference> diakses tanggal 4 November 2013.

11 D. Fromkin, *A Peace to End All Peace..* hal. 17

12 Kesan "asal-asalan" ini tampak misalnya dalam statement canda yang diucapkan oleh Winston S. Churchill dalam hal pembentukan batas wilayah Israel-Palestina yang menjadi titik api pergolakan hingga saat ini. "*I created Transjordan with the stroke of a pen on a Sunday afternoon in Cairo.*" Dikutip dari L. Collins, & D. Lapierre, *O Jerusalem!*, (New York: Simon & Schuster, 1972), hal. 83

untuk segera membagi kue kewenangan dominasi atas kawasan dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, factor situasi dan kondisi obyektif lapangan luput dari pertimbangan. Nuansa balas dendam bawaan PD I serta hasrat untuk memperluas dan melanggengkan kolonialisme akhirnya menjadi dasar utama dalam pemetaan wilayah. Pertimbangan-pertimbangan krusial seperti latar belakang adat, etnis dan kesukuan, agama, pola jaringan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang telah berlaku tampak diabaikan dan bahkan direvolusi secara radikal.¹³ Konflik komunal berdarah pun akhirnya pecah dengan mudah.

Dalam membentuk Iraq, misalnya, Inggris menyatukan suku Kurdi, penganut Sunni, mayoritas Syi'ah dan umat Yahudi dalam sebuah negara dengan menempatkan seorang pangeran Arab sebagai penguasa. Keputusan ini kemudian menimbulkan pertumpahan darah dimana populasi Iraq memberontak yang direspon oleh pengerahan pasukan Inggris dan berujung dengan jatuhnya korban 500 dari pihak Inggris dan lebih dari 6000 nyawa rakyat Iraq.¹⁴ Pemisahan Trans-Jordan (sekarang Israel) dari Arab Palestina¹⁵ dan begitu juga ketika menggabungkan dua kekuatan natif Hindu dan Muslim di Asia Selatan dalam satu negara India serta pembentukan komposisi tribal penguasa di bagian utara Afghanistan sebagai upaya membendung kekuatan Russia juga menimbulkan pertikaian dahsyat yang memakan banyak korban.¹⁶ Sementara, Prancis mempraktikkan pola berbeda tapi dengan kesalahan yang sama. Jika Inggris berusaha menyatukan beberapa komunitas ethno-religius dibawah satu pemerintahan boneka yang feodal, Perancis melaku-

13 D. Fromkin, *A Peace to End All Peace..* hal. 17

14 J. Keegan, *The Iraq War*, (New York: Knopf, 2004), hal. 14-15

15 D. Fromkin, *A Peace to End All Peace..* hal. 17, lihat juga hal. 528

16 Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, hal. 146

kan pemisahan territory antar ethno-religius dengan pemerintahan pseudo-demokratis berbentuk republic tetapi dengan mengatur ketercampuran di wilayah perbatasan. Akulturasi yang tadinya dimaksudkan sebagai *buffer zone* bagi keberlangsungan control malah justru berbalik menimbulkan konflik sektarian kronis dan mengerikan seperti yang terjadi antara Syria dan Lebanon.¹⁷

Rangkaian letupan-letupan aksi kekerasan di kawasan tersebut yang dipicu oleh factor teritorialisasi menjadi latar belakang bagi diselenggarakannya konvensi Liga Bangsa-bangsa yang membahas agenda khusus tentang terrorisme seperti yang telah dibahas sebelumnya. Lebih dari itu, beberapa ilustrasi dari konsekuensi teritorialisasi di atas terus menyisakan masalah dan menjadi sumber konflik. Malah, konflik yang penuh dengan aksi-aksi kekerasan bernuansa terror itu kemudian mempunyai pengaruh trans-nasional dan menginspirasi gerakan-gerakan separatism di berbagai belahan dunia lain pada dekade-dekade berikutnya.

Meski kemudian aksi terror terus berkembang, memicu terjadinya PD II, dan terus marak pada periode perang dingin, upaya untuk mengartikulasikan sebuah konsep consensus yang mendefinisikan terrorisme sebagai musuh bersama masih berkuat di tataran wacana dan hanya merebak di kalangan akademisi. Walter Lacquer mensinyalir bahwa fenomena tersebut sangat terkait dengan intensitas persaingan dominasi geopolitics antar kekuatan besar yang terlibat dalam perang dingin sehingga akan sangat mustahil membawa konsep terrorisme ke ranah legal apalagi menuju sebuah consensus internasional.¹⁸ Tidak mudahnya pendefinisian ini juga tampak dari usaha internasional untuk kembali membicarakan konsep terrorisme pasca kejadian terror di olympiade Muenchen tahun 1972. PBB menggagas sebuah panitia yang dinamai *ad hoc Committee on*

17 D. Fromkin, *A Peace to End All Peace..* hal. 17

18 W. Lacquer, *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*, (Oxford and New York: Oxford University Press, 1999), hal. 1-2

Terror. Tetapi setelah lebih dari tujuh tahun bersidang committee ini tidak pernah sampai pada satu kesepakatan yang dan berakhir tanpa menghasilkan keputusan yang berarti.¹⁹

Baru pada sekitar tahun 1970-an, konsep terorisme mulai menginjak ranah wacana legal meski saat itu bisa dikatakan merupakan sebuah terobosan baru yang berani dan masih bersifat domestic. Di Amerika Serikat, Direktur FBI William Webster mulai mengkategorisasikan beberapa kasus kriminal federal yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan domestik ke dalam klasifikasi terorisme. Tetapi, baru pada tahun 1994 lah FBI kemudian menerapkan eksistensi terorisme sebagai sebuah tuntutan kejahatan federal.²⁰

Tunggaknya adalah tuntutan terhadap tersangka pemboman gedung FBI di Oklahoma pada tahun 1994, Timothy Mc Veigh, yang didakwa dengan tuduhan terorisme. Titik berat substansi tuntutan tersebut terlatak pada dampak kerusakan dari aksi terdakwa serta eskalasi kekhawatiran public yang ditimbulkannya. Pasca kasus Mc Veigh tersebut, FBI menerjemahkan terorisme secara resmi sebagai; 1). *Unlawful use of force or violence*, 2). *Non-combatant people and property as potential targets*, 3). *Having political, social, religious, ideological goals*, 4). *Objectives which are pursued through coercion or intimidation*.²¹

Definisi FBI tersebut hampir senada dengan versi yang dirilis oleh kementerian luar negeri AS beberapa bulan sebelumnya. US Department of State mengartikan terorisme sebagai “*premeditat-*

19 Muhammad Mustofa, “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologis”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, FSISIP UI, Vol. 2, No. 111, Desember 2002, hal. 35

20 B.L. Smith, *Terrorism in America*, (New York: New York University Press, 1994), hal. 8

21 B.L. Smith, *Terrorism in America*. hal. 8. Lihat Juga Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, (New York: Columbia University Press, 1998), hal. 38

ed, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience."²² Meski tampak begitu identik, dua definisi otentik yang dikeluarkan secara formal oleh dua lembaga negara di AS tersebut ternyata menciptakan beberapa polemik substansial di tataran aplikasi. Pertama, langkah FBI menerapkan klausul terorisme pada kasus Timothy Mc Veigh yang akhirnya terbukti beraksi secara individual berbeda dengan persepsi US Department of State yang menggarisbawahi faktor pelaku yang beraksi secara kelompok. Kedua, karena cakupan wilayah kerjanya FBI lebih fokus menerjemahkan terorisme dalam konteks domestic, sementara US Department of State mengartikannya sebagai aksi kekerasan yang mengancam stabilitas global. Polemik definisi di internal lembaga negara AS ini tentu saja berpengaruh dalam menentukan satu consensus kepastian bentuk hukum yang akan diadopsi negara itu. walaupun kemudian badan legislasi AS, *House of Bills*, berusaha mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan definisi terorisme sebagai "*the use of force or violent in violation of the criminal laws of the US or any state... that appears to be intended to achieve political or social ends*", tetap saja tidak memberikan solusi bagi terbentuknya definisi yang akan menjadi satu rujukan pasti bersama.²³

Polemik serta kontroversi yang masih terus membayangi diskusi public AS tentang wacana terorisme ternyata tidak membatasi negara-negara lain untuk ikut serta mengartikulasikan pen-
definisian yang sama. Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga di AS kemudian menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk meratifikasi aturan-aturan tentang terorisme. Bahkan, definisi-definisi yang masih dalam tahap kontroversi itu

22 US Department of State, *Patterns of Global Terrorism 1994*, April 1995, hal. vi

23 Mary H. Cooper, "*Definitions of Terrorism often Vary*", *the CQ Research*, vol. 5, No. 27, July 1995, hal. 646

menjadi sebuah wacana global dan diadopsi sebagai draft awal dalam agenda kesepakatan bersama tentang terorisme secara internasional dalam forum konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di awal abad 21.

Agenda pembahasan tentang definisi terorisme telah ada di meja perundingan Sidang Umum (*General Assembly*) PBB sejak tahun 2000. Pada tahun 2002, sidang yang bertajuk *Comprehensive Convention on International Terrorism* itu telah sampai pada draft yang mengartikan terorisme sebagai aksi kriminal terencana yang menyebabkan jatuhnya korban tewas atau luka berat dan menimbulkan kerusakan parah pada properti atau fasilitas vital public dan menghambat berjalannya roda pemerintahan negara yang sah sehingga menimbulkan kerugian financial-ekonomis yang besar, dan dimana aksi ini ditujukan untuk mengintimidasi populasi, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, atau memaksa institusi internasional yang legitimate untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah kebijakan.²⁴

Definisi tersebut sebenarnya tidaklah begitu kontroversial. Perdebatan sengit timbul justru pada implikasi derivasinya. Deadlock pendapat antar delegasi terjadi pada point apakah definisi tersebut juga berlaku pada aksi kekerasan ‘kriminal’ yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata resmi sebuah negara atau oleh kelompok pejuang kemerdekaan. Di tengah perbincangan ini pula sebuah konsep tentang “*State Terrorism*” yaitu kemungkinan terjadinya sebuah aksi terror yang dilakukan oleh suatu negara terhadap rakyatnya atau terhadap negara berdaulat lain mencuat. Thalif Deen mendeskripsikan bahwa panasnya perdebatan di meja perundingan bertumpu pada beberapa hal dasar krusial seperti: apa yang membedakan antara organisasi teroris dan pejuang kemerdekaan?

24 UN General Assembly, “*Report of the Ad Hoc Committee*”, 6th Session, 28 January – 1 February 2002, seperti dikutip dari Thalif Deen, “*POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism*”, IPS, 25 July 2005

Adakah pengecualian bagi angkatan bersenjata resmi pemerintah jika mereka melakukan aksi yang termasuk kategori terorisme? Jika tidak ada pengecualian, sejauh mana tindakan itu tergolong ke dalam aksi *State Terrorism*?²⁵ Koordinator perundingan yang didukung oleh mayoritas delegasi dari negara-negara Barat kemudian mengajukan beberapa pengecualian dari pengertian terorisme seperti: Aksi-aksi yang dilakukan berdasarkan hukum-hukum internasional dan aturan-aturan piagam PBB, Aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata resmi dalam periode konflik bersenjata, dan aksi Angkatan Bersenjata itu harus diatur juga oleh kesepakatan hukum internasional.²⁶ Suara keberatan muncul dari pihak delegasi negara-negara yang tergabung dalam *Organization of Islamic Conference* (Organisasi Konferensi Islam/OKI). Mereka juga menuntut klausul pengecualian bagi aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berjuang bagi kemerdekaan dari pendudukan kekuatan asing, dan aksi itu juga tak perlu diatur dalam kesepakatan hukum internasional tersendiri sepanjang masih sesuai dengan aturan-aturan internasional yang telah ada.²⁷ Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Sidang Umum PBB tersebut tidak pernah sampai pada satu kesepakatan resmi yang bulat. Satu-satunya definisi resmi yang terartikulasi hanya sampai di tingkat resolusi Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB Nomor 1566 tahun 2004,²⁸ itu pun masih tetap den-

25 Thalif Deen, "POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism", *IPS*, 25 July 2005

26 UN General Assembly, "Report of the Ad Hoc Committee", 6th Session, 28 January – 1 February 2002, seperti dikutip dari Thalif Deen, "POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism", *IPS*, 25 July 2005

27 UN General Assembly, "Report of the Ad Hoc Committee", 6th Session, 28 January – 1 February 2002, seperti dikutip dari Thalif Deen, "POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism", *IPS*, 25 July 2005

28 Resolusi ini berbentuk kecaman terhadap segala tindakan terorisme yang berupa "criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke

gan meninggalkan perdebatan yang tak terselesaikan.

Dilemma tak berujung dari usaha pencarian konsep definitive tentang terorisme ini terletak pada dua kutub fakta kepentingan hukum yang berlawanan. Di satu sisi, dunia internasional membutuhkan sebuah formulasi definisi komprehensif yang memungkinkan pemberian sanksi hukum dan moral yang keras terhadap aksi teroris dalam rangka melindungi hak asasi manusia, menjaga stabilitas sebuah negara dalam menjalankan kebijakan politik yang sah, dan demi menjamin keamanan dan perdamaian dunia. Tetapi di sisi lain, konsepsi sebuah hukum haruslah presisi, tidak ambiguitas, memvonis tepat sebuah aksi pelanggaran atau kesalahan dengan mengeksklusikan tindakan yang memang legitimate.²⁹ Di sisi terakhir ini lah semua permasalahan bertumpu. Divergensi pandangan di tingkat internasional mengenai contoh aksi yang bisa dikategorikan terorisme begitu besar dan luas karena nilai-nilai fundamental masing-masing kelompok kepentingan dipertaruhkan.

“*One man’s terrorist is another man’s freedom fighter*”. Pameo itu begitu terkenal dalam setiap studi tentang terorisme. Bruce Hoffman, misalnya, menyatakan bahwa ‘terorisme’ adalah sebuah kata pejorative yang berkonotasi negative dan sangat subjektif. Kata itu pasti akan diasosiasikan oleh satu pihak kepada tindakan pihak

a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature” lihat United Nations Security Council resolution 1566, 8 October 2004, arsip dokumen ini dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/82/PDF/N0454282.pdf?OpenElement> pada tanggal 9 Januari 2014

²⁹ Pendapat ini dikutip dari ungkapan yang disampaikan oleh Carlos F. Diaz-Paniagua, salah satu coordinator Sidang Umum PBB dalam agenda Comprehensive Convention on International Terrorism, lihat C.F. Diaz-Paniagua, *Negotiating Terrorism: The Negotiation Dynamics of Four UN Counter-Terrorism Treatises 1997-2005*, (New York: City University of New York, 2008), hal. 47

lain yang menjadi musuhnya, terlepas dari mulia atau tidaknya tujuan dari aksi tersebut.³⁰ Dengan nada yang sama, Sami Zeidan mengungkapkan bahwa untuk melabeli terorisme akan sangat tergantung pada posisi di mana anda berpijak. Nilai kepentingan politisnya jauh melampaui kadar obyektifitas hukumnya. Definisinya bisa berubah-ubah sesuai dengan tujuan politis apa yang hendak dicapai. Pada masa pendudukan Uni Sovyet, Osama bin Laden dan Taliban di mata Barat adalah para Mujahidin yang memperjuangkan kemerdekaan dan oleh karenanya didukung oleh CIA. Kini mereka menempati posisi teratas dalam daftar teroris yang paling diburu di dunia.³¹

Ke-ambiguan konsep terorisme juga tergambar dari laporan beberapa survey kajian. Alex P. Schmid dan Albert J. Jongman (et.al.) mencatat lebih dari 109 definisi terorisme dengan 22 detail element yang berbeda.³² Walter Laqueur juga menghitung ada lebih dari 100 definisi seputar terorisme. Namun, menurutnya, kesimpulan yang mengerucut dari keseluruhan definisi itu hanya terletak pada bahwa terorisme adalah aksi yang melibatkan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang tak jauh bedanya dengan perang, kebijakan yang menindas, atau perkelahian di bar.³³ Literatur-literatur kontemporer menandai setidaknya empat karakteristik tindakan terorisme; pertama, tindakan atau ancaman kekerasan dengan tujuan yang berdampak politis. Kedua, aksinya tersusun rapi dengan terencana, terukur dan sistematis. Ketiga, tindakan teroris mengabaikan

30 Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, hal. 32

31 Sami Zeidan, "Desperately Seeking Definition: The International Community's Quest for Identifying the Specter of Terrorism", *Cornell International Law Journal*, vol. 36, 2004, hal. 491-492

32 Alex P. Schmid, Albert J. Jongman (et.al.), *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature*, (New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, 1988), hal. 5-6.

33 Walter Laqueur, *The New Terrorism...*, hal. 6

hukum peperangan yang telah berlaku. Keempat, aksi terorisme ditujukan untuk menghasilkan efek psikologis yang dahsyat dan luas menjangkau sasaran di luar target atau korban dari aksi aktualnya.³⁴ Tetapi karakteristik tersebut juga tetap saja tidak dapat mencairkan permasalahan inti dilematisnya. Batasan point yang membedakan sebuah aksi kekerasan antara yang dilakukan oleh teroris dengan pejuang revolusioner tetaplah sumir.

‘Terorisme’, sebagaimana dampak dari aksi aktualnya, adalah sebuah term ‘aneh’ yang dahsyat. Sebuah kata yang mempunyai kapasitas untuk menstigmatisasi, mendeligitimasi, mendehumanisasi dan menistakan siapa saja yang dilabelinya. Ben Saul menyebutnya sebagai sebuah kata yang “*ideologically and politically loaded... implies moral, social and value judgement and is slippery and much-abused...*”³⁵ Terorisme adalah istilah yang ‘licin’ dan sering disalahgunakan. Jason Burke menambahkan bahwa banyak cara untuk mendefinisikannya, dan cara itu adalah penuh dengan taktik subyektif dari sang pengguna.³⁶

Singkat kata, definisi terorisme yang berlaku akan sangat ditentukan oleh siapa pihak mainstream yang menggunakannya dan bagaimana implementasinya. Dukungan media yang gencar menyuarakan konsep itu ke publik juga sangat menentukan format dari definisi tersebut. Pasca serangan terror dahsyat di AS tahun 2001 serta aksi counter-terror berikutnya tak ayal menempatkan AS dan koalisinya dalam perang melawan terror sebagai aktor utama dalam penentuan definisi terorisme. Otomatis, pihak yang menjadi sasaran buruan mereka dalam aksi kampanye perang ini menyandang predikat terhina sebagai ‘teroris’. Faktanya, daftar teratas buruan

34 William F. Shugart II, “*An Analytical History of Terrorism: 1945-2000*”, *Public Choice*, vol. 128, 2006, hal. 10

35 Ben Saul, “*Defining ‘Terrorism’ to Protect Human Rights*”, *Sydney Law School Legal Studies Research Paper*, No. 08-125, 2008, hal. 11.

36 Jason Burke, *Al Qaeda*, ch.2, p.22

terroris utama adalah kelompok atau organisasi yang berlatar belakang Muslim dan sering menyuarakan aksi kekerasan mereka atas nama Islam. Media Internasional juga gencar memberitakan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di belahan dunia lain dengan menempatkan keterlibatan kelompok garis keras Muslim sebagai headline. Serangkaian fenomena inilah kemudian yang mencuatkan wacana absurd lainnya dengan tajuk utama “Terrorisme Islam” atau *Islamic Terrorism*.

B. Formulasi Diskursus “Terrorisme Islam”

Sementara bayang-bayang polemik masih menyelimuti pengaplikasian definisinya, terorisme kemudian menjadi semakin kontroversial ketika disandingkan dengan Islam. Wacana Terorisme Islam ibarat kabut elusive jika bukan fatamorgana. Eksistensinya seperti tampak seakan nyata tetapi bentuknya tak teraba. Menyandingkan sebuah kata berkonotasi kejahatan dengan sebuah agama tempat segala sumber kebaikan sangatlah problematis. Tetapi faktanya, sandingan dua kata itu menjadi perbincangan hangat di pentas global. *Islamic Terrorism*, dan pada beberapa literatur memakai istilah *Islamist Terrorism*, menjadi *trending topic* dalam diskursus politik dan akademis di awal dekade abad ini.

Mayoritas pembahasan seputar terorisme saat ini hampir pasti menyitir pembahasan tentang Islam dan atau paling tidak Muslim. Ini sangatlah ironis. Terorisme yang berarti tindakan kekerasan bertujuan politis dengan menciptakan situasi mencekam dilabelkan pada Islam, agama yang secara harfiah berarti kelembutan, ketundukkan, serta mengajak kepada tujuan kedamaian kehidupan dunia dan setelahnya. Ironi ini juga berlanjut ketika kata ‘terorisme Islam’ berulang kali disebut tetapi hanya merujuk kepada sebuah *common sense* dimana tidak ada definisi pasti yang menjelaskannya. Asumsi yang timbul dan menjadi gambaran ketika istilah terorisme Islam digunakan umumnya merujuk pada sebuah konsep

seperti yang didefinisikan oleh Wikipedia sebagai berikut: *“a form of religious terrorism committed by extremists of Islam mostly for the religious beliefs and sometimes on achieving varying political ends again in the name of religion”* (Aksi terorisme berlatar belakang agama yang dilakukan oleh ekstremis Islam dengan alasan membela kepercayaan dan terkadang bertujuan politis yang lagi-lagi mengatasnamakan agama).

Kekerasan dengan motif agama memang bukan barang baru dan bukan eksklusif dilakukan oleh pemeluk suatu agama tertentu. Jejak rekam sejarah mempunyai catatan yang panjang dalam dokumentasi kekerasan satu kelompok terhadap kelompok lain atas dasar keyakinan. Tetapi mengklasifikasikan aksi mana yang tergolong terorisme dan mana yang tidak adalah sebuah persoalan besar karena sangat bermuatan politis dan berimplikasi retorika moral. Tentara Pembebasan Irlandia Utara (IRA) memandang kelompoknya tengah menempuh perjuangan suci agama menentang dominasi kekuasaan Inggris di wilayahnya. Timothy Mc Veigh sedikitpun tidak merasa menyesal telah meruntuhkan gedung FBI dengan ratusan orang tewas didalamnya sebab dia memandang aksinya adalah untuk menghentikan ‘penindasan formal’ pemerintah terhadap kelompok-kelompok keagamaan dimana ia berafiliasi. Sekte Aum Shinrikyo juga merasa telah melakukan ‘ibadah suci’ yang besar ketika mengingatkan ‘kesesatan’ pemerintah Jepang dengan melepaskan gas syaraf pembunuh “Nerin” di sebuah stasiun subway di Tokyo. Bagaimana pun sacral nya tujuan yang melatarbelakangi aksi-aksi mereka, label ‘terroris’ lah yang menghiasi benak audiens ketika nama-nama mereka disebutkan.

Kekuatan mainstream besar yang berpengaruh dalam arah kebijakan dunia serta kampanye intens media dalam mempublikasikannya mempunyai peran dominan dalam menentukan kepada kelompok mana label terorisme ini disematkan. Situasi diskursus geo-politis dan kebijakan internasional pun ikut mempunyai sumbangsih yang sama. William F. Shugart II mencatat bahwa sejak

berakhirnya perang dunia kedua terdapat tiga kategori gelombang besar evolusi aksi kekerasan yang kemudian dilabeli terorisme berdasarkan jenis latar belakang dan tujuannya. Pertama, tak lama setelah berakhirnya PD II aksi-aksi kekerasan yang berimplikasi terror umumnya dilandasi oleh separatisme dan tujuan pembentukan negara baru yang berdaulat. Sifat gerakannya pun terbatas dan *scope* nya domestik. Kedua, berawal sekitar tahun 60-an sampai dengan jatuhnya Tembok Berlin tahun 1989, terorisme mulai mengambil bentuk sebagai gerakan lintas negara beraliran sayap kiri yang diilhami oleh pandangan anti-liberalisme Barat dan anti-Amerikanisme secara lebih spesifik. Konteks Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan AS dengan Blok Timur pimpinan Sovyet begitu mewarnai aksi-aksi kekerasan terror pada periode ini, dimana terorisme dipandang sebagai serangan sporadic Blok Timur dengan menggunakan tangan faksi-faksi ekstrem untuk menyerang kepentingan Blok Barat di berbagai belahan dunia. Fase inilah yang sering dipandang sebagai titik awal dari ‘globalisasi’ terorisme. Ketiga, evolusi terakhir dari gelombang terorisme menjelma dalam bentuk kekerasan yang bermotifkan agama, khususnya Islam. Bentuk terorisme ini adalah puncak evolusi mutakhir dari rangkaian-rangkaian sebelumnya dan telah bertransformasi sedemikian rupa sehingga lebih brutal dan mengerikan.³⁷ Mengapa bentuk gelombang ketiga terorisme ini sering diasosiasikan dengan Islam dan dideskripsikan dengan “begitu menakutkan”?

Deskripsi lebih lanjut dari klasifikasi Shugart II ini menunjukkan bahwa: pertama terorisme sering diartikan secara sederhana sebagai aksi kekerasan yang menciptakan suasana mencekam dan mendapat banyak sorotan khalayak. Kedua, terorisme hampir selalu disematkan kepadah gerakan anti status quo yang menentang roda kekuasaan resmi yang tengah berjalan. Ketiga, trend diskursus politik dunia berperan dalam menentukan di ranah mana isu ter-

37 William F. Shugart II, “*An Analytical History of Terrorism*”. Hal. 27-32

rorisme terpusat. Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan keruntuhan Uni Sovyet seketika mengakhiri fokus utama diskursus politik global seputar konflik antara Barat dan Timur yang telah berlangsung selama hampir tiga dasawarsa. Di tengah kevakuman itu, berita-berita seputar aksi-aksi kekerasan yang melibatkan Muslim mendominasi publikasi media internasional. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Muslim terhadap penindasan penguasa di suatu teritorial yang mendapatkan dukungan simpati moral, dana, bahkan tentara dan senjata dari kelompok Muslim lain dipandang sebagai fenomena konflik kekerasan trans-nasional yang baru. Terlebih ketika eksekusi dari kekerasan politik ini kemudian menyasar obyek vital kepentingan barat dan menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya begitu jauh berlipat. Korban dari aksi kekerasan yang melibatkan kelompok Muslim sepanjang tahun 1990-an telah mencapai tiga kali lipat dari jumlah total korban terorisme pada empat decade sebelumnya.³⁸

Para analis selanjutnya mensinyalir bahwa akar dari fenomena kekerasan politis baru ini adalah terinspirasi oleh kebangkitan dua kelompok Muslim yang sepanjang sejarah selalu bertentangan; Revolusi Iran yang digagas kelompok Syi'ah dan Keberhasilan kaum Mujahidin yang mayoritas Sunni dalam mengusir Sovyet dari Afghanistan. Motif berjuang atas nama agama Islam dengan tujuan sacral selanjutnya oleh kelompok-kelompok Islam dipandang sebagai cara yang lebih efektif dalam melakukan perlawanan revolusi dibanding tujuan politis. Kesimpulan tersebut bisa mengilustrasikan mengapa kemudian diskursus terorisme berkembang dari kekerasan politis menjadi kekerasan yang bermotifkan agama dan selanjutnya mene-

38 Lihat misalnya, Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, hal. 18, 92-93, 123, R. Hardin, *One for all: The logic of group conflict*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), hal. 216, P. R. Pillar, (Washington, DC: Brookings Institution, 2001), hal. 121, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States (2004, pp. 59, 60, 62, 70, 71, 98, 100, 180, and 190). Untuk informasi yang lebih lengkap lihat US Department of State, "*Significant Terrorist Incidents, 1961-2003: A Brief Chronology*", at <http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5902pf.htm>.

mpatkan Islam sebagai fokus pemeran utama dalam diskursus terror dan terrorisme.

Dalam beberapa literature berpengaruh yang akan dibahas pada bagian-bagian berikutnya, konstruksi wacana narasi terrorisme yang melibatkan Muslim bahkan cenderung tampak dilebih-lebihkan. Beberapa istilah seperti *the new terrorism* atau *the essentialist terrorism* bermunculan dengan eufimisme bahasa yang sebetulnya berimplikasi makna jauh lebih menyeramkan. Serangkaian aksi kekerasan yang dipandang sebagai terrorisme dengan motif Islam sering disebut dengan istilah 'terrorisme baru' karena berbeda dari terrorisme konvensional yang hanya bertujuan sebatas politis. Terrorisme Islam berorientasi kehancuran total dengan jatuhnya banyak korban dan kerugian di pihak target dan memandangnya sebagai sebuah keabsahan secara dogmatic. Para Muslim pelakunya pun sering dipandang sebagai *the essentialist terrorist* karena mereka penggila kekerasan yang berpemahaman fanatik-fundamentalis dan gemar membantai orang-orang yang mereka anggap kafir. Oleh karena itu, pendekatan counter-terrorisme terhadapnya juga harus dengan metode baru dan hukum criminal konvensional biasa tak cukup memadai sebagai solusinya.³⁹ Untuk memahami secara utuh mengenai bagaimana wacana terrorisme Islam terbentuk dan karakteristik konstruksinya terpola dapat ditelusuri melalui bahasan berikut.

1. Genealogi Wacana Terrorisme Islam

Pendekatan genealogi wacana beranjak dari fakta bahwa sebuah teks selalu mengacu pada teks-teks lain yang juga bersandar

³⁹ Wacana keabsahan pendekatan counter-terrorism ini mengemuka ketika perbincangan seputar pelanggaran HAM terhadap tahanan-tahanan tersangka Taliban dan al-Qaeda di penjara Guantanamo menjadi fokus pemberitaan media global. Pihak-pihak yang mendukung penahanan tanpa proses pengadilan menggunakan pendekatan *essentialist terrorism* ini sebagai pembenaran.

pada teks-teks lain yang telah ada sebelumnya.⁴⁰ Sehingga, Wacana membentuk sebuah cara pandang melalui sebuah mekanisme yang melibatkan penggunaan sumber daya linguistic dan system tatanan budaya yang ada dalam menafsirkan suatu fenomena sosial tertentu. Penggunaan pendekatan genealogi ini disini diharapkan mampu membantu dalam memahami bagaimana sebuah “pengetahuan” yang terbentuk saat ini diformulasikan melalui proses naturalisasi yang terjadi dalam rentangan waktu, ruang dan praktek diskursif. Banyak sekali aspek detail yang mungkin bisa menjelaskan asal-usul dari konstruksi wacana terrorisme Islam secara terperinci. Tetapi, paling tidak terdapat tiga penjelasan umum yang bisa mendeskripsikan bagaimana konsep terrorisme Islam itu difahami dan digunakan pada bentuknya yang sekarang.

Pertama dan terpenting adalah bahwa narasi wacana ‘terrorisme Islam’ yang berkembang sekarang berakar pada asumsi, teori dan konsep-konsep pengetahuan yang sebelumnya telah mapan dalam scope bidang kajian terrorisme. Walaupun wacana narasi ini begitu berkembang pesat dan menjadi fokus kajian akademis independen yang diakui pasca serangan teroris 11 September, konsep ‘terrorisme Islam, tampaknya telah muncul sejak dua dasa warsa sebelumnya. Embrionya bersumber dari konsep tentang ‘terrorisme agama’ (*religious terrorism*). Konsep yang paling banyak dipakai dan banyak dikutip oleh literature-literatur berpengaruh sesudahnya adalah ‘*religious terrorism*’ yang dikembangkan oleh David Rapoport dalam makalahnya yang berjudul “*Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Tradition*” yang terbit pada *Jurnal American Political Science Review* tahun 1984.⁴¹ Dari karya Rapoport ini kemudian

40 Roxanne Doty, “*Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines*”, *International Studies Quarterly*, 37 (1993), hal. 297–320. Lihat Juga Jennifer Milliken, “*The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods*”, *European Journal of International Relations*, 5:2, (1999), Hal. 225–54.

41 David Rapoport, ‘*Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Tradi-*

lahirlah sejumlah teks-teks inti yang ditulis oleh akademisi lain yang berpengaruh dan membentuk reputasi sebagai sumber rujukan utama dalam kajian 'terrorisme Islam'.⁴² Konsep-konsep, konstruksi narasi serta label-label yang menjadi inti dalam diskursus kajian yang dikembangkan oleh referensi-referensi terakhir ini kemudian mendapatkan otoritas yang kuat dan sangat berpengaruh secara politis. Faktor yang membentuknya adalah jaringan koneksi tripartit yang erat antara para akademisi ahli terorisme ini dengan lingkaran kekuasaan pemegang kebijakan yang juga didukung oleh jurnalis senior di beberapa media internasional berpengaruh.⁴³

Kedua, fokus inti kajian yang menjadi sentral dalam wacana terorisme Islam serta pola narasi dan label-label yang digunakan di dalamnya banyak terderivasi dari tradisi panjang kajian orientalis dalam kajian kawasan Timur Tengah dan studi agama dalam kultur Arab. Literatur-literatur kajian orientalis ini berkembang pesat

tions', *American Political Science Review*, 78: 3 (1984), pp. 658–677

42 Diantara beberapa literature yang banyak dikutip oleh karya-karya lain dalam bidang kajian terorisme dan Islam adalah Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, (New York: Columbia University Press, 1998), kemudian Walter Laqueur, *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*, (New York: Oxford University Press, 1999), Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (Berkeley, CA: University of California Press, 2000), Jessica Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*, (New York: HarperCollins, 2003), dan Magnus Ranstorp, 'Terrorism in the Name of Religion', *Journal of International Affairs*, 50: 1 (1996), pp. 41–62.

43 Indikasi fakta dari koneksi akademisi-birokrat-jurnalis ini adalah bahwa penulis-penulis seperti Bernard Lewis,

Bruce Hoffman, Steven Simon, Jessica Stern, Daniel Benjamin, dan Richard Perle pernah bekerja di badan-badan strategis pemerintah seperti *national Security Council* dan Kementerian Pertahanan AS. Mereka juga saling bertukar informasi dengan wartawan-wartawan senior di CNN, VoA, *The New York Times*, *LA Times*, *Washington Post*, *Newsweek* dan *USA Today* seperti Thomas Friedman, Charles Krauthammer, David Brooks, William Kristol, Martin Peretz, Norman Podhoretz, dan Judith Miller. Lihat L. Ali Khan, *Phenomenology of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2006), hal. 206-209.

mengikuti elevasi peristiwa penuh gejolak di Timur Tengah pada 1970-an dan 1980-an seperti terorisme pembantaian pada olimpiade tahun 1972 di Munich, guncangan minyak dunia pada 1973, Krisis penyanderaan kedutaan AS di Iran yang disertai Revolusi pada 1979, kasus Salman Rushdie serta kasus-kasus terorisme yang melibatkan penculikan dan pembajakan sepanjang tahun 1980-an.⁴⁴ Tren tipe kajian orientalis ini kemudian lebih intens dan lebih mengemuka dengan adanya serangan 9/11 dan kampanye perang melawan terorisme. Salah satu literature yang paling dominan mempengaruhi warna kajian hubungan internasional dengan nuansa cara pandang orientalis adalah karya Samuel Huntington yang bertajuk *The Clash of Civilization?*. Essay yang ditulis tahun 1993 dan judulnya dikutip dari tulisan Bernard Lewis ini menjadi antecedent penting dan banyak direproduksi dalam diskursus wacana terorisme Islam yang beredar dewasa ini.⁴⁵ Selain itu, tokoh-tokoh seperti Bernard Lewis, Noah Feldman, Raphael Patai dan ahli orientalis Timur Tengah lainnya seringkali duduk bersama ahli-ahli lain di bidang terorisme dan menjadi penasehat utama serta staff ahli bagi pemerintah AS dalam perumusan aksi penanggulangan terror. Ini menjadi katalis bagi transmisi sudut pandang orientalis yang kemudian menghiasi wacana terorisme Islam dalam proses kebijakan politik.⁴⁶

44 Lihat misalnya Fred Halliday, *Two Hours that Shook the World – September 11, 2001: Causes & Consequences*, (London: Saqi Books, 2002), hal. 88–131. Untuk gambaran detail lebih lanjut mengenai bagaimana kultur orientalis mewarnai studi Islam lihat Edward Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, (London: Vintage, 1981), revised edition 1997 dan Yahya Sadowsky, 'The New Orientalism and the Democracy Debate', dalam Joel Beinin and Joe Stork (eds), *Political Islam*, (Berkeley, CA: University of California Press, 1996).

45 Samuel Huntington, 'The Clash of Civilizations?', *Foreign Affairs*, 72: 3 (1993), hal. 22–49. Sedangkan karya Bernard Lewis yang dimaksud adalah Bernard Lewis, 'The Roots of Muslim Rage', *Atlantic Monthly*, 266: 3 (1990), hal. 47–60

46 As'ad AbuKhali, 'Book Review: "The Islam Industry" and Scholarship',

Ketiga, wacana terrorisme Islam banyak mengacu pada tradisi panjang stereotip budaya dan representasi berat sebelah media yang sering menggambarkan Islam dan Muslim sebagai ‘musuh’.⁴⁷ Dalam menggambarkan umat Islam, media mainstream biasanya cenderung menggunakan kerangka pemberitaan dengan fokus pada kekerasan, ancaman, ekstremisme, fanatisme dan terrorisme, meskipun terdapat juga beberapa tradisi visual orientalis dimana Muslim digambarkan sebagai eksotis dan misterius.⁴⁸ Bentuk representasi pencitraan budaya seperti ini telah bertahan begitu lama dan tertanam dengan begitu kuat. Alasannya adalah cara pandang itu merefleksikan sosio-kultur Barat yang ketakutan, khawatir sehingga menstereotipkan pihak lain yang oriental dimana ini telah berlangsung sejak masa imperium. Banyak juga yang berpendapat bahwa cara pandang dikhotomis orientalis *us* dan *they* ini memang sengaja dilestarikan sebagai bentuk imperialisme gaya baru.⁴⁹

Disamping tiga tradisi diskursif primer di atas, khususnya pasca peristiwa 9/11, wacana ‘terrorisme Islam’ juga mewarisi konsep dan istilah-istilah yang telah digunakan pada narasi-narasi wa-

Middle East Journal, 58: 1 (2004), hal. 130–8. Lihat juga, Edward Said, *Covering Islam*, hal. 150

47 Banyak sekali karya yang mengulas mengenai peran media khususnya di Barat yang merepresentasikan pandangan stereotype terhadap Islam. Beberapa diantaranya seperti Elizabeth Poole and John Richardson, *Muslims and the News Media*, (London: I.B. Tauris, 2006); Kai Hafez (ed.), *Islam and the West in the Mass Media: Fragmented Images in a Globalizing World*, (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2000); John Richardson, *(Mis)Representing Islam: The Racism and Rhetoric of British Broadsheet Newspapers*, (Amsterdam: John Benjamins, 2004); dan Jack Sheehan, *Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People*, (Northampton, MA: Interlink Publishing Group, 2004)

48 Elizabeth Hurd, ‘Appropriating Islam: The Islamic Other in the Consolidation of Western Modernity’, *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 12: 1 (2003), Hal. 25–41.

49 Lihat misalnya tulisan-tulisan dalam buku K. El Fadl (ed.), *Shattered Illusions: Analyzing the War on Terrorism*, (Bristol: Amal Press, 2002)

cana budaya politik global sebelumnya. Idiom-idiom seperti ‘good war’ misalnya adalah wacana yang sering digunakan pihak sekutu Barat pada masa perang melawan fascism di Perang Dunia II dan perang Dingin. Begitu juga dengan istilah-istilah lain seperti ‘civilized vs. barbaric war’, ‘rogue states’, ‘enemy within’, senjata pemusnah massal, perang abadi antara kebaikan dan kejahatan adalah serangkaian narasi kultural lama yang kini mentadi paparan sentral menghiasi diskursus dari apa yang disebut dengan terrorisme Islam.⁵⁰

2. Elemen-elemen Inti Narasi Wacana ‘Terorisme Islam’

Narasi wacana terrorisme Islam dibangun pada sebuah pondasi yang berisikan konsep-konsep utama berupa asumsi-asumsi dan pelabelan yang terbentuk dari serangkaian pengistilahan. Mayoritas diskursus terrorisme Islam menyitir istilah-istilah utama seperti ‘Dunia Islam’, ‘Barat’, ‘kebangkitan Islam’, ‘Islam politik’, ‘Islamisme’, ‘ekstrimisme’, ‘radikalisme’, ‘fundamentalisme’, ‘terrorisme agama’, ‘Jihad’, ‘Wahhabi’, ‘Salafi’, ‘militan’, ‘moderat’, ‘gerakan Jihad global’, ‘al- Qaeda’, dan tentu saja, ‘terrorisme Islam’. Namun sayangnya, istilah-istilah di atas dalam penggunaan tekstualnya sering kali merujuk kepada maksud yang kabur. Pendefinisianya sering kali menimbulkan salah tafsir dan bahkan dipenuhi oleh bias stereotip cultural.

Disamping itu, rangkaian label dan istilah tersebut di atas umumnya disusun sedemikian rupa dan kemudian disajikan dalam paparan oposisi biner yang dramatis. Istilah ‘Dunia Islam’ misalnya dinarasikan sebagai oposisi cultural dari ‘Barat’. Begitu juga dengan konsep-konsep lain seperti ekstremis yang berseberangan dengan

50 Bahasan mendalam seputar isu historiografi narasi cultural dalam kaitannya dengan kampanye *War on Terror* pimpinan AS dapat ditemukan dalam Richard Jackson, *Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counterterrorism*, (Manchester: Manchester University Press, 2005). Lihat juga Stuart Croft, *Culture, Crisis and America’s War on Terror*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

moderat, demokratis dibandingkan totaliter, agama dibandingkan sekuler, atau narasi masyarakat beradab versus biadab. Polarisasi ekstrem dalam narasi wacana tampaknya sengaja difungsikan untuk membangun sketsa 'terorisme Islam' dan 'ekstrimis, sebagai entitas nyata yang hidup dalam keseluruhan cerita dan berdiri berseberangan dengan entitas lain seperti 'masyarakat damai', 'negara demokratis' atau 'Muslim moderat' misalnya. Yang tak kalah penting, konstruksi sketsa dalam wacana ini juga seringkali menegaskan identitas lain yang sebenarnya juga begitu menonjol pada karakter-karakter actor sentral narasi yang menjadi sorotan. Penerapan label seperti 'teroris', 'fundamentalis' dan 'ekstrimis' kepada kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah misalnya, dengan serta merta mengaburkan keberadaan fakta bahwa mereka pada dasarnya berperan sebagai partai politik, penggiat kesejahteraan sosial, memberikan jasa perlindungan, badan bantuan amal, lembaga pendidikan, pasukan gerilya dan sebagainya. Dalam narasi terorisme Islam kelompok-kelompok itu sering disimplifikasi sebagai musuh masyarakat Barat.

Wacana ini juga seringkali menyertakan serangkaian kualifikasi hati-hati yang dirancang untuk membatasi scope penggunaan label, narasi dan asumsi yang justru dalam konteks politik atau budaya lain akan dianggap merendahkan. Oleh karenanya, akan sangat lazim ditemukan dalam teks studi-studi 'terorisme Islam' yang mengawali bahasannya dengan pernyataan seperti: "Mayoritas Muslim sebenarnya mengamalkan cara beragama yang damai dan inklusif...",⁵¹ "[hanya saja]. Terroris Islam justru terinspirasi oleh ajaran yang menyimpang dari Islam dan mensakralkan kampanye kekerasan mereka melalui pilihan potongan ayat dari al-Qur'an".⁵²

51 The 9/11 Commission, *Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, (New York: W. W. Norton & Co., 2004), hal. 54

52 Ray Takeyh and Nikolas Gvosdev, *Radical Islam: The Death of an Ideal-*

Tetapi kemudian, setelah kalimat pernyataan itu hampir keseluruhan ekspresi dari wacananya langsung mendiskreditkan Islam dan aspek-aspek keagamaan lain yang terkait di dalamnya. Meskipun teks-teks seputar wacana terorisme Islam begitu luas menyebar dan banyak ditemukan tetapi tetap saja hampir keseluruhan wacana dipenuhi dengan materi-materi asumsi bias (*prejudice*) terhadap Islam.

C. Karakteristik Narasi Diskursus Terorisme Islam

Setiap diskursus/wacana tidaklah pernah benar-benar seragam, koheren atau konsisten. Masing-masing memiliki batasan-batasan yang rapuh (*debatable*) dan terdapat banyak pengecualian, inkonsistensi dan kontradiksi antara satu teks dengan teks lain yang terlibat dalam wacana tersebut. 'Pakar terorisme Islam' umumnya memaparkan wacana mereka dalam ungkapan-ungkapan yang berbentuk argumentasi baik berupa dukungan maupun penentangan. Mereka berkontribusi dengan latar belakang metodologi yang berbeda dalam mendeskripsikan karakteristik utama dari narasi wacana yang mereka geluti. Dalam beberapa kasus, beberapa di antara mereka bahkan tampak tidak begitu mementingkan batasan-batasan karakter narasi yang sebenarnya tengah mereka bangun ketika memfokuskan diri kepada argument pembelaan atau penentangan. Tetapi jika karya-karya mereka disatukan dalam satu rumpun wacana maka akan menghasilkan sebuah konstruksi narasi dengan beberapa spesifikasi yang khas dan berfungsi sebagai konsep yang difahami bersama dalam konteks budaya dan politik. Melalui kronologi seperti itu lah karakteristik utama dari narasi 'terorisme Islam' terbentuk, dan ilustrasi dari asumsi-asumsi, labelisasi serta narasi sentral nya dapat dilihat jelas dalam beberapa bagian.

Bagian poros sentral terpenting dari keseluruhan diskursus terorisme Islam bersumber dari sebuah asumsi utama bahwa

kekerasan yang menjadi faktor fundamental penyebab terorisme adalah sangat inherent, melekat pada ajaran Islam. Alasan dari asumsi ini adalah bahwa tidak seperti Kristen yang mempunyai garis tegas pembeda antara 'gereja' (agama, *Church*) dan negara (politik, *State*), Islam tidak mengenal pembedaan antara sacral dan profane, antara agama dan politik, dan oleh karenanya masih melanggengkan ajaran perang atas nama agama (*religious war*).⁵³ Dalam mayoritas teks, Islam selalu dideskripsikan sebagai agama yang mengatur sekaligus kehidupan pribadi dan kehidupan social sehingga begitu berdampak dalam pembentukan karakteristik kehidupan politik penganutnya. Konsep seperti ini seringkali digunakan sebagai pilar utama argumentasi dominannya kontribusi ajaran Islam dalam hal kekerasan agama. Walter Laquer -salah seorang tokoh paling dihormati dalam kajian terorisme misalnya- menyebutkan bahwa meskipun tidak ada istilah monopoli Muslim atau Arab dalam bidang fanatisme agama, frekuensi aksi terorisme yang melibatkan Muslim dan Arab masih begitu mencolok, dan sementara diskusi seputar terorisme yang berlatar belakang agama tidak mungkin dibatasi hanya dengan menyoroiti Islam radikal. "Tak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya negara-negara Muslim menempati posisi teratas dalam sorotan", ungkapnya.⁵⁴ Dengan nada yang sama, Barak Mendelsohn menyatakan bahwa para ekstremis yang ingin memaksakan pemberlakuan hukum agama sebagai dasar negara memang eksis di semua agama, tetapi terorisme agama hanya tampak begitu nyata di kalangan masyarakat Muslim.⁵⁵

Ekspresi terbuka lain dengan tipe narasi seperti ini begitu banyak bertebaran. Selain pernyataan kasar Samuel Hunting-

53 Lihat misalnya Barak Mendelsohn, "*Sovereignty Under Attack: The International Society Meets the Al Qaeda Network*", *Review of International Studies*, 31 (2005), hal. 55.

54 Walter Laqueur, *The New Terrorism*, hal. 129

55 Barak Mendelsohn, "*Sovereignty Under Attack...*", hal. 57

ton yang menyebutkan bahwa 'Islam memiliki jejak-jejak berdarah' (*Islam has a bloody borders*),⁵⁶ banyak sekali paparan lainnya yang mengaitkan hubungan alami inhere Islam dengan politik kekerasan atas dasar 'fakta' bahwa Islam tidak memisahkan bidang agama dan politik.⁵⁷ Salah satu publikasi *think-tank* kontra-terorisme terkemuka misalnya memandang bahwa dalam dunia Islam aksi kekerasan politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim tidak dapat dipisahkan dari dasar-dasar keyakinan yang berasal dari agama m. Aksi-aksi terorisme yang terjadi di belahan dunia Arab dan Muslim adalah bawaan alami dari Islam itu sendiri.⁵⁸

Karakteristik utama lainnya yang berkaitan langsung dengan narasi di atas adalah pandangan aksi-aksi terorisme selalu berkaitan dengan atau muncul dan terinspirasi oleh bentuk pengamalan atau penafsiran ajaran Islam yang ekstrim dan fundamentalis. Beberapa teks kajian terorisme bahkan selalu membangun keterkaitan aksiomatis antara terorisme dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis, Salafi atau Wahabi. Magnus Ranstorp dalam tulisannya menggeneralisir bahwa setiap gerakan Islamist mesti mempunyai *underbouw* yang beraktivitas dalam dunia teror tanpa merinci kualifikasi-kualifikasi tertentu dalam kategorisasi yang dilakukannya.⁵⁹ Reuven Paz dari International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT) banyak menulis tentang 'kultur ter-

56 Samuel Huntington, "A Clash of Civilizations?", hal. 35. Lihat Juga Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion", hal. 43.

57 Habib Malik, "Political Islam and the Roots of Violence", in Elliott Abrams (ed.), *The Influence of Faith: Religious Groups and U.S. Foreign Policy*, (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001)

58 Reuven Paz, "Is There an 'Islamic Terrorism'?", *International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT) Publication*, Herzilya, Israel, 7 September 1998, atht tp://www.ict.org.il/articles/articlelet.cfm?articled=46, diakses pada tanggal 05 Desember 2012,

59 Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion", hal. 58

rorisme dalam Islam' serta ideologi, doktrin dan aktivitas kekerasan dalam Islam. Paz mensinyalir bahwa aksi-aksi kekerasan secara kultural begitu tertanam dengan kuat dalam Islamisme.⁶⁰ Demikian pula halnya dengan Marc Sageman yang juga salah satu pakar terpendang dalam kajian terorisme. Dengan mengambil fokus kajian pada gerakan global Jihad Salafi dan 'kelompok teroris' dari golongan Salafi yang terafiliasi dengan al- Qaeda, ia menyimpulkan bahwa ideologi Salafiah yang menjadi inspirasi dari penentuan bentuk misi, penetapan tujuan, dan pembimbing taktik dari aksi-aksi terror yang mereka lakukan.⁶¹ Lebih jauh lagi menurut Sageman, 'Al-Qaeda tidak sebatas organisasi teroris yang terlibat hanya dalam bidang politik tetapi juga merupakan gerakan revivalis sosial keagamaan.⁶² Pengkoneksian antara konsep terorisme dengan ekstremisme yang tertuang dalam formasi diskursif di atas selanjutnya membentuk sebuah bangunan 'pengetahuan' yang bergaung di ranah publik bahwa Islam secara alami (*by nature*) adalah berisi kekerasan dan sangat teroristik.

Selain cara pelabelan eksplisit seperti penjelasan di atas, ada pula karakterisasi narasi pengkoneksian antara Islam dengan kekerasan dan terorisme yang dikemas secara lebih implicit. Karakterisasi ini tersirat dalam setiap paparan yang menjabarkan akar-akar terorisme dalam Islam. Narasi-narasi itu umumnya mengupas rinci beberapa konsep inti yang berasal dari ajaran Islam seperti Jihad, Syari'ah, Syahadah, Dar al-Islam, Dar al-Harb, Jahiliyyah, Ummah, Takfir, dan sebagainya, serta bagaimana para ulama Mus-

60 Reuven Paz, "Radical Islamist Terrorism: Points for Pondering", *International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT) Publication*, Herzilya, Israel, 20 June 2001, at <http://www.ict.org.il/articles/articleDet.cfm?articleid=367>, diakses tanggal 05 Desember 2012

61 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), hal. 1.

62 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, hal. 126

lim seperti Sayyid Qutb atau Muhammad Ibn Wahhab menafsirkannya.⁶³ Dengan narasi tersebut ditariklah sebuah asumsi umum bahwa kelompok-kelompok seperti al-Qaeda atau gerakan radikal Islam lainnya pada dasarnya penganut Islam yang diakui keabsahannya secara teologis di kalangan Muslim.⁶⁴ Dan oleh karenanya, ideologi serta doktrin yang menginspirasi aksi terrorisme mereka adalah merupakan bagian dari mainstream ajaran Islam secara keseluruhan. Karakteristik wacana seperti ini, disengaja atau tidak, menimbulkan sebuah penguatan persepsi bahwa sesungguhnya kekerasan atau terrorisme itu memang benar-benar muncul dari atau bahkan berakar dari ajaran dan amalan Islam. Di ujung kesimpulannya kemudian muncullah sebuah impresi bahwa memang Islam lah yang menjadi inti dari ancaman terrorisme, atau dalam bahasa salah seorang pengamat dari *Foreign Policy Centre*: “*The Jihadist can be found in almost any place that Muslim communities can be found*”.⁶⁵

Karakteristik narasi inti lain dari wacana ini adalah bahwa aksi ‘terrorisme Islam’ lebih banyak didorong oleh motif-motif agama atau alasan ‘sakral’ dibanding pertimbangan motivasi politik atau ideologis. Tujuan-tujuan yang banyak dikemukakan oleh para ‘teroris Islam’ umumnya terpusat di seputar memerangi dan menghancurkan Israel dan dominasi Barat, meruntuhkan kekuasaan rezim kafir di negeri-negeri Muslim, mengembalikan umat Islam kepada bentuk ajaran Islam yang yang benar dan murni dan memba-

63 Lihat misalnya Daniel Benjamin & Steven Simon, *The Age of Sacred Terror*, (New York: Random House, 2002); Paul Berman, *Terror and Liberalism*, (New York: W.W. Norton, 2003); Natana DeLong-Bas, *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad*, (Oxford: Oxford University Press, 2004); dan Raphael Israeli, “*A Manual of Islamic Fundamentalist Terrorism*”, *Terrorism and Political Violence*, 14: 4 (2002), hal. 23–40.

64 Quintan Wiktorowicz, “*A Genealogy of Radical Islam*”, *Studies in Conflict & Terrorism*, 28 (2005), hal. 75

65 Greg Austin, *The Next Attack: ‘Know Your Enemy and Know Yourself’*, (London: Foreign Policy Centre, 2005), hal. i.

ngun kembali sebuah tatanan kekhalifahan Islam. Shaul Mishal dan Maoz Rosenthal, misalnya, berpendapat bahwa tujuan jangka panjang dari para ekstremis Islam merubah tatanan sosial dan politik di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dengan sebuah negara Islam yang diatur oleh hukum Islam.⁶⁶ David Cook bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa kelompok radikal Islam mempunyai tujuan besar utama berupa menyatukan semua Muslim dalam sebuah negara Islam dan selanjutnya diarahkan untuk mendominasi dunia.⁶⁷

Karena tujuannya sangat dipengaruhi oleh motivasi sakral, terorisme Islam dalam formulasi diskursif selanjutnya cenderung diidentifikasi sebagai gerakan bersifat anti-modern, anti-sekuler dan anti-demokrasi. Ranstorp menekankan bahwa kekhawatiran terhadap infiltrasi sekularisasi dari pihak-pihak asing adalah faktor katalis bagi timbulnya aksi-aksi terorisme agama. Kelompok-kelompok radikal ini, lanjut Ranstorp, digerakkan oleh latar belakang motivasi *'xenophobia'* terhadap segala sesuatu yang datang dari pihak asing atau sekuler serta rasa penolakan yang kuat terhadap budaya barat.⁶⁸ Demikian pula halnya dengan Benjamin Barber. Ia berpendapat bahwa para *'tentara'* Jihad begitu membenci modernitas, budaya sekuler, ilmiah, rasional dan komersial yang menurut mereka berasal dari kultur renaissans Eropa.⁶⁹ Bahkan ada pula teks dalam narasi wacana ini yang menggambarkannya dengan ekspresi yang

66 Shaul Mishal and Maoz Rosenthal, *"Al Qaeda as a Dune Organization: Towards a Typology of Islamic Terrorist Organizations"*, *Studies in Conflict & Terrorism*, 28 (2005), hal. 277.

67 David Cook, *"The Recovery of Radical Islam in the Wake of the Defeat of the Taliban"*, *Terrorism and Political Violence*, 15: 1 (2003), hal. 52

68 Magnus Ranstorp, *"Terrorism in the Name of Religion"*, hal. 49

69 Benjamin Barber, *"Democracy and Terror in the Era of Jihad vs. McWorld"*, dalam Ken Booth and Tim Dunne (eds), *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hal. 247

sangat kasar. Ayla Schbley dalam sebuah jurnal terkemuka bertajuk *Studies in Conflict and Terrorism* menyatakan bahwa penolakan umum terhadap demokratisasi dan modernitas di seantero dunia Islam kecenderungan Muslim untuk terus terlibat dalam kekerasan adalah karena bagi mereka konsep negara-bangsa (*nation-states*) dan demokrasi tak ubahnya ibarat daging babi dan kulitnya (*pork rinds*).⁷⁰

Lebih dari itu, 'terorisme Islam' juga sering dinarasikan sebagai aksi yang dilandasi oleh rasa kebencian yang mendalam terhadap Amerika dan Barat. Rasa kebencian ini timbul akibat kemarahan dan rasa impotensi dalam perjalanan sejarah dimana umat Muslim yang pernah begitu menguasai dunia dalam satu rentangan masa kemudian mengalami kegagalan dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi, kekalahan bertubi-tubi dalam konflik kekuatan ketika berhadapan dengan Israel, dan ketidakmampuan mereka dalam menekan lajunya proses globalisasi dan sekularisasi. Takeyh dan Gvosdev mengindikasikan bahwa Islamisme radikal adalah sebuah ideology penebar kebencian dan terror yang bertujuan untuk merusak tatanan yang ada.⁷¹ Sedangkan Bernard Lewis berpendapat bahwa fundamentalisme Islam telah mengilhami arah tujuan dan format pergerakan dari kondisi keputusasaan, kebencian, dan kemarahan kaum Muslim di hadapan kekuatan yang telah mendevaluasi kebanggaan dan nilai-nilai tradisional mereka.⁷² Narasi ini kemudian bermuara pada sebuah asumsi yang menyimpulkan bahwa diantara tujuan utama dari misi Jihad adalah untuk mengembalikan kebanggaan dan kejayaan umat Islam di hadapan tatanan dunia baru (*New*

70 Ayla Schbley, "Religious Terrorism, the Media, and International Islamization Terrorism: Justifying the Unjustifiable", *Studies in Conflict & Terrorism*, 27 (2004), hal. 208

71 Takeyh and Gvosdev, "Radical Islam", hal. 93

72 Bernard Lewis, "The roots of Muslim Rage".

World Order) yang disponsori Barat.⁷³

Salah satu karakter narasi yang mungkin menjadi bagian terpenting dari wacana ini adalah asumsi bahwa ‘terorisme Islam’ merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan Barat. Dalam berbagai teks mudah sekali ditemukan ekspresi maupun impresi yang jelas ‘terorisme Islam’ selalu menjadi salah satu ancaman paling signifikan terhadap keamanan nasional (*national security*) negara-negara Barat pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya.⁷⁴ Dengan menyitir beberapa karakteristik utama narasi ‘terorisme Islam’, Sageman menjelaskan bentuk dari ancaman tersebut sebagai berikut:

A new type of terrorism threatens the world, driven by networks of fanatics determined to inflict maximum civilian and economic damages on distant targets in pursuit of their extremist goals. Armed with modern technology, they are capable of devastating destruction worldwide. They target the West, but their operations mercilessly slaughter thousands of people . . .

⁷⁵

Bentuk asumsi yang bersumber dari narasi ini tampaknya menjadi pegang dan banyak mendasari kebijakan yang dikeluarkan oleh jajaran pemerintahan di AS. Mereka cenderung percaya bahwa ‘terorisme Islam’ memiliki potensi sangat besar yang mengancam keberlangsungan tatanan budaya demokrasi Barat dan keseluruhan pandangan hidupnya. Mereka juga tampak begitu yakin bahwa ‘terorisme Islam’ mendapat dukungan yang luas dari rezim-rezim ‘nakal’ berbahaya serta simpati dari jutaan Muslim baik yang berdomisili di negara Muslim maupun di Barat. Daniel Pipes misaln-

73 Jessica Stern, “*Terror in the Name of God*”, hal. 264

74 Saul Mishal and Maoz Rosenthal, “*Al Qaeda as a Dune Organization*”, hal. 276

75 Sageman, *Understanding Terror Networks*, hal. Vii.

ya mensinyalir bahwa musuh sebenarnya dari Barat adalah militant Muslim dengan komposisi mencapai 10-15 persen dari keseluruhan populasi umat Islam di dunia yang berjumlah lebih dari 1 milyar penganut. Ini berarti bahwa AS mempunyai potensi ancaman serangan dari sekitar 100-150 juta militant Muslim yang menjadi musuhnya.⁴⁸ Pipes selanjutnya berasumsi bahwa meskipun belum ada survey jajak pendapat yang dilakukan di tengah populasi masyarakat Muslim ia yakin setidaknya setengah dari keseluruhannya atau sekitar 500 juta umat Islam akan lebih bersimpati kepada Osama bin Laden dan Taliban daripada kepada pemerintah AS.⁷⁶

Narasi wacana mengenai ancaman 'terorisme Islam' juga terkait erat dengan diskursus seputar 'mitologi' jaringan terrorist al- Qaeda dan kelompok yang disebut dengan 'Afghan Jihad'. umumnya, narasi ini menegaskan eksistensi dari ribuan relawan Jihad militant yang telah mengalami pelatihan sekaligus pertempuran pada masa perang melawan Uni Sovyet di Afghanistan dan kini mereka terhubung dalam sebuah network global penebar terror.⁷⁷ Jessica Stern mensinyalir bahwa pada saat tragedi 11 September 2001 setidaknya terdapat 70.000 sampai 110.000 radikal Muslim radikal yang telah lulus dari kamp pelatihan al-Qaeda.⁷⁸ Analisis lain menghitung kemungkinan jumlah mereka ada di antara 35.000 dan 50.000 di seluruh dunia, semuanya adalah pelaksana operasi (*operatives*), beberapa bergerak secara independen, kebanyakan dalam posisi *standby*, siaga penuh dan siap berkomitmen untuk melancarkan perang suci melawan Barat.⁷⁹ Mereka juga mendapatkan

76 Daniel Pipes, "Who is the Enemy?", *Commentary*, 113: 1 (January 2002), hal. 23-24, 26, artikel ini dapat juga ditemukan di <http://www.danielpipes.org/article/103>, diakses pada tanggal 05 Desember 2012

77 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, hal. 25-59.

78 Jessica Stern, *Terror in the Name of God*, hal. 260.

79 Gus Martin, *Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues*, (London: Sage, 2003), hal. 194, 198.

dukungan dari enam juta lebih Muslim radikal lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia.⁸⁰ Gambaran yang terbentuk dari model konstruksi diskursif ini adalah sebuah konsep bahwa Islam dan 'dunia Muslim' merupakan ancaman langsung yang berbahaya bagi eksistensi Barat.

Narasi potensi ancaman 'terorisme Islam' di atas banyak sekali meminjam konsep, perspektif serta pelabelan yang berasal dari bidang kajian terorisme umum sebelumnya, terutama ide-ide yang mengetengahkan bahwa dunia sedang menghadapi sebuah jenis 'terorisme baru'.⁸¹ Teori-teori '*The New Terrorism*' menyebutkan beberapa spesifikasi khusus dari terorisme jenis baru ini yang diidentikan dengan aksi-aksi kekerasan yang marak di dunia Islam. Karakteristik yang sering dikemukakan di antaranya seperti dominasi latar belakang motivasi kebencian, fanatisme dan ekstrimisme di atas tujuan bermotif ideologi politik; terorisme jenis baru terinspirasi oleh ajaran agama dan bertekad untuk menimbulkan korban massal di kalangan warga sipil; pelakunya siap mengorbankan diri mereka dalam sebuah aksi serangan atau pembunuhan, serta mereka juga sangat siap untuk menggunakan senjata pemusnah massal. Akhirnya, gambaran yang muncul adalah dunia tengah menghadapi bentuk terorisme yang lebih kejam dari yang pernah terjadi sebelumnya. Ranstorp menyatakan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis agama relatif tidak mengenal batas perike-manusiaan dalam tingkat mematakannya maupun level kekerasan

80 Rohan Gunaratna, *Inside Al Qaeda*, (New York: Columbia University Press, 2002), hal. 8, 95.

81 Beberapa literature yang mencuatkan teori baru "*The New Terrorism*" ini diantaranya adalah Ian Lesser, *et al.*, *Countering the New Terrorism*, (Santa Monica, CA: Rand Corporation Publications, 1999); Charles Kegley, Jr. (ed.), *The New Global Terrorism: Characteristics, Causes, Controls*, (New Jersey: Prentice Hall, 2003); dan Russell Howard and Reid Slayer (eds), *Terrorism and Counterterrorism: Understanding the New Security Environment*, (Guildford: McGraw-Hill, 2003); disamping tentunya karya Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, dan Walter Laquer, *The New Terrorism*.

yang digunakannya, karena mereka tidak mengenal kendala moral dalam menggunakan kekerasan.⁸² Stern juga berpendapat bahwa kelompok teroris bermotlebih keras dan lebih berbahaya dari para teroris sekuler, dan kemungkinan mereka untuk menggunakan senjata pemusnah massal jauh lebih terbuka.⁸³

Bentuk narasi penting yang terkonstruksi berikutnya adalah bahwa karena ‘terorisme Islam’ begitu penuh dengan kefanatikan agama, irrasional dan mematikan maka tidak ada alasan untuk membuka ruang negosiasi, kompromi apalagi perdamaian. Satu-satunya cara untuk menghadapi fenomena ‘terrorisme Islam’ adalah dengan metode pemberantasan, pemusnahan yang diperkuat dengan pencegahan serta tindakan kontra-terorisme tegas lainnya. Salah satu ekspresi khas yang mewakili narasi ini adalah yang diungkapkan oleh Daniel Byman: “cakupan isu yang begitu luas dari agenda kelompok teroris seperti al-Qaeda yang berusaha menebarkan kebencian dan membangun propaganda Jihad sebagai satu-satunya jalan keluar, maka berdamai dengan mereka adalah sulit secara teori dan tak mungkin secara praktek (*difficult in theory and impossible in practice*)”.⁸⁴ Dengan pola serupa, Barber menegaskan bahwa tujuan para kelompok teroris Islam itu sama sekali tak dapat dirasionalisasi apalagi dinegosiasikan. Menurutnya, para teroris itu sama sekali tidak memberikan tawaran apa pun dan oleh karenanya tak memberikan pilihan lain selain dilawan dan diberantas sampai ke akar-akarnya.⁸⁵ Ekspresi bahasa yang sering digunakan dalam wacana ini di tataran politis tercermin dalam statement Tony Blair. Ia menyatakan bahwa “anda hanya perlu memperhatikan tuntutan-

82 Magnus Ranstorp, “*Terrorism in the Name of Religion*”, hal. 54.

83 Jessica Stern, *Terror in the Name of God*, hal. xxii

84 Daniel Byman, “*Al-Qaeda as an Adversary: Do We Understand Our Enemy?*”, *World Politics*, 56 (2003), hal. 147

85 Benjamin Barber, “*Democracy and Terror*”, hal. 246

an-tuntutan al-Qaeda untuk memahami bahwa sesungguhnya anda tak akan pernah dapat berkompromi dengan mereka. Pilihan yang ada hanyalah anda akan dikalahkan mereka atau bergerak mengalahkan mereka”.⁸⁶

Unsur lain dari narasi ‘*The New Terrorism*’ yang dipakai dalam mengkonstruksi wacana ‘terrorisme Islam’ adalah deskripsi bahwa berbeda dengan kelompok teroris tradisional yang mempunyai hirarki terorganisir, kelompok ‘teroris Islam’ mempunyai struktur yang terdesentralisasi dengan jaringan yang fleksibel. Para analis dari RAND Corporation⁸⁷ berpendapat bahwa aksi-aksi terorisme jenis baru telah berkembang ke arah bentuk perang yang terpecah (*netwar*). Organisasi-organisasi fundamentalis Islam seperti Hamas dan jaringan di bawah kepemimpinan Osama bin Laden terdiri dari banyak sub-kelompok cair yang saling berhubungan. Mereka membentuk sel-sel semi- independen yang tidak memiliki hirarki komando tunggal.⁸⁸ Chatham House⁸⁹ juga merilis sebuah laporan yang menggambarkan al-Qaeda sebagai ‘*network of networks*’ dengan afiliasi keanggotaan yang tersebar di setidaknya 60 negara.⁹⁰ Jaringan jihad ini juga memanfaatkan internet dan berbagai teknologi modern lainnya sebagai media dalam disseminasi pesan, indoktrina-

86 Tony Blair, “*PM’s Press Conference*”, 5 August 2005, at <http://www.number10.gov.uk/output/Page8041.asp>, diakses tanggal 05 Desember 2012

87 RAND Corporation adalah sebuah lembaga penelitian kontra-terorisme di bawah struktur Angkatan Udara Amerika Serikat.

88 John Arquilla, David Ronfeldt and Michele Zanini, “*Networks, Netwar, and Information-Age Terrorism*”, dalam Ian Lesser *et al.*, *Countering the New Terrorism*, hal. 56

89 Chatham House merupakan lembaga penelitian kontra-terorisme yang dibentuk oleh dan berafiliasi sebagai penasihat bagi pemerintahan Inggris.

90 Frank Gregory and Paul Wilkinson, “*Riding Pillion for Tackling Terrorism is a High-Risk Policy*”, *Security, Terrorism and the UK*, Chatham House ISP/NSC Briefing Paper 05/01, July 2005, hal. 2.

si individu, rekrutmen anggota baru, koordina kegiatan, berbagi informasi operasional, serta penggalangan dana dan dukungan moral. Gerakan mereka bisa dikatakan sebagai *'techno – terorisme'* karena memanfaatkan komunikasi satelit, email, dan World Wide Web dalam aksinya.⁹¹

Narasi ini melihat fakta tersebut sebagai sebuah ironi. Kelompok-kelompok *'terorisme Islam'* justru menggunakan teknologi modern dalam rangka mengejar tujuan yang mundur, kembali ke cara hidup di abad pertengahan hidup. Barber misalnya menyatakan bahwa Osama Bin Laden tanpa media modern tak ubahnya ibarat gurun tikus yang tidak akan pernah dikenal. Menurutnya, terorisme tanpa ketergantungan pada kartu kredit, sistem keuangan global, teknologi modern dan internet dampaknya hanya akan seperti melempar batu ke kepala orang tua (*sheikh*) di jalan.⁹² Pada ujung kesimpulannya, tujuan dari konstruksi narasi ini tampaknya adalah untuk memperkuat impresi bahwa betapa luas penyebaran serta bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kelompok-kelompok teroris ini adalah, betapa sulitnya perlawanan menghadapi mereka, dan betapa uma cara pemusnahan dan pemberantasan lah satu-satunya respon yang pantas dalam menghadapi mereka.

Karakteristik umum dari *'terorisme Islam'* yang berkaitan dengan narasi di atas adalah bahwa mereka mengeksploitasi lembaga-lembaga amal serta LSM-LSM Muslim lainnya untuk menggalang dana dan mengalihkan penggunaannya untuk mendukung aksi-aksi terorisme. Byman, misalnya, berpendapat bahwa para *'teroris Islam'* itu terkait dengan jaringan yang lebih luas yang meliputi lembaga-lembaga amal pemberi bantuan di Chechnya, penyelenggara pendidikan Islam di Asia Tenggara, dan penggalang dana di Eropa. Koneksi jaringan dari LSM mereka sangatlah penting. LSM

91 Frank Gregory and Paul Wilkinson, *"Riding Pillion for Tackling Terrorism is a High-Risk Policy"*, hal. 65

92 Benjamin Barber, *"Democracy and Terror"*, hal. 249.

ini memang menjadi cara mereka untuk mengumpulkan dana, tetapi itu juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja bagi aktivis teroris, penyaluran dana, dan penyedia dokumen-dokumen (pendukung aksi) yang diperlukan.⁹³ Paul Pillar juga mengidentifikasi beberapa LSM Muslim yang terlibat baik secara sengaja atau tidak dalam aktivitas terorisme.⁹⁴ Sementara Foreign Policy Centre menyebutkan bahwa banyak LSM penggalang dana Muslim ternyata adalah organisasi teroris yang luput dari deteksi pihak keamanan.⁹⁵ Seperti sebelumnya, jenis narasi wacana ini berfungsi untuk memperkuat konsep pentingnya mengidentifikasi dan mengawasi organisasi-organisasi Muslim yang banyak tersebar. Meskipun mereka tampak normal dalam kehidupan sehari-hari, bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh organisasi-organisasi itu harus selalu diwaspadai.

Karakteristik narasi lainnya adalah bahwa ‘terorisme Islam’ harus sudah diperangi bahkan pada tataran konsep dan idenya. Muslim moderat harus menjadi figure terdepan dalam memerangi tumbuhnya faham-faham ekstrem dalam lingkungan mereka. Zeyno Baran, misalnya, berpendapat bahwa tugas sentral dalam kontra-terorisme adalah menemukan formulasi untuk membantu moderat Muslim memenangkan perang sipil teologis dan ideologis saat ini sedang berlangsung melawan pihak ekstremis di dalam dunia Islam.⁹⁶ Patricia Hewitt juga mengemukakan bahwa pihak-pihak yang memikul tanggung jawab kepemimpinan harus segera bangun berdiri melawan setiap propaganda penyimpangan berbahaya yang dibangun dan dipaksakan oleh ekstremis Islam di tengah komuni-

93 Daniel Byman, “Al-Qaeda as an Adversary”, hal. 151

94 Paul Pillar, “Terrorism Goes Global: Extremist Groups Extend their Reach Worldwide”, *Brookings Review*, 19: 4 (2001), hal. 36

95 Greg Austin, “The Next Attack”, hal. 28

96 Zeyno Baran, “Fighting the War of Ideas”, *Foreign Affairs*, 84: 6 (2005), hal. 84

tas Muslim.⁹⁷ Konstruksi narasi ini setidaknya menyiratkan upaya membangun dua konsep pemahaman. Pertama, bahwa terdapat garis jelas yang dapat mengidentifikasi pemisahan antara Muslim ‘moderat’ dan ‘ekstrimis’. Kedua, bahwa terorisme secara garis besar adalah masalah internal dunia Islam dan itu adalah tanggung jawab dari dunia Islam sendiri untuk memperbaikinya.

Bentuk narasi lainnya yang juga mudah ditemukan dalam literatur ‘terorisme Islam’ meliputi konsep-konsep antara lain seperti: Pertama, ‘terorisme Islam’ dan ‘ekstremisme’ dari Muslim yang hidup di tengah masyarakat Barat lebih disebabkan oleh kurangnya integrasi, kegagalan multikulturalisme, alienasi dan pengangguran serta pengaruh radikalisme kelompok Jihad dari luar;⁹⁸ Kedua, komunitas Muslim di negara-negara Barat sering diistilahkan sebagai ‘*the fifth column*’ atau musuh dalam selimut (*the enemy within*) yang baik secara aktual atau potensial sangat berbahaya.⁹⁹ Ketiga, para ‘teroris Islam’ umumnya terdiri dari para pemuda yang lemah dan rentan secara psikologis serta kurang berpendidikan sehingga mudah sekali diindoktrinasi dan dicuci otaknya. Sehingga mereka mudah sekali jatuh ke dalam radikalisme melalui propaganda ekstremis di madrasah, mesjid atau situs-situs internet.¹⁰⁰ Mereka yang terlibat dalam aksi-aksi bom bunuh diri pun dituding sebagai pemuda yang terutama didorong oleh rasa frustrasi

97 NS interview, “Patricia Hewitt”, *Newstatesman*, 25 July 2005, hal. 26.

98 Lihat misalnya laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris yang berjudul “*Draft Report on Young Muslims and Extremism*”, UK Foreign and Commonwealth Office/Home Office, April 2004, dapat ditemukan di <http://www.globalsecurity.org/security/library/report/2004/muslimext-uk.htm>, diakses tanggal 05 Desember 2012

99 Lihat Javier Jordan and Luisa Box, “*Al-Qaeda and Western Islam*”, *Terrorism and Political Violence*, 16: 1 (2004), hal. 1–17.

100 Jenis narasi ini terekspresikan dalam artikel Husain Haqqani, “*Islam’s Medieval Outposts*”, *Foreign Policy*, 133 (2002), hal. 58–64.

dan impotensi secara seksual.¹⁰¹

¹⁰¹ Lihat misalnya Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God*, hal. 201.

BAB III

IMPLIKASI GLOBAL DISKURSUS TERRORISME ISLAM

Setiap epic kampanye perang mesti dilengkapi oleh sebuah narasi. Kedua belah pihak yang bertempur menulis narasinya masing-masing. Siapa paling mampu menciptakan narasi yang paling realistis dan praktis maka akan keluar sebagai pemenang. Thesis ini diungkapkan oleh Professor Usman Khalid, Direktur London Institute for South Asian Studies (LISA). Menurutnya, ‘narasi’ adalah vital dalam kampanye perang sedahsyat *War on Terror* karena ia harus meliputi ‘wacana-wacana’ realistis, logis dan meyakinkan yang memberikan deskripsi alasan kuat dari mengapa sebuah perang dimulai, dieksekusi dan kemudian disimpulkan. “Jika narasi tersebut banyak kelemahan, absurd, dan kurang realistis maka pihak musuh lah yang akan menang”.¹

Pendapat tersebut bisa menjelaskan alasan dibalik gencarnya informasi seputar wacana yang mengaitkan terorisme dan Islam dalam rangka melegitimasi kelanjutan kampanye perang melawan terror di wilayah dunia Muslim. Dukungan luas dari public adalah modal utama, dan disseminasi wacana yang menggalang persetu-

¹ Usman Khalid “*US War on Terror and Muslim Response*”, *Countercurrents.org*, August 02, 2007, diakses di <http://www.countercurrents.org/khalid020807.htm> pada tanggal 05 Februari 2014

juan opini public menjadi penentu mana pahlawan dan mana yang menjadi penjahat. Sang pahlawan yang keluar sebagai pemenang selanjutnya akan berkuasa dan tampil sebagai kekuatan hegemoni.²

Tetapi, memenangkan simpati public bukan lah hal sederhana. Sebab, public tidak mudah dikontrol oleh kekuatan yang bersifat fisik melainkan lebih bisa dikendalikan, diatur dan didisiplinkan oleh wacana.³ Untuk menjadi pemenang di *public sphere*, maka harus menjadi pihak yang mengendalikan wacana dengan mengatributi diri dengan segenap sifat-sifat mulia dan mengeksploitasi konotasi-konotasi jahat dan nista yang disematkan terhadap musuh.⁴ Michel Foucault pernah mengungkapkan bahwa konsep-konsep seperti gila, waras, sehat, sakit, benar, salah, termasuk pahlawan dan penjahat bukanlah sesuatu yang abstrak dan datang dari langit melainkan merupakan sesuatu yang dibentuk dan dilestarikan oleh wacana-wacana. Di tengah-tengah public terdapat berbagai macam wacana yang saling kontradiktif, namun arus kekuasaan akan menentukan wacana mana yang akan dominan dan mana yang akhirnya terpinggirkan atau bahkan terkubur.⁵

Logika narasi inilah yang muncul sebagai kesan dari gencarnya bombardier wacana seputar ‘terrorisme Islam’. Pihak juru kampanye pendukung perang melawan terror berusaha untuk menjadi pihak yang mendominasi wacana dan menyebarkan pengaruhnya. Mereka secara sistematis dan terus-menerus melukiskan gambaran tertentu mengenai eksistensi potensi ancaman terorisme dari pihak Muslim di benak public yang pada akhirnya memberikan ruang gerak seluas-luasnya bagi aksi-aksi counter nya. Mereka seakan berpacu mengejar target untuk menjadi otoritas yang mendominasi

2 Panuju, hal. 43

3 Michel Foucault, , terjemahan Eriyanto 2001, hal. 67

4 Sobur, 2001), hal. 36

5 Michel Foucault, , terjemahan Eriyanto 2001, hal. 77

tafsir dan cara pandang terhadap realitas situasi keamanan dunia termasuk untuk menentukan jenis dan bentuk langkah kebijakan yang diambil dalam mempertahankan stabilitasnya. Dalam bahasa Laffey dan Weldes, narasi wacana ‘terrorisme Islam’ berfungsi sebagai *symbolic technology* yang dimanfaatkan oleh elit dan institusi tertentu demi tujuan subyektifikasi dan *positioning* actor-aktor terlibat, formulasi nilai-nilai pengetahuan yang diakui bersama dengan mendeligitimasi tawaran alternatifnya, naturalisasi tatanan /sistem politik dan social tertentu serta mengkonstruksi dan mempertahankan sebuah bentuk rezim hegemoni kebenaran.⁶

Elaborasi lebih lanjut dari pemanfaatan *symbolic technology* dalam narasi ini dideskripsikan oleh Richard Jackson. Menurutnya wacana ‘terrorisme Islam’ berfungsi membangun pondasi awal bagi konstruksi identitas hegemoni supremasi diri atas pihak lain yang *negative (self-supremacy upon negative others)*. Demonisasi pihak eksternal dalam hal ini adalah ‘teroris’ Muslim yang sering digambarkan sebagai fanatic, brutal dan gemar kekerasan berperan besar secara konseptual dalam artikulasi identitas ke-aku-an pihak AS dan sekutunya yang luhur dan beradab.⁷ Pondasi awal ini selanjutnya akan melapangkan jalan bagi legitimasi tindakan-tindakan yang ditempuh oleh pihak ‘beradab’ atas nama ‘*counter*’ ataupun hukuman (*punishment*) terhadap pihak ‘teroris’ yang ‘biadab’. Bagaimanapun bentuk tindakan itu, baik dengan melakukan penyiksaan, penindasan dan pembasmian dengan melanggar aturan umum internasional maupun HAM, semua upaya yang dilakukan AS dan sekutunya dalam kampanye perang melawan terror akan selalu *legitimate* dalam preteks narasi ini. Pola logika ini jelas tampak dari aksi-aksi

6 Mark Laffey & Jutta Weldes, “Beyond Belief: Ideas and Symbolic Technologies in the Study of International Relations”, *European Journal of International Relations*, 3: 2 (1997), hal. 193-237.

7 Richard Jackson, “Constructing Enemies: ‘Islamic Terrorism’ in Political and Academic Discourse”, *Government and Oppositions*, 42: 3 (2007), hal. 420.

counter-terror di berbagai negara koalisi AS. Wacana ‘terrorisme Islam’ selalu menjadi alasan bagi pembenaran penerapan peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan public di wilayah domestic, penangkapan pihak-pihak yang dicurigai dengan mengacuhkan praduga tak bersalah, bahkan memberikan alasan bagi suatu negara untuk menyerang negara lain yang berdaulat atas nama pencegahan terrorisme.⁸

A. Munculnya Counter-Critics

Formulasi narasi wacana tragedy 11 september yang menjadi awal pemicu kampanye perang melawan terror mungkin bisa dikatakan berhasil karena mampu memberikan dasar legitimasi bagi AS dan sekutunya untuk beraksi ‘seperlunya’ di tingkat global sebagai upaya ‘defensif’ bagi penjaminan supremasi dan keamanan domestiknya. Tetapi, kelanjutan dari narasi kampanye perang tersebut yang mencuatkan wacana ‘terrorisme Islam’ dan kemudian melahirkan pertumpahan darah berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat dunia Muslim tampaknya akan menjadi pukulan balik. Narasi tersebut mulai kian absurd dan malah menjerumuskan kredibilitas AS dan sekutunya di mata dunia akan kejujuran dari keberlangsungan kampanye perang mereka.⁹

Banyak pengamat yang menggarisbawahi bahwa narasi wacana ‘terrorisme Islam’ mengandung banyak kelemahan yang prinsipil. Jangankan untuk dijadikan landasan bagi aksi politis berikutnya, gagasan ‘terrorisme Islam’ telah absurd bahkan pada tataran konseptualnya. Penggunaan istilah-istilah, pemakaian kata-kata kunci, serta asumsi-asumsi yang banyak dikerahkan dalam teks-teks seputar terrorisme Islam banyak mengandung hal-hal yang patut dipertanyakan. Selain itu, keseluruhan wacana nya pun sangat

8 Richard Jackson, “*Constructing Enemies*”, hal. 421-425

9 Usman Khalid “*US War on Terror and Muslim Response*”.

dipenuhi oleh praduga-praduga yang over-simplifikasi dan penarikan kesimpulan yang cenderung menggeneralisir permasalahan.

Contoh yang paling fundamental adalah simplifikasi dalam penggunaan istilah-istilah dasar kategori analitis seperti 'Islam', 'Dunia Muslim', 'Terroris Islam', 'Jihadist' atau 'Islamisme'. Pola generalisasi sederhana begitu kentara saat teks-teks 'terrorisme Islam' menytir istilah-istilah tersebut. Padahal, kata 'Islam' sendiri membawa konsekuensi makna yang meliputi sebuah entitas yang terdiri dari lebih satu miliar orang dengan lebih dari 50 negara, budaya dan bahasa, dengan lebih dari lima kelompok doctrinal dan lebih dari ratusan sekte derivative dan varian religio-kultural lainnya.¹⁰ Bahkan, label-label seperti 'ekstremisme', 'fundamentalisme', 'Islamisme' atau 'moderat' sekalipun memerlukan kualifikasi pendefinisian yang hati-hati dan spesifik. Banyak sekali gerakan yang digagas oleh kelompok-kelompok Muslim yang diekspresikan dengan frontal dengan variasi dan versi latar belakang yang sangat beragam. Tetapi seringkali gerakan itu disimplifikasi dalam satu kategori umum dengan cap 'fundamentalis' atau 'ekstremis'. Apalagi jika kualifikasi-kualifikasi lain seperti Sunni-Syi'ah, politis-non-politis, pola damai-kekerasan, nasionalis-transnasional juga digunakan sebagai parameter maka akan semakin rumit dan semakin kompleks kategorisasinya.¹¹ Setiap gerakan kelompok Islamis adalah produk dari latar belakang konteks dan sejarah yang unik. Membandingkan sebuah pergerakan kelompok Muslim di Saudi Arabia misalnya dengan gerakan yang sama di Pakistan dan Indonesia biasanya akan lebih melahirkan 'pertanyaan lanjutan' daripada menghasilkan kesi-

10 John L. Esposito, "Political Islam: Beyond the Green Menace", *Current History*, 93: 579 (1994), hal. 19-24

11 Guilain Deneux, "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam", *Middle East Policy*, 9: 2 (2002), hal 56-81. Lihat juga Zaheer Kazmi, "Discipline and Power: Interpreting Global Islam", *Review of international Studies*, 30 (2004), hal 245-254.

mpulan jawaban.¹²

Sekat-sekat definitif antara istilah-istilah yang digunakan dalam teks-teks narasi ‘terrorisme Islam’ pun seperti antara ‘ekstremis’ dan ‘moderat’ sering menggunakan batasan yang sumir. Kecenderungan kajian yang sepertinya mengacuhkan analisis keragaman fakta bahwa kelompok Islamist terjun dalam konteks pergerakan yang luas meliputi aktifitas di bidang politik, social dan budaya adalah factor kelemahan utama yang menyebabkan diskursus mereka terjebak dalam generalisasi. Seperti label ‘terroris Islam’ yang disematkan kepada kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang diduga teraffilia-si dengan al-Qaeda misalnya cenderung menonjolkan fokus kajian pada sisi aksi ‘terrorisme’ nya dengan mengenyampingkan perhatian pada aktifitas social kemasyarakatan serta konteks local yang mele-tarbelakangi pembentukan dan perkembangan kelompok tersebut. Padahal kristalisasi tujuan dari keputusan sebuah kelompok untuk menempuh aksi kekerasan terlebih dulu melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan, fusi dan diffusi internal. Sebagian kelompok mungkin menolak perjuangan dengan kekerasan atas pertimbangan teologis ataupun pragmatis. Tetapi ada pula mereka yang memutuskan mengambil langkah kekerasan ketika perjuangan damai mereka menemukan jalan buntu.¹³

Kritik terhadap kecenderungan pola narasi wacana ‘terrorisme Islam’ juga ditemukan dalam banyak kajian teks dan temuan riset mendalam yang menyatakan dengan tegas bahwa kelompok-kelompok yang sering dicap sebagai ‘fundamentalis’ tidak selamanya menjunjung tinggi aksi kekerasan, anti-demokrasi, atau tidak selaras dengan sekularisasi dan modernitas baik secara doktrin mau-

12 Ismail, *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism*, (London: IB Tauris, 2006)

13 Ismail, *Rethinking Islamist Politics*

pun praktik.¹⁴ Beberapa karya bahkan mempresentasikan dengan jelas kompatibilitas doktrin Islam dengan konsep demokrasi¹⁵, dan poling-poling yang menjaring pendapat Muslim di berbagai penjuru dunia pun secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas memilih demokrasi daripada system politik lainnya untuk diterapkan di negara mereka.¹⁶ Eksistensi kelompok-kelompok Islamis pun dipandang sebagai elemen utama penunjang terselenggaranya demokratisasi yang menyediakan ruang bagi partisipasi dan oposisi politis.¹⁷ Point utama yang digaris bawahi oleh karya-karya tersebut adalah bahwa titik permasalahan sebenarnya bukan terletak pada Islam sebagai anti-thesis dari demokrasi sebagaimana yang banyak diasumsikan, melainkan justru pada rezim-rezim repressif dukungan Barat yang sering menghambat bahkan memberangus usaha-usaha gerakan demokratis rakyatnya. Kelompok-kelompok yang sering diassosiasikan sebagai ‘teroris Islam’, seperti Hamas, Hizbullah, Ikhwanul Muslimin serta beberapa kelompok Islamis di Asia Tengah contohnya, selalu berpartisipasi aktif dalam proses suksesi nasional dan menerapkan sistem demokrasi yang maju dalam dinamika internalnya. Mereka juga mengadopsi pola-pola strategi dan pendekatan yang

14 Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Joseph Schwartz misalnya yang menyatakan bahwa term ‘fundamentalis’ lebih bersifat personal-individual daripada merupakan sebuah ekspresi kolektif atau politis. Lihat Joseph Schwartz, “*Misreading Islamist Terrorism: The ‘War Against Terrorism’ and Just War Theory*”, *Metaphilosophy*, 35: 3 (2004), hal. 278

15 Lihat misalnya Niaz kabuli, *Democracy According to Islam*, (Pittsburgh PA: Dorrance Publications, 1994), atau John L. Esposito & John O. Voll, *Democracy and Islam*, (New York: Oxford University Press, 1996), dan Anthony Shadid, *Legacy of the Prophet: Despots, Democrats, and the New Politics of Islam*, (Boulder CO: Westview Press, 2001).

16 Lihat temuan-temuan dari *World Values Survey Data* yang menyelenggarakan polling dari tahun 1995-2001 yang dipresentasikan dalam buku Pippa Norris, Montague Kern, and Marion Just (eds.), *Framing Terrorism: The News Media, the Governments and the Public*, (London: Routledge, 2003).

17 John L. Esposito, *Political Islam*, hal. 23

mapan dalam berinteraksi dengan berbagai actor social di sekitarnya dan terlibat secara aktif dalam proyek-proyek social di mana tujuan akhirnya bermuara pada penanaman pengaruh kekuasaan.¹⁸

Asumsi bahwa 'terrorisme Islam' adalah sebuah bentuk 'terrorisme agama' dimana aksinya sangat terinspirasi oleh atau bahkan berlandaskan pada ajaran Islam juga menjadi sasaran utama dari kritik. Retorika justifikasi dengan menggunakan dalil-dalil agama yang dilakukan oleh para pelaku tindak kekerasan terrorisme memang pantas mendapatkan sorotan kajian. Tetapi, semua retorika tersebut sifatnya hanyalah sekunder sebagai pelengkap dari pencapaian tujuan strategis utama yang sebenarnya sangat bersifat politis. Fred Halliday mengungkapkan bahwa menyimpulkan sebuah aksi kekerasan terrorisme sebagai tindakan yang digerakkan terutama oleh dalil-dalil suatu agama tertentu adalah *non-sense*, sebab pada dasarnya semua agama pasti mempunyai tradisi yang melegitimasi kekerasan.¹⁹ Adalah sebuah kesalahan berfikir jika menarik kesimpulan umum bahwa karena kesamaan karakteristik seperti agama misalnya antara pelaku terror kemudian karakteristik itu berkontribusi sebagai factor penggerak aksi mereka. Fakta bahwa para pelaku terrorisme umumnya laki-laki bukan berarti jenis kelamin menjadi factor katalis dalam aksi terrorisme.²⁰

Beberapa teks kajian empiris ternama juga meragukan adanya koneksi konsisten antara agama dan terrorisme. The Chicago Project on Suicide Terrorism misalnya yang mengkompilasi database aksi terror bom bunuh diri dari 1980-2003 dan mencatat sekitar keseluruhan 315 kejadian menyimpulkan bahwa kaitan antara bom bunuh diri dengan latar belakang doktrin agama san-

18 Shirin Akiner, "The Politicisation of Islam in Postsovyet Central Asia", *Religion, State & Society*, 31: 2 (2003), hal. 97-122.

19 Fred Halliday, *Two Hours that Shook the World*, hal. 46, 78

20 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, hal. 144

gatalah lemah.²¹ Marc Sageman dalam *Understanding Terror Networks*-nya yang menghimpun data biografis dari 172 partisipan kelompok 'terroris Islam' juga menawarkan kesimpulan yang hampir serupa. Beberapa diantara temuan penting kajiannya mengungkapkan bahwa: Hanya 17% dari para 'teroris' berlatar belakang pendidikan agama Islam; 8% dari mereka menyatakan telah taat beragama sejak masa muda; 13% menyatakan bahwa mereka terinspirasi untuk bergabung dengan kelompok atas dasar keyakinan agama; Peningkatan ketaatan beragama tampaknya merupakan dampak dari bergabungnya mereka dengan kelompok ini, dan bukan sebaliknya; Tidak ada bukti empiris bahwa mereka bergabung karena motivasi bawaan penyakit kejiwaan berupa kebencian atau prasangka; Kelompok 'terroris Islam' tidak terlibat secara aktif dalam perekrutan, karena mereka justru kewalahan dengan banjirnya relawan yang mendaftar; Data yang ada dari serangkaian penelitian dalam lima dekade tidak mendukung preposisi akan adanya praktek pencucian otak dengan indoktrinasi agama; dan tidak ada satu individu pun yang menyatakan bahwa mereka bergabung dengan kelompok karena terinspirasi oleh materi-materi dari internet.²² Temuan-temuan yang dipaparkan dalam dua karya survey di atas juga menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang menyatakan 'terrorisme Islam' sebagai dampak dari masalah-masalah kronis keminisan, kurang kasih sayang dan alienasi social adalah sama sekali tak berdasar. Fakta sebaliknya justru menunjukkan bahwa mayoritas

21 Temuan data menunjukkan bahwa 95% aksi bom bunuh diri berlatar-belakangkan isu agenda kampanye politis dan militer yaitu berupa perjuangan pembebasan dari pendudukan asing. Kelompok Marxist-Leninist Macan Tamil mendominasi daftar praktisi bom bunuh diri teratas dengan catatan 76 kali serangan. Sedangkan berdasarkan latar belakang pelaku, 43% persen dari total 386 pelaku tercatat sebagai agamis (*religious*). Untuk lebih lengkapnya lihat Robert Pape, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*, (New York: Random House, 2005), hal. 4, 17, 139, 205, 210.

22 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, hal. 93, 97, 110, 115, 121-125.

dari para responden 'terroris' ini secara mengejutkan berasal dari strata social kelas menengah-atas dengan latar belakang pendidikan di atas rata-rata, bekerja secara professional, menikah atau dalam status berhubungan, bergaul baik di tengah masyarakat dan mempunyai masa depan yang terbilang cerah. Tipe profil dari para 'terroris' ini boleh dikatakan lebih sebagai individu-individu melek politik yang potensial untuk menggerakkan akar rumput daripada menjadi fanatic yang religius.²³

Analisis dan interpretasi data dari hasil-hasil riset kuantitatif yang mensurvey beragam kelompok 'Jihadist' juga banyak menekankan bahwa maksud utama dari aksi-aksi kekerasan mereka lebih ke arah tujuan politis dan nasionalis dalam pengertian tradisionalnya. Penggunaan symbol-simbol keagamaan walaupun tampak begitu intens lebih bersifat instrumental (pelengkap) ketimbang primer. Dalam konteks ini, 'Islamisme' yang dituding sebagai inspirasi dari 'terrorisme Islam' akan lebih akurat jika diartikan sebagai ideology revolusioner dan bukan sebagai doktrin agama yang melegitimasi kekerasan.²⁴ Bentuk kesimpulan itu banyak diajukan oleh teks-teks penting yang mengkaji pola pergerakan Osama bin Laden dan al-Qaeda. Menurut literature-literatur tersebut, kekecewaan aktor-aktor 'terroris Islam' intinya adalah bersifat social, ekonomis dan politis tetapi diartikulasikan dengan kemasannya symbol agama.²⁵ Indikasi nyata dari thesis tersebut memang secara eksplisit tertuang berulang-ulang dalam banyak statement dari Osama bin Laden

23 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, hal. 97. Robert Pape, *Dying to Win*, hal. 216

24 Roxanne Euban, "Killing (for) Politics: Jihad, Martyrdom, and Political Actions", *Political Theory*, 30: 1 (2002), hal. 4-35

25 Lihat misalnya Jason Burke, *Al-Qaeda*, hal. xxv-xxvi, dan Peter Bergen, *Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden*, (London: Weidenfeld and Nicholson, 2001), hal. 242, serta Mohammed Ayoob, "The Future of Political Islam: The Importance of External Variables", *International Affairs*, 81: 5 (2005), hal. 955.

sendiri yang menyatakan tujuan-tujuan politis dari pergerakannya yang meliputi dukungan penuh bagi pembentukan negara Palestina, mengakhiri pengaruh pendudukan AS di semenanjung Arabia dan dukungannya terhadap Israel, menggulingkan rezim-rezim korup dan oppresif di dunia Muslim dan membantu perlawanan local di Kashmir, Chechnya, Filipina dan lainnya, serta mengusir kekuatan Barat dari Afghanistan dan Iraq.²⁶

Konsep dan asumsi lainnya yang mewarnai narasi wacana 'terrorisme Islam' pun sangat rentan untuk diperdebatkan. Hipotesa atau pun teori tentang "New Terrorism" misalnya secara empiris kurang didukung oleh fakta-fakta relevan. Paparan seputar konsepnya pun tak lebih banyak menawarkan perbedaan prinsipil antara terorisme jenis lama dan baru selain justru lebih banyak mengesankan persamaannya. Premis utama yang menyatakan bahwa "New Terrorism" digerakkan oleh inspirasi agama pun kurang begitu kuat landasannya.²⁷ Asumsi tak berdasar lainnya pun terletak pada kajian yang menyimpulkan bahwa 'terroris Islam' adalah kaum fanatik irrasional yang berorientasi membantai pihak sipil yang tak bersalah. Faktanya, aksi-aksi terorisme kontemporer menunjukkan kelihaihan taktik dan rasionalitas tinggi dalam kalibrasi yang memenuhi unsure logika strategi peperangan asimetris (*asymmetric warfare*).²⁸

Di sisi lain, peran dan Ancaman dari kelompok 'terroris Islam' seperti al-Qaeda pun cenderung terlalu dibesar-besarkan dan

26 Lihat Bruce Lawrence (ed.), *Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden*, (London: Verso, 2005)

27 Lihat Thomas Copeland, "Is the New Terrorism Really New? An Analysis of the New Paradigm for Terrorism", *Journal of Conflict Studies*, 21: 2 (2001) hal. 91-105. Lihat juga Isabelle Duyvesteyn, "How New is the New Terrorism", *Studies of Conflict and Terrorism*, 27: 5 (2004), hal. 439-454, dan Alexander Spencer, "Questioning the Concept of 'New Terrorism'", *Peace, Conflict and Development*, 8 (2006), hal. 1-33.

28 Mark Sedgwick, "Al-Qaeda and the Nature of Religious Terrorism", *Terrorism and Political Violence*, 16: 4 (2004), hal. 795-814.

terkadang narasinya tampak dipresentasikan ibarat mitologi. Padahal nama dari kelompok itu sejatinya adalah sebuah kompilasi daftar hirarkis relawan Jihad yang berpartisipasi dengan peran yang tidak terlalu signifikan dalam perang melawan pendudukan Uni Sovyet di Afghanistan.²⁹ Wacana yang mengaitkan kapabilitas mereka dalam penggunaan senjata pemusnah massal pun begitu hiperbolis mengingat bukti-bukti yang ada sangatlah elusiv.³⁰ Pada kenyataannya, al-Qaeda bukanlah sebagai sebuah organisasi trans-nasional yang mewadahi populasi dengan ideology yang seragam. Ia lebih merupakan aliansi militer lintas-negara dengan basis pergerakan perjuangan pembebasan nasional yang bekerjasama melawan musuh yang mereka anggap sebagai kekuatan penjajahan.³¹ Singkatnya, dari berbagai studi-studi kualitatif dapat disimpulkan bahwa terrorisme pada dasarnya bersifat local. Pemicunya dapat diidentifikasi berdasarkan kekecewaan politis dan isu-isu spesifik yang terjadi di struktur masyarakat yang berdomisili di wilayah tertentu. Agama tak lebih dari faktor instrumental yang memberikan kemasan sacral pelengkap bagi ekspresi pergerakannya.

B. Pola ‘Conditioning’ dalam Disseminasi Narasi Wacana Terrorisme Islam

“If people keep telling you something, you will start believing it...”. Ungkapan tersebut dinyatakan oleh seorang penceramah (Da’i) lembaga dakwah yang berbasis di Jeddah ketika menjawab sebuah pertanyaan mengenai mengapa Islam begitu kuat dikaitkan

29 Jason Burke, *Al-Qaeda*, dan Peter Bergen, *Holy War Inc.*

30 Brian Jenkin, “Will Terrorists Go Nuclear?: A Reappraisal”, dalam Harvey Kushner (ed.), *The Future of Terrorism: Violence in the New Millennium*, (London: Sage, 1998).

31 Henry Munson, “Islam, Nationalism, and Resentment of Foreign Domination”, *Middle East Policy*, 10: 2 (2003), hal. 40-53. Lihat Juga Robert Pape, *Dying to Win*, hal. 104.

dengan terrorisme dalam sebuah video yang beredar luas di situs Youtube.³² Ia mengambil sebuah analogi ketika beberapa orang menyampaikan persepsi yang serupa tentang kondisi yang kita rasakan kemudian persepsi itu disampaikan secara berulang dalam beberapa kesempatan berbeda maka lambat laun kita akan mempercayai persepsi orang-orang tersebut walaupun faktanya adalah salah. “Ketika anda baik-baik saja, kemudian ada tiga teman yang secara berturut-turut mengatakan anda ‘tampak’ sedang sakit... kepada teman yang pertama mungkin anda akan bilang dengan tegas bahwa anda baik-baik saja.. kepada teman yang kedua anda akan bilang lelah dan butuh istirahat.. dan kepada teman ketiga yang datang kemudian anda mungkin sudah di tahap terpengaruhi bahwa anda sedang sakit parah meski sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang salah dengan kondisi anda”.³³

Analogi di atas digunakan sang Da’i ketika menjawab sebuah pertanyaan dari audiens tentang wacana seputar Terorisme Islam. Kondisi kesadaran publik memang kini tengah dihadapkan dengan gencarnya arus informasi yang mengaitkan terrorisme dan Islam pasca peristiwa 11 September di AS. Kampanye tiada henti yang dikomandoi AS dan sekutunya dalam memerangi terrorisme dunia yang umumnya menargetkan wilayah-wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim tampak sebagai sebuah “Stimulus” yang men-

32 Da’i ini bernama Abu Mussab Wajdi Akkari, seorang pria berkeluarga kelahiran Lebanon yang bermigrasi dan menghabiskan masa mudanya di Amerika Serikat. Dia menggambarkan masa lalu nya sebagai sebuah “kehinaan”, sampai akhirnya dia bertaubat dan bergabung dengan sebuah lembaga dakwah dan tinggal di Saudi Arabia. Aktivitas dakwahnya banyak didokumentasikan dalam bentuk Video yang diunggah via situs resminya onewaytoparadise.net dan juga lewat Youtube. Setiap video dakwah unggahannya ditonton oleh lebih dari 10.000 viewers.

33 Lihat misalnya salah satu video dengan judul “*Why Islam is Linked with Terrorism*”, yang diupload di situs Youtube pada tanggal 14 Maret 2002 dengan tautan <http://www.youtube.com/watch?v=5viqyyt2RbQ>. Video tersebut masih dapat diakses pada tanggal 10 januari 2014

gundang persepsi di wacana publik bahwa ada sesuatu yang salah dan fundamental pada Islam dan kaum Muslim. Kecenderungan peliputan media terhadap kampanye tersebut yang secara kontinyu menyetengahkan aksi-aksi terorisme atau kekerasan yang terkait dengan Islam dan Muslim sebagai *headline* semakin menunjukkan kesan bahwa stimulus-stimulus dari konsep wacana itu sedang benar-benar ditancapkan. Stimulus-stimulus itu pun diperkuat dengan bombardier analisa teoritis yang diperkaya dengan konsep-konsep ilmiah dalam diskusus di dunia akademis yang akhirnya mempertajam hipotesis dari sebuah pemahaman bahwa Islam dan dunia Muslim adalah identik dengan kekerasan dan eksistensi dari terorisme Islam adalah sebuah konsekuensi yang sangat logis.

Pola “indoktrinasi” yang mirip dengan teori behavioristic conditioning nya B. F. Skinner ini tampaknya cukup berhasil dalam menyemaikan persepsi pemahaman di benak publik. Di kalangan masyarakat Islam sendiri yang notabene adalah pihak dirugikan telah terjadi proses gradual kesadaran ‘penerimaan’ atau pengakuan bahwa elemen-elemen terorisme memang eksis di tengah-tengah mereka. Hampir bisa dipastikan bahwa semua Muslim – dan bahkan semua penganut agama - menyangkal jika agama mereka dikaitkan atau disebut sebagai inspirasi dari tindakan terror. Jika pun memang ada preskripsi dalam agama yang ‘berbau’ kekerasan sifatnya hanya sebatas berbentuk konsekuensi hukuman (*punishment*) dari tindakan yang melampaui batas atau berupa reaksi preventif bagi terjadinya tindakan lain yang akan menimbulkan kerugian besar.³⁴ Tetapi, dengan gencarnya stimulus-stimulus aksi politis dan informasi global yang diadopsi oleh pemangku jabatan dan media local kesadaran Muslim pun mulai dipengaruhi dengan ‘realita’ wacana bahwa ada yang salah dengan elemen di tengah mereka.

34 Gambaran detail tentang preskripsi Islam yang mengilustrasikan tindakan kekerasan fisik dan sanksi sosial yang diperlukan banyak ditemukan dalam teks-teks kajian hukum Fiqh Islam khususnya pada bagian-bagian bab yang membahas tentang Jinayat.

Sebagai ilustrasi, mayoritas masyarakat Muslim pada fase awal dikumandangkannya kampanye perang melawan terror tidak mempercayai bahwa aksi serangan teroris 11 September di AS dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang memegang Islam sebagai dasar ideology dari aksi tersebut. Bahkan ketika sebuah lembaga polling internasional terkemuka melakukan survey dengan pertanyaan “apakah anda percaya pada klaim yang diberitakan secara luas bahwa orang ‘Arab’ (tidak memakai kata ‘Muslim’-*pen.*) yang melakukan serangan teroris di AS pada tanggal 11 September?”, mayoritas responden di 9 negara dominan Muslim menjawab dengan penyangkalan. Tak lebih dari 20 persen (kecuali di Turki dan Libanon yang angkanya mencapai 40%) yang mempercayai klaim versi pemerintah AS, itupun dengan alasan bahwa aksi 11 September terjadi karena akibat dari kebijakan AS sendiri. Mereka yang menyangkal ini umumnya menuduh bahwa pelaku sebenarnya dari tragedi terorisme terbesar itu adalah Israel atau organisasi teroris non-Muslim lainnya. Bahkan banyak diantara mereka yang menuduh justru AS lah yang menyusun scenario peristiwa tersebut.³⁵

Prosentase tingkat penyangkalan tersebut bisa dilihat berubah pada perkembangan selanjutnya. Seiring dengan meluasnya front kampanye perang melawan terror yang menjangkau hampir semua negara Muslim yang disertai gencarnya liputan media, masyarakat Muslim tampak mulai ‘merevisi’ beberapa pandangan mereka. Dukungan yang tadinya tinggi terhadap ‘kharisma’ perjuangan Osama bin Laden terus memudar dari tahun ke tahun sehingga gambaran tersangka teroris itu pun lambat laun bertransformasi di benak dan wacana masyarakat Muslim. Dari seorang Mujahid menjadi seorang teroris yang mengilhami tumbuhnya aliran ekstrim dalam Islam dan mengancam stabilitas kaum Muslim. Ini tampak dari

35 The Gallup Poll Editorial Staff, “*Blame for Sept. 11 Attacks Unclear for Many in Islamic World*”, *Gallup.com*, March 01, 2002, <http://www.gallup.com/poll/5404/Blame-Sept-Attacks-Unclear-Many-Islamic-World.aspx>, diakses pada tanggal 01 Februari 2002

fenomena dimana Muslim menunjukkan tingkat kekhawatiran yang terus menerus membesar dari waktu ke waktu terhadap ekstremisme Islam di sekitar mereka. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PEW global project pada tahun 2005 misalnya kekhawatiran terhadap kelompok radikal Islam hanya menghantui sekitar 30-40 persen populasi masyarakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.³⁶ Tetapi, tiga tahun kemudian, hampir tiga dari empat orang Muslim di negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, Libanon dan Jordan menyatakan kekhawatiran mereka bahwa kebangkitan kelompok ekstrim Islam akan merusak stabilitas dari harmoni kehidupan mereka.³⁷

Beberapa elemen dari masyarakat Muslim bahkan melangkah lebih jauh. Mereka yang memang sejak awalnya mempunyai faham anti-Barat dan anti-modernisme serta menempuh jalur pergerakan dan perlawanan dengan lantang berani menyatakan bahwa mereka adalah “teroris” yang Muslim dan berpegang teguh pada pijakan agama yang kuat. Mereka berdalih bahwa jika dasar pergerakan yang berbasis pada memperjuangkan supremasi Islam dan membela hak-hak saudara Muslim mereka dari ketertindasan kekejaman Barat dikategorikan sebagai aksi terorisme maka “ya! saya adalah terrorist!”³⁸

Di kalangan masyarakat Barat, efek *conditioning* wacana ter-

36 Lihat PEWglobal.org, “*Islamic Extremism: Common Concern for Muslim and Western Publics*”, PEWglobal.org., July 14, 2005, <http://www.pewglobal.org/2005/07/14/islamic-extremism-common-concern-for-muslim-and-western-publics/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2014

37PEWglobal.org, “*Muslim Views on Extremism and Conflict*”, PEWglobal.org, 17 September 2008. Artikel ini dapat diakses melalui tautan <http://www.pewglobal.org/2008/09/17/chapter-3-muslim-views-on-extremism-and-conflict/> pada tanggal 01 Februari 2014

38 Lihat misalnya statement-statement yang diungkapkan oleh Abu Bakar Ba'asyir dalam 'pledoi' nya yang disusun dalam sebuah buku Fauzan Al-Anshari, *Saya Teroris? (Sebuah Pledoi)*, (Jakarta: Republika, 2002), atau pernyataan-pernyataan Imam Samudra, salah seorang tersangka utama Bom Bali dalam bukunya

orisme Islam ini tentu saja menjadi semakin dahsyat. Sentimen anti-Islam dan Islamophobia yang tadinya marginal kemudian langsung menjadi sorotan utama setelah September 2001. Sebelumnya, diskursus kekerasan di dunia Islam tampaknya tak lebih ibarat sebuah 'kisah dari belahan bumi lain'. Wacana-wacana yang melingkupinya pun terbatas pada upaya-upaya domestic kaum Muslim melawan kekuasaan pemerintah mereka. Aksi-aksi kekerasan di Israel dan Palestina, kekerasan sectarian di Lebanon dan Jammu-Kashmir India, serta Revolusi Iran misalnya dipandang tak lebih sebagai peristiwa 'rutin' politik biasa di dunia 'antah-berantah' yang tak ada efeknya pada kehidupan masyarakat di Barat. Tetapi, setelah peristiwa 9/11 di New York yang diikuti gencarnya reaksi kampanye pelang melawan terror mayoritas masyarakat Barat tampaknya telah terhipnotis oleh sebuah sugesti konsep bahwa ancaman kekerasan politis yang dibawa oleh kaum Muslim kini telah 'mengetok pintu' dan masuk di wilayah 'rumah' mereka.

Konsekuensi logis dari bentuk kekhawatiran masyarakat Barat tersebut akhirnya terformulasi dalam kecenderungan sikap diskriminasi dan stereotyping. Sebuah survey PEW di lima negara Barat terkemuka, contohnya, menunjukkan bagaimana intensnya perkembangan dari pandangan negative mereka terhadap Muslim. Responden yang menyatakan bahwa Muslim identik dengan kekerasan dan sering berlaku kasar (*violent*) mencapai angka yang signifikan hingga di atas 50 persen. Pandangan bahwa Muslim berpotensi ofensif ini juga bahkan jauh melebihi criteria-kriteria negative lain yang cenderung pasif seperti egois, tamak, atau sombong.³⁹ Survey berikut yang menganalisa lebih lanjut mengenai fenomena ini menyimpulkan bahwa trend persepsi negative tersebut bermuara pada satu sumber permasalahan yaitu kekhawatiran yang

39 Richard Wike & Brian J. Grimm, "Widespread Negativity: Muslims Distrust Westerners more than Vice Versa", PEWglobal.org, October 7, 2007, di <http://www.pewglobal.org/2007/10/30/widespread-negativity-muslims-distrust-westerners-more-than-vice-versa/> diakses pada tanggal 6 Februari 2014.

besar terhadap ancaman stabilitas keamanan di tengah kehidupan masyarakat. Survey ini juga mengilustrasikan bagaimana terbentuknya sebuah mata rantai lingkaran setan antara situasi kekhawatiran dengan reproduksi wacana yang akhirnya berkontribusi besar dalam melanggengkan persepsi negative dan stereotyping.⁴⁰

Efek *conditioning* yang berkolaborasi dengan kecenderungan persepsi stereotip tersebut akhirnya secara berkesinambungan mereproduksi konsep-konsep baru yang mengakibatkan arah pembahasan wacana terorisme Islam tidak lagi proporsional dan semakin melangkah jauh dari obyektifitas. Kekhawatiran di beberapa segmen masyarakat Barat terhadap aksi kekerasan Muslim kemudian bergeser membentuk pola kebencian terhadap Arab dan Islam. Isu-isu seputar terorisme Islam yang pada awalnya merupakan sentiment politis bermutasi menjadi sentiment cultural dan religious. Di Eropa, sentiment anti Muslim karena alasan agama dan budaya menyamai angka sentiment politis di angka 40 persen. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada kebencian terhadap Muslim akhirnya lebih menjurus kepada factor sentiment Agama dan Budaya. Alasan politis yang tadinya merupakan awal dari Islamophobia ini kemudian jauh tergeser dan hanya diadopsi oleh sekitar 35 persen responden.⁴¹

Meski upaya-upaya dialog antar agama dan budaya yang mensosialisasikan Islam sebagai agama anti kekerasan intens digalakkan di tengah audiens masyarakat Barat, hal itu tampak tak bisa membendung tingkat sentiment anti-Islam sebagai eksekusi dari arus informasi seputar kampanye perang melawan terror. Polling tahu-

40 Richard Wike & Brian J. Grim, "Western Views toward Muslims: Evidence from a 2006 Cross-National Survey", *International Journal of Public Opinion Research*, February 4, 2010, di <http://ijpor.oxfordjournals.org/content/early/2010/02/04/ijpor.edq002.full.pdf+html> diakses tanggal 5 Februari 2014

41 Gallup World, "Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West", Gallup.com, <http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx>, diakses pada tanggal 01 Februari 2014.

nan yang diselenggarakan oleh *Washington Post* dan *ABC News* memberikan deskripsi dari peningkatan trend hubungan negative ini. Di public AS, misalnya, pada tahun 2001 tingkat kebencian (*unfavorable opinions*) terhadap Islam disuarakan oleh 39% responden. Angka tersebut menanjak sampai 46% pada tahun 2006. Dan pada tahun 2010, suara-suara anti Islam diekspresikan oleh 49% publik AS.⁴² Survey yang dilakukan oleh *The Economist* malah menunjukkan angka yang lebih mencengangkan. Sentiment anti-Islam di adopsi oleh lebih dari 55% masyarakat AS.⁴³

Ekspresi nyata dari sentiment anti-Islam di ranah public pun muncul dalam berbagai bentuk dan seakan berusaha untuk lebih meyakinkan bahwa 'terorisme Islam' adalah ancaman yang dekat dan nyata (*clear and present danger*). Di ranah akademis misalnya terdapat Steve Simon dan Daniel Benjamin yang menekankan bahwa ancaman terorisme Islam bukanlah masalah politis melainkan berbentuk cultural dan religious. Mereka mengkritik pidato Presiden Bush yang menyatakan bahwa aksi terorisme yang terjadi di AS bukanlah representasi dari Islam tetapi merupakan penyelewengan ajaran oleh sebagian elemen atas ajaran agama yang berpusat pada orientasi damai. Menurut Simon dan Benjamin pidato itu bisa dikatakan '*politically correct*', tetapi mengaburkan inti permasalahan dimana Islam lah yang sebenarnya merupakan ancaman. Semakin fundamental seorang Muslim berpegang pada ajarannya, semakin potensial dia untuk melakukan kekerasan kepada pihak yang dia anggap sebagai '*kafir*' atau non-Muslim.⁴⁴ Alan Dershowitz bahkan

42 "*Washington Post – ABC News Poll*", *The Washington Post*, September 07, 2010.

43 R. M., "*Mosque Building and Its Discontents*", *The Economist*, August 19, 2010. Angka 55% diatas terdiri dari 27,7% sangat anti-Islam (*very unfavorable*) dan 27,7% agak anti-Islam (*somewhat unfavorable*).

44 Daniel Benjamin & Steven Simon, *The Age of Sacred Terror*, (New York: Random House, 2002).

melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa bangsa Arab dan Muslim begitu ‘kecanduan’ dengan aksi-aksi kekerasan yang berbau terror. Meski menurutnya sikap itu bukan berarti adanya ‘gen kekerasan’ dalam diri mereka, terorisme Islam jelas bersumber dari budaya dan agama mereka.⁴⁵

Di ranah media, ekspresi sentiment anti-Islam bahkan mendapatkan porsi sorotan yang lebih berdampak luas. Pergeseran kecenderungan dari nuansa politis ke sentiment agama dan budaya pun juga tergambar jelas. Sebuah karikatur yang menggambarkan “Muhammad” dengan bom pada turbannya yang dimuat oleh sebuah harian di Denmark menyiratkan pendapat sebagian elemen masyarakat Barat yang mengidentikkan Islam dengan kekerasan.⁴⁶ Karikatur tersebut tak ayal memancing reaksi emosional dari Muslim di seluruh dunia. Tak lama kemudian di dunia maya beredar sebuah video bertajuk *Fitna* yang semakin menguatkan ekspresi pengidentifikasian Islam tersebut. Efek social politis yang ditimbulkan oleh video ini pun lebih dahsyat. Bukan hanya disebabkan oleh fiturnya yang seakan ‘membuktikan lebih gamblang’ maksud dari karikatur harian Denmark dengan visualisasi aksi sadis dengan latar belakang agama, fakta bahwa video ini dibuat dan disponsori oleh kekuatan unsur politik di Belanda menyebabkan dampak reaksi yang semakin meluas.⁴⁷

Impresi politik kekerasan yang ditonjolkan gerakan anti-Islam pun kemudian beralih ke isu budaya dan agama. Munculnya video

45 Alan Dershowitz, *The Case for Israel*, (Hoboken NJ: John Wiley and Sons, 2003), hal. 128

46 Karikatur ini terbit dalam harian *Jylland Posten*, sebuah harian di Denmark pada akhir tahun 2005 dan memantik gelombang protes besar-besaran di seantero dunia Muslim pada awal tahun 2006..

47 Orang di belakang penggarapan video yang beredar luas di tahun 2007-2008 ini adalah Geertz Wilders, seorang pemimpin partai konservatifkanan yang juga duduk sebagai anggota parlemen di Belanda. Video tersebut masih bisa diakses di situs Youtube dengan tautan

The Innocence of Muslim yang kembali menggegerkan dunia di tahun 2010 misalnya lebih mengekspose penghinaan terhadap ‘tradisi’ Muhammad yang notabene adalah sumber dari Islam. Begitu pula halnya dengan aksi yang digalang oleh seorang pendeta Kristen di Florida bernama Terry Jones. Setelah menerbitkan buku tendensius nya yang berjudul *Islam is of the Evil*, Jones kemudian menggalang aksi “Hari Membakar al-Qur’an” pada peringatan peristiwa tragedy 11 September tahun 2010. Meski aksinya tersebut gagal pada waktu yang direncanakan, aksi membakar al-Qur’an yang dilakukan beserta jemaat nya dan direkam pada tanggal 20 Maret 2011 memancing protes besar-besaran di Pakistan dan Afghanistan.

Representasi besar-besaran media Barat yang menggambarkan Islam dan kekerasan memang begitu intens. Terlepas dari skema apakah hal tersebut merupakan bagian dari strategi propaganda atau bukan, nyatanya publikasi Islam dan terorisme tampak begitu diserapkan ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat Barat, khususnya di AS. Film-film dengan latar belakang cerita aksi terorisme Muslim terus diproduksi massal pasca 2001. Dialog-dialog talkshow di televisi juga banyak menyinggung aksi-aksi kekerasan yang melibatkan Muslim meski isu tersebut bukan merupakan tema sentral. Gambaran representative dari sentiment anti-Islam mungkin dapat terlihat jelas dari aksi protes jalanan di New York yang menentang rencana pembangunan mesjid di kawasan *Ground Zero* (situs runtuhnya menara kembar WTC) pada tahun 2010. Spanduk-spanduk yang dibawa menyuarakan dengan jelas apa yang menjadi konsern sentiment mereka. Yang paling banyak dibawa adalah poster bertuliskan “*Shari’a*” dengan pola tulisan darah yang menumpah, dan tentu saja tulisan-tulisan dengan slogan sebagai berikut: “*Terrorist sleeping cells in America are Muslims!, Wake up America!*”, “*Hey Islam, We Will Never Submit !*”, atau “*Have his throat slit by Mohammed, what would Jesus do?*”.⁴⁸

48 Moustafa Bayoumi, “*Between Acceptance and Rejection: Muslim Ameri-*

Keseluruhan rangkaian fakta di atas menunjukkan bagaimana sebuah narasi terbentuk. Konsep terorisme Islam memang tampak absurd apada awalnya karena menggabungkan dua frasa kata yang saling bertentangan. Tetapi dengan intensnya *conditioning* yang diperkuat dengan *common sense* dalam presentasi media sehari-hari di tengah ruang publik dan juga 'fakta-fakta' pemberitaan dari berbagai penjuru dunia, absurditas itu lambat laun mencair. Terorisme Islam kini tampak sebagai wacana yang nyata di public masyarakat Barat. Dan di kalangan dunia Muslim, konsep terorisme dalam Islam pun mulai masuk ke dalam pertimbangan.

BAB IV

TERRORISME DALAM DISKURSUS DUNIA ISLAM

Dalam istilah Arab kontemporer, terorisme disebut dengan *irhab* yang merupakan derivasi dari kata kerja *arhaba-yurhibu*. Kata tersebut secara etimologis berarti menakut-nakuti (*to frighten, to terrify*), menyebabkan suasana terror, atau menyerang dengan menyebarkan ketakutan yang mencekam (*to strike with fear*).¹ Penggunaan istilah ini secara luas di dunia Arab tak terlepas dari pengaruh diskursus terorisme dalam bahasa-bahasa Barat terutama Inggris dan Perancis.² Sejak awal dekade 80an, istilah *irhab* seringkali menghiasi retorika politik di Timur Tengah yang ditujukan untuk mengutuk pendekatan mi-

1 Munir Ba'albaki, *al-Mawrid*, (Rembang: Halim Jaya, 2006), hal. 424. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), cet. ke-6, hal. 148. Selain mempunyai arti umum di atas, derivasi kata *arhaba* juga mempunyai makna lain seperti kependetaan (kepaderian), bagian tempat menaruh pelana pada punuk unta, serta juga bisa berarti lengan baju. Lihat Louis Ma'louf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), cet. ke-17, hal. 282. Keterangan alternatif makna yang lebih rinci dari kata *arhaba* juga dapat dilihat dalam Ibn Manzhur jamaluddin Muhammad ibn Mukarram al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Mishriyyah, 1968), vol. II, hal. 420-423.

2 Lihat "Terrorism" dalam Richard C. Martin, (eds.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, (New York: Thomson and Gale, 2004), vol. II, hal. 691-693

liter yang dilakukan Israel di Palestina. Pemerintah Mesir juga kerap menggunakan istilah ini dalam mendeskripsikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pergerakan Islam anti pemerintah.³

Stigmatisasi global pasca peristiwa September 2001 di Amerika Serikat cenderung mengidentikkan istilah *irhab* sebagai produk ajaran Islam. Masyarakat Muslim otomatis merespons dalam berbagai bentuk mulai dari klarifikasi apologetic, reformulasi konsep ideologis, bahkan sampai pengakuan secara terbuka. Tuduhan terorisme yang dilabelkan pada mayoritas elemen Muslim adalah sebuah fenomena serius karena juga melibatkan perhatian public audiens untuk mereview ajaran/ideology Islam yang sering disebut-sebut sebagai inspirasi kuat dari aksinya.

Namun karena universalitas dari konsep ajaran Islam⁴ yang berhasil bertahan selama lebih dari 14 abad serta dipeluk oleh lebih dari 1,3 miliar penduduk bumi maka siapa pun akan sangat kesulitan – atau bahkan mustahil – menemukan landasan dogmatis tekstual yang utuh bahwa Islam melegalkan kekerasan dan menebar terror. Hipotesa yang beredar dengan mengutip beberapa potongan ayat dari al-Quran yang disebut-sebut Islam anti non-Muslim umumnya berupa tafsiran parsial yang mencoba membenarkan fenomena bahwa kekerasan yang menyita perhatian public dunia cenderung dilakukan oleh kalangan Muslim. Dalam konteks tersebut, upaya-upaya counter-image yang dilakukan kalangan Muslim pun akhirnya berkuat di wilayah penafsiran konseptual. Teks-teks ideologis yang disinyalir menjadi inspirasi terror ditinjau kembali dengan menggunakan pendekatan analisa sosio-politis dan sosio-historis.

Wacana pengaitan terorisme dengan elemen-elemen dalam Islam dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena baru. Sebelumnya, tipikal aksi yang melibatkan kekerasan untuk tujuan politis biasanya

3 Richard C. Martin, (eds.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*.

4 Lihat referensi tentang universalisme Islam di M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*,

dipandang sebagai sebuah aksi pemberontakan terhadap kekuasaan status quo. Tak jarang juga aksi yang mengandung terror tersebut bahkan ditulis sejarah sebagai sebuah perjuangan kemerdekaan, khususnya pada periode dimana pergerakan politik dunia tengah dihiasi oleh trend restukturisasi pembentukan negara-bangsa dalam rentang waktu 1920an hingga 1960an.⁵ Nasionalisme dan agama menjadi dua ideologi yang paling menonjol sebagai latar belakang 'roh' yang menjiwai pergerakan aksi-aksi tersebut.

Pada perkembangan berikutnya dimana negara-bangsa telah terkristal di berbagai belahan dunia, pergeseran retorika politis dalam labelisasi aksi pergerakan massa pun terjadi. Setiap aksi perlawanan yang melibatkan kekerasan terhadap negara umumnya dilabeli dengan 'pengacau keamanan' dan aksinya di cap sebagai tindakan terror. Di saat yang sama, paham nasionalisme yang sebelumnya lebih dominan telah tergeser oleh ideology agama sebagai tema sentral faktor penggerak aksi. Beberapa 'catatan keberhasilan' yang dicapai oleh pergerakan aksi ini seperti Revolusi Iran pimpinan Ayatullah Khomeini, pembunuhan Presiden Anwar Sadat di Mesir serta perlawanan militant Hizbullah di Libanon semakin mengukuhkan asumsi bahwa inspirasi agama dalam perlawanan politik yang melibatkan kekerasan adalah sesuatu yang nyata. Mata dunia akhirnya tertuju pada perkembangan pergolakan kekerasan yang umumnya dominan terjadi di Timur Tengah serta latar belakang inspirasi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduknya.⁶ Pada titik inilah perhatian khusus publik terhadap terorisme Islam terformulasi.

Namun jika mengamati wacana yang berkembang secara internal, diskursus terorisme di kalangan Muslim - khususnya dalam

5 Lihat "Terorisme" dalam John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2002), Jilid VI, cet. ke-2, hal. 33-37.

6 Richard C. Martin, (eds.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, dan John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*.

khazanah tradisi Islam - sangatlah 'senyap'. Kegaduhan kontemporer seputar isu terorisme sama sekali tidak tercermin dalam tradisi diskursus keilmuan Islam dalam rentangan sejarahnya. Dalam al-Qur'an, istilah *irhab* tidak pernah disebutkan. Tetapi, derivasi kata dalam bentuk kata kerjanya muncul satu kali dalam S. al-Anfal (8) ayat 60.⁷ Uniknya, kata *yurhibunahum* dalam ayat tersebut justru berkonotasi positif dan bersifat anjuran. Akan sangat naif jika ayat tersebut justru diartikan sebagai ajakan untuk berbuat terror meskipun ada sebagian elemen Muslim yang menjadikannya sebagai dasar bagi tindakan kekerasan yang legal.⁸

Jika terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan kondisi ketakutan di tengah public demi tujuan politis, sejarah Islam mencatat eksistensi aksi gerakan dari sebuah faksi sekte Ismailiyah yang terkenal dengan sebutan *Assassins*.⁹ Kelompok yang berdomisili di benteng-benteng pegunungan di sebagian besar wilayah Persia pada abad 11 – 13 H ini adalah sebuah organisasi politik pecahan dari aliran isma'iliyah yang membentuk sebuah perkumpulan rahasia dengan karakteristik sumpah setia tun-

7 Teks ayat tersebut adalah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1990), hal.

8 Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa ayat tersebut menjadi dasar bagi terorisme yang legal. Pendapat ini juga diadopsi oleh kelompok-kelompok garis keras pergerakan Islam seperti yang dimotori oleh Imam Samudera dan para pelaku Bom Bali lainnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan pada bagian lain di tulisan ini.

9 Istilah ini mengemuka dalam literatur-literatur sejarah Eropa tentang perang Salib. Assassins adalah terminology para sejarawan Perancis terhadap kelompok ini yang mengacu kepada kebiasaan mereka mengkonsumsi *Hashish* (sejenis ganja Afrika) sebagai medium ritual asketis. Ibn Khaldun menyebut kelompok ini dengan sebutan *Fidawiya*. Lihat H. A. R. Gibb & J. H. Kramers, *Concise Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 2001), hal. 48

duk pada perintah atasan dan mengadopsi dogma pembunuhan terhadap setiap musuh yang menjadi penghalang. Pada masa kepemimpinan Abu Mansur al-Idjli dan Mughirah ibn Said kelompok ini bahkan mendeklarasikan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin public adalah manifesto dari tujuan politik mereka. Diantara beberapa korban kelompok ini yang terkenal adalah para pemimpin Dinasti Abbasiyah seperti Nizam al-Mulk (485H-1092M) dan Sultan Malik Syah beberapa waktu kemudian.¹⁰

Walaupun istilah terorisme secara eksplisit jarang menjadi tema sentral dalam khazanah keilmuan tradisional Islam, bukan berarti sama sekali tidak ada konsep yang mungkin bersinggungan. Pengamatan lebih lanjut terhadap kajian tradisi legal Islam khususnya terkait konsep yang memperbincangkan kemaslahatan dan sanksi-sanksi ketertiban umum (*mu'amalah wa al-jinayah*) terdapat beberapa terminologi yang hampir parallel dengan terorisme. Konsep-konsep seperti *hirabah*, *qath' al-thariq*, serta *ahkam al-bughah* adalah beberapa dari contoh yang dapat disebutkan. Yang perlu digaris bawahi adalah fakta bahwa diskursus konsep-konsep ini cenderung bebas dari muatan politis mengingat dalam sejarahnya perkembangan wacana ini berasal dari individu-individu yang bebas dari pengaruh negara tetapi mendapat pengakuan otoritas dari masyarakat.¹¹ Sehingga, pembahasan konsepnya lebih fokus pada ketertiban umum atau dimensi *social harmony* ketimbang sudut pandang mempertahankan kekuasaan. Inilah yang menjadi factor pembeda dari pembahasan terorisme versi klasik dan kontemporer.

10 H. A. R. Gibb & J. H. Kramers, *Concise Encyclopedia of Islam*, hal. 48-49

11 Sherman A. Jackson, "Domestic Terrorism in the Islamic Legal Tradition", in *The Muslim World*, Fall 2001: 91, 3/4, hal. 294

A. Menyusun Diskursus Terorisme dalam Tradisi Keilmuan Islam Klasik

Penelusuran terhadap akar diskursus modern di kalangan Muslim umumnya dilakukan melalui metode analogi terhadap wacana serupa yang pernah dibahas oleh para pemikir-pemikir sebelumnya. Bidang kajian *Fiqh* (tradisi legal) biasanya menjadi subjek referensi utama. Setiap Muslim di setiap generasi meyakini bahwa setiap aspek kehidupannya harus senantiasa berdasar pada perintah Allah dalam al-Qur'an serta petunjuk Rasul-Nya melalui Sunnah. Tradisi kajian *Fiqh* bermain dalam domain bidang tersebut karena membahas tentang berbagai preskripsi apa yang harus dilakukan dan/atau ditinggalkan oleh setiap Muslim baik secara individu maupun kolektif dalam menjalankan keseluruhan aktifitas kesehariannya agar senantiasa berada dalam koridor naungan wahyu.

Terorisme memang sebuah fenomena yang baru. Namun jika diperinci melalui karakteristik dan criteria terminology nya akan tampak sebagai sebuah fenomena lama yang terulang dalam sejarah. Jika definisi terorisme versi Federal Bureau of Investigation nya AS kembali diulas, maka criteria dari aksinya adalah: *pertama*, pengerahan kekuatan secara illegal dalam aksi kekerasan. *Kedua*, menimbulkan korban dan kerugian serta kerusakan baik pada individu atau property. *Ketiga*, menimbulkan suasana ketakutan yang mengganggu jalannya pemerintahan dan ketertiban umum. *Keempat*, bertujuan politis dalam arti target sebenarnya menjangkau jauh ke luar sasaran aksi nyatanya.¹² Dari keempat elemen tersebut, point ketiga merupakan elemen yang paling mendasar. Timulnya suasana terror adalah factor dominan dalam terorisme.

Aksi kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau ketakutan yang mencekam di tengah masyarakat telah menjadi perhatian khusus dalam kajian klasik legal Islam dan konstruksi hukumnya dapat ditemukan dalam pembahasan seputar konsep *Hirabah*. Ibn

¹² B.L. Smith, *Terrorism in America*.

'Abd al-Barr (w.463/1070) seorang ahli Fiqh berkebangsaan Spanyol bermadzhab Maliki mendefinisikan Hirabah sebagai aksi penghadangan di jalan umum yang menyebabkan jalan itu tak aman untuk dilalui dan menyebarkan ketakutan dengan melakukan perampokan, pembunuhan dan hal lain yang dilarang oleh Tuhan.. baik pelakunya seorang Muslim atau bukan, merdeka ataupun budak, dan sadar ataupun tidak terhadap tujuan dari tindakannya dalam merampok ataupun membunuh.¹³ Al-Kasani (w.587/1191) dari madzhab Hanafi menyamakan *Hirabah* dengan *Qath' al-Thariq* dan mendefinisikannya sebagai aksi penyerangan terhadap pengguna jalan dengan tujuan mengambil harta secara paksa sehingga menciptakan ketakutan dan menyebabkan masyarakat tak bisa melalui jalan tersebut dengan bebas.¹⁴ Ahli Fiqh madzhab Syafi'i, Imam al-Nawawi (w.676/1277) menyatakan barang siapa yang mengangkat senjata dan menyebarkan terror di jalanan di dalam maupun luar kota harus ditindak oleh penguasa, sebab jika aksi itu dibiarkan maka kekuatan mereka akan bertambah serta kejahatan perampokan, pembunuhan serta suasana mencekam akan jauh lebih menyebar.¹⁵ Sedangkan Ibn Qudamah dari madzhab Hanbali mendefinisikan *Hirabah* sebagai aksi penghadangan bersenjata secara terbuka terhadap pelintas jalan di daerah padang pasir yang jauh dari pemukiman dengan tujuan merampok harta mereka.¹⁶ Ia menyatakan bahwa rekan semadzhab lainnya justru melangkah lebih jauh dengan juga mengkategorikan sebagai *Hirabah* pada setiap aksi penghadangan jalan yang dilakukan di

13 Ibn 'Abd al-Barr, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), hal. 582-583

14 Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada' al-Shana' fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Jilid 9, hal. 360.

15 Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1995), Jilid 22, hal. 227

16 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), jilid 10, hal. 315

manapun. Bahkan aksi yang dilakukan di jalanan dalam kota justru lebih menakutkan dan berdampak besar.¹⁷

Dari sampel definisi yang dikemukakan para tokoh yang mewakili empat madzhab besar dalam kajian Fiqh Islam di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama dari aksi *Hirabah* adalah menyebarnya rasa takut (*ikhafah*), ketidakberdayaan (*'adam al-ghauts*), dan tidak terdapatnya tindakan pengamanan efektif untuk menghentikannya (*ta'adzdzur al-ihtiraz*). Mengenai karakteristik ini, al-Nawawi membuat catatan bahwa para tokoh madzhab sebelumnya seperti Imam Malik dan Abu Hanifah membatasi *Hirabah* sebagai aksi yang dilakukan di daerah yang terisolir dan tak berpenghuni dengan alasan bahwa di daerah seperti inilah masyarakat pelintas merasa takut dan tak berdaya. Adapun aksi yang dilakukan di tengah pemukiman tak bisa dikategorikan *Hirabah* karena korban dapat dengan mudah meminta pertolongan.¹⁸ Alasan yang sama juga digunakan oleh Ibn Qudamah ketika membatasi *Hirabah* sebagai aksi yang dilakukan di tengah jalan padang pasir.¹⁹ Unsur penyebaran rasa takut dan ketidakberdayaan sebagai eksese utama juga tampak dalam rasionalisasi mayoritas ulama madzhab Syafi'i yang mengeksklusikan aksi perampokan dan pembunuhan dalam kota yang terpergok oleh public. Pengetahuan masyarakat terhadap detail aksi tersebut menghilangkan unsur terciptanya suasana terror dan ketidakberdayaan sehingga mengakibatkan aksi itu tidak terkategori sebagai *Hirabah*.²⁰

Sentralitas dari penyebaran rasa takut dan ketidakberdayaan sebagai factor utama dalam *Hirabah* juga ditekankan oleh para ahli Fiqh lainnya meskipun dengan penggunaan contoh kasus yang berla-

17 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10, hal. 303

18 Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 22, hal. 232

19 Ibn Qudamah, *al-Mughni*.

20 Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 22, hal. 233

wanan. Ibn Taymiyah (w.728/1328) menyatakan bahwa seandainya para pemberi sewa, dokter ataupun para pengrajin yang memancing orang untuk datang ke tempat bisnisnya kemudian membunuh kliennya secara diam-diam dengan maksud menguasai harta mereka juga dapat dikategorikan sebagai aksi *Hirabah*. Aksi kejahatan diam-diam ini menurut Ibn Taymiyah setara dengan aksi tanpa mempedulikan siapa yang memperhatikan sehingga menciptakan suasana takut serta tak ada tindakan pengamanan efektif untuk mengatasinya.²¹ Contoh lainnya juga dikemukakan oleh al-Kasani. Ia menyatakan bahwa mayoritas ulama madzhab Hanafi termasuk Imam Abu Hanifah sendiri melakukan pengecualian terhadap aksi yang dilakukan oleh perempuan. Anggapan umum bahwa kaum perempuan cenderung tidak menimbulkan aksi yang mengakibatkan rasa takut dan ketidakberdayaan menyebabkan aksi serupa yang dilakukan kaum hawa ini tidak bisa dikategorikan sebagai *Hirabah*.²²

Fatalitas efek dari aksinya membuat *Hirabah* berbeda dari tindakan pembunuhan umum yang sering disebut dengan *Qishash*. Dalam aturan umum *Qishash* yang diadopsi oleh mayoritas madzhab selain Hanafi, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Muslim terhadap non-Muslim hanya diberlakukan hukuman denda uang darah tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi hukuman mati terhadap pelakunya. Dalam *Hirabah*, semua pelaku diperlakukan sama tanpa memandang afiliasi keyakinannya. Perbedaan ini terjadi karena *Hirabah* bukan aksi inter-personal, sehingga jika meskipun korbannya adalah non-Muslim bukan berarti ada keterkaitan status personal kenon-Muslimannya. Bahkan tokoh sekeras Ibn Taymiyah yang cenderung antagonis terhadap non-Muslim menyuarakan hukuman yang keras bagi para pelaku *Hirabah* yang Muslim dengan korban non-Muslim. Hukuman tersebut menurutnya bukan atas nama kerabat dari si korban, tetapi harus atas nama otoritas negara

21 Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah*, Jilid 28, hal. 316

22 Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'l'*, Jilid 9, hal. 361

karena *Hirabah* adalah kejahatan terhadap kemaslahatan bersama publik.²³ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh tokoh-tokoh dari madzhab Maliki. al-Dardir (w.1201/1786) dan al-Sawi (w.1241/1825) mengisyaratkan bahwa jika seorang Muslim masuk ke dalam rumah non-Muslim secara paksa dan ternyata sang non-Muslim akhirnya berhasil membunuh perampok Muslim tersebut demi mempertahankan harta benda dan kehormata keluarganya, maka pembunuhan tersebut harus dikategorikan sebagai upaya mempertahankan diri.²⁴

Aksi *Hirabah* juga berbeda dengan kejahatan yang melibatkan penguasaan harta benda secara illegal yang dalam Fiqh dikenal dengan istilah *hadd* atau *Hudud*. Meski dalam contoh-contoh yang dielaborasi di atas tergambar bahwa faktor perampasan atau penguasaan harta benda secara illegal begitu dominan, bukan berarti *Hirabah* bisa disejajarkan dengan aksi-aksi kejahatan lain seperti perampokan bersenjata, penculikan atau perampasan (*banditry*). Motif penguasaan harta memang menjadi alasan mengapa pelaku terlibat dalam aksi *Hirabah*, tetapi itu bukan alasan utama yang menyebabkan aksi itu digolongkan sebagai *Hirabah*. Faktor meyebarinya rasa takut yang mencekam serta ketidakberdayaan adalah titik pembeda antara *Hirabah* dengan penguasaan harta benda secara illegal yang lazim disebut dengan istilah *ghasb*.

Dalam bukunya *al-Syarh al-Shagir*, Ahmad al-Dardir mengutip definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Hajib (w.646/1248) yang menyatakan bahwa *Ghasb* adalah aksi mengambil harta milik orang

23 Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah*, Jilid 28, hal. 311. Sebagian ulama Maliki menyebutkan bahwa eksekusi *Hirabah* ini merupakan "Hak Allah" yang berbeda dengan *Qishash* yang merupakan "Hak Adami", lihat al-Qadhi 'Abd al-Wahhab, *al-Ma'unah 'ala Madzhab 'Alim al-Madinah*, (Mekkah: Nizar M. al-Baz, 1995), jilid 2, hal. 1366

24 Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir*, 2:404, dan Ahmad al-Sawi, *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, (Cairo:al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t), jilid 2, hal. 404.

lain secara paksa dan illegal tetapi dengan tidak secara *Hirabah*.²⁵ Al-Dardir menggarisbawahi definisi ini sebagai sebuah pengertian yang ‘cacat’ mengingat memerlukan pengetahuan terlebih dahulu terhadap konsep *Hirabah*. Ia menyatakan bahwa seharusnya kelemahan ini dapat tertutupi apabila kata-kata “dengan tidak secara *Hirabah*” (*bi la hirabah*) diganti dengan kalimat “tidak menimbulkan ketakutan akan terbunuh” (*bi la khawfi qatlin*)²⁶. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa *Hirabah* terpisah dari *Ghasb* bukan pada elemen pengambilan harta bendanya melainkan terletak pada elemen adanya ketersebaran rasa takut. Penyebaran rasa takut ini tentu saja tidak terbatas pada korban saat kejadian tersebut di mana untuk itu si korban terpaksa memberikan harta bendanya. Efek besar dari *Hirabah* adalah karena aksinya juga menebarkan terror ke orang lain sehingga menghambat aktivitas dan ketertiban umum karena ancaman terhadap jiwa mereka.

Berdasarkan pemahaman ini, al-Dardir dan ulama madzhab Maliki setelahnya bahkan melangkah lebih jauh dalam pemikiran legal nya seputar *Hirabah*. Karakteristik inti *Hirabah* yang berupa menyebarkan rasa takut dan ketidakberdayaan juga ia terapkan pada aksi kejahatan lain meskipun motif penguasaan harta benda sama sekali absen di dalamnya. Secara eksplisit al-Dardir mendefinisikan *Hirabah* sebagai aksi memblokade jalan (*qath’ al-thariq*), menyebarkan terror di sana dengan menghilangkan hak masyarakat untuk melewatinya dengan bebas sekalipun tidak ada maksud untuk merampas harta benda mereka yang melewati jalan itu.²⁷ Komentator (pensyarah) al-Dardir, Ahmad al-Sawi memperjelas kalimat terakhir definisi al-Dardir dengan menekankan kembali bahwa sekalipun tujuan dari pelakunya adalah sebatas menghalangi masyarakat

25 Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir*.

26 Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir*.

27 Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir*.

untuk secara bebas bepergian di jalanan tersebut.²⁸ Komentator al-Dardir lainnya, Syams al-Din al-Dasuqi (w.1230/1815) bahkan lebih eksplisit lagi dalam penjelasannya. Ia mengemukakan bahwa *Hirabah* adalah aksi yang dilakukan oleh seseorang dalam menyebarkan rasa takut di jalanan dengan tujuan mencegah orang lain untuk berlalu-lalang secara aman dan bebas. Meskipun si pelaku tidak bermaksud untuk menguasai harta benda orang yang melewatinya, tetapi ia menyebarkan terror dan menyebabkan orang lain tidak dapat memanfaatkan jalan tersebut, maka si pelaku tetap dikenakan pasal *Hirabah*.²⁹ Al-Dasuqi dan juga tokoh-tokoh lain yang disebutkan sebelumnya juga mengembangkan karakteristik utama berupa penyebaran rasa takut dan ketidakberdayaan untuk melabeli aksi kejahatan lain yang memenuhi kriteria tersebut. Aksi-aksi seperti pembunuhan secara diam-diam seperti peracunan dan penggunaan obat-obat mematikan juga dikategorikan sebagai *Hirabah*. Bahkan baik al-Dardir, al-Sawi maupun al-Dasuqi tampak seakan mensinyalir aksi *state-terrorism* ketika mereka secara eksplisit mengaitkan *Hirabah* dengan merujuk pada tindakan tyrani gubernur-gubernur Mesir saat itu yang menyita harta benda rakyat, menahan gaji mereka dan menyerang pemukiman mereka sementara tidak ada satu pihak pun yang mampu menindak kejahatan itu.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Hirabah* adalah sebuah aksi kejahatan yang luar biasa. Konsep definisinya senantiasa dikembangkan oleh para ahli Fiqh untuk mengcover aksi criminal yang tensinya melebihi aksi-aksi kejahatan umum seperti pencurian, perampokan atau pembunuhan. *Hirabah* memiliki cakupan yang lebih besar mengingat eksesnya yang melahirkan suasana

28 Ahmad al-Sawi, *Bulghat al-Salik*, hal. 403

29 Syams al-Din al-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Cairo: Dar al-Fikr, t.t), jilid 4, hal. 348

30 Syams al-Din al-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi*, dan Ahmad al-Sawi, *Bulghat al-Salik*, hal. 404

terror dan ketidakberdayaan di tengah masyarakat. Kondisi ini hampir identik dengan konsep yang melekat pada terorisme. Ia adalah kejahatan luar biasa yang melampaui batasan-batasan aksi kejahatan pada umumnya.

Konsekuensi hukuman bagi para pelaku *Hirabah* pun tergolong sangat berat. Rasionalisasi dari beratnya hukuman ini menurut Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi seorang ahli Fiqh dari madzhab Maliki adalah karena *Hirabah* adalah sebuah aksi yang sangat menghancurkan karena menghalangi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perdagangan adalah sumber terbesar mata pencaharian umum masyarakat dan dibutuhkan keamanan dan kebebasan akses untuk terlibat didalamnya. Namun ketika akses jalan tersebut dihantui oleh terror maka masyarakat akan berhenti beraktifitas dan terpaksa tinggal dalam rumah, perdagangan pun terhenti dan penghidupan pun terganggu. Oleh karena itu, menurut al-Qurthubi, Tuhan mengatur hukuman terberat bagi aksi *Hirabah* demi tujuan memermalukan dan memberi efek jera bagi para pelakunya sehingga pintu-pintu penghidupan pun terus terbuka.³¹

Bentuk hukuman terkeras yang dirujuk oleh al-Qurthubi tertera dengan jelas dalam sebuah ayat al-Qur'an yang merupakan epicentrum dari keseluruhan kajian tentang *Hirabah*. Ayat tersebut berbunyi:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang berat. (Q.S. Al-Maidah/5: 33-34)

Teks tentang hukuman *Hirabah* ini sangat gamblang dan

31 Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid 3, hal. 88

para ahli Fiqh sepakat dengan tafsiran literal dari ayat tersebut. Perbedaan pendapat terjadi setidaknya di seputar tiga hal. *Pertama*, dalam masalah pemaknaan kata sambung “aw” yang berarti “atau” yang memisahkan masing-masing dari empat hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut. Mayoritas ulama madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa kata “aw” mengindikasikan urutan sekuensial (*tartib*) dalam penjatuhan hukuman. Jika pelaku *Hirabah* melakukan pembunuhan tanpa perampasan harta maka hukumannya adalah dibunuh. Jika ia melakukan pembunuhan yang disertai perampasan harta maka dibunuh dan disalib. Jika pelaku hanya merampas harta tetapi tidak membunuh maka kaki dan tangannya dipotong secara menyilang, dan jika pelaku *Hirabah* sama sekali tidak melakukan pembunuhan atau perampasan harta maka hukumannya adalah diasingkan.³² Sedangkan bagi madzhab Maliki, kata “aw” dalam ayat tersebut berimplikasi makna pilihan hukum (*takhyir*) yang diserahkan pada otoritas hakim. Dalam pandangan madzhab ini pelaku *Hirabah* bisa dijatuhi hukuman dibunuh dan disalib walaupun tidak melakukan pembunuhan atau perampasan harta. Alasannya adalah karena aksi ini menimbulkan penyebaran rasa takut, ketidakberdayaan serta menjadi biang dari kejahatan besar lainnya. Imam Malik sendiri bahkan pernah menyatakan bahwa seseorang yang melakukan aksi *Hirabah* tetapi tidak melakukan pembunuhan akan lebih menyebarkan rasa ketakutan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat dibanding orang yang melakukan kejahatan pembunuhan biasa.³³

Perbedaan pendapat *kedua* terletak pada batasan berapa banyak harta yang dirampas sehingga pelaku *Hirabah* bisa dikenai sanksi amputasi menyilang. Dalam hukum pencurian umum, seseorang dikenai sanksi hukuman potong tangan jika harta yang di-

32 Ala’ al-Din Abu Bakr ibn Mas’ud al-Kasani, *Bada’i’*, Jilid 9, hal. 370-371

33 Malik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid 4, hal. 428

curinya melebihi batas (*nisab*) seperempat Dinar. Apakah batasan yang sama juga berlaku pada jumlah harta yang dirampas dalam aksi *Hirabah*? Ulama Syafi'iyah,³⁴ Hanbaliyah³⁵ dan mayoritas Hanafiyah³⁶ dengan beberapa kualifikasi menetapkan batas yang sama dengan kasus pencurian umum. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat tidak ada batasan khusus, karena bagi mereka siapa pun pelaku *Hirabah* adalah layak untuk dikenai sanksi amputasi terlepas dari berapa pun jumlah harta yang mereka rampas.

Perbedaan *ketiga* terletak pada pertanyaan apakah para pendukung aksi *Hirabah* yang tidak terlibat langsung dalam aksi pembunuhan dan/atau perampasan harta juga harus dihukum sama dengan pelaku yang terlibat langsung? Madzhab Syafi'i berpendapat hanya para pelaku yang terlibat langsung lah yang dapat dikenai hukuman *Hirabah*³⁷. Sedangkan Madzhab Hanbali, Hanafi dan Maliki menetapkan bahwa semua yang terlibat dalam aksi *Hirabah* mendapatkan hukuman yang sama terlepas dari apakah diantara mereka ada yang tidak terlibat dalam pembunuhan ataupun perampasan harta.³⁸

Dalam kasus pertobatan dari aksi *Hirabah* hampir tidak terjadi perbedaan pendapat. Semua madzhab sepakat dalam menafsirkan ayat berikutnya yang mengimplikasikan bahwa bila seseorang pelaku *Hirabah* bertobat sebelum tertangkap dengan menunjukkan penyesalan dan kesungguhan hati untuk berubah maka sanksi wajib

34 Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 22, hal. 233

35 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10, hal. 312-313

36 Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'li*, Jilid 9, hal. 363

37 Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, lihat juga Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid 13, hal. 363

38 Al-Mawardi, *al-Hawi*, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10, hal. 308, Malik ibn Anas, *al-Mudawwanah*, hal. 430

yang berupa dibunuh, disalib, diamputasi atau diasingkan kemudian ditanggihkan dan menjadi domain “Hak Tuhan” (*haqq Allah*) untuk memaafkannya. Walaupun demikian, ini bukan berarti hak-hak sipil (*haqq adamy*) dari si korban *Hirabah* terabaikan. Korban masih bisa mengajukan tuntutan eksekusi dan penggantian hak milik yang terampas.³⁹

Dari sekian pembahasan panjang di atas tergambar jelas bahwa keterkaitan erat antara konsep kejahatan *Hirabah* dalam diskursus legal klasik Islam dengan terorisme dalam wacana modern terletak pada unsur utama berupa menyebarkan rasa ketakutan, suasana terror, dan ketidak berdayaan di tengah kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana dengan unsur tujuan politis yang juga merupakan karakteristik utama dari terorisme? Adakah konsep *Hirabah* juga menyinggung tentang motif intrinsic politis sebagai unsur utamanya?

Pada masa kekuasaan Umayyah dan awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, setiap perlawanan terhadap kekuasaan yang melibatkan aksi kekerasan seringkali diredam dengan menggunakan hukuman *Hirabah* yang keras ini.⁴⁰ Beberapa ahli Fiqh di abad-abad awal Islam juga menerapkan label *Hirabah* pada kelompok bersenjata yang berkonspirasi melakukan aksi-aksi kekerasan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah dan sistem pemerintahan Islam.⁴¹ Namun penerapan sanksi *Hirabah* terhadap aksi pemberontakan politis seringkali didasari oleh motif dendam dan penumpasan. Sehingga pada perkembangan berikutnya para ahli Fiqh memformu-

39 Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 22, hal. 242-243, Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada' l'*, Jilid 9, hal. 373-374, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10, hal. 314-315, dan Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir*, 2:404-405

40 Sherman A. Jackson, “*Domestic Terrorism in the Islamic Legal Tradition*”, hal. 302.

41 Lihat al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid 1, hal. 508-510

lasikan sebuah hukum baru yang memisahkan aksi pemberontakan politis dari *Hirabah*. Konsep hukum ini kemudian dikenal dengan istilah *Ahkam al-Bughat*.

Dasar dari formulasi hukum *Bughat* ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh khalifah Ali ibn Abi Thalib terhadap para penentangannya⁴² serta mengambil dalil dari al-Qur'an 49: 9-10.⁴³ Berdasarkan formulasi hukum ini pemberontakan hanya perlu untuk diredam, para pemberontak yang tertangkap tidak boleh dibunuh ataupun disiksa, dan setelah perlawanan berakhir dan para pemberontak bertaubat maka mereka pun dibebaskan dengan tanpa hukuman. Mereka tidak dibebaskan tanggung jawab atas aksi pembunuhan atau perusakan property selama pemberontakan berlangsung. Mereka hanya dikenai hukuman atas kejahatan yang terjadi di luar tujuan pemberontakan seperti pemerkosaan misalnya.⁴⁴

Setidaknya terdapat dua faktor utama yang membuat aksi pemberontakan (*Baghy*) sama sekali berbeda dengan aksi *Hirabah* dalam kacamata hukum Islam. *Pertama*, bahwa aksi pemberontakan dalam Islam biasanya berdasarkan pada adanya *ta'wil* atau interpretasi berbeda yang dapat diterima setidaknya di kalangan pemberontak sendiri. Jika pemberontak berpendapat bahwa *Ta'wil* mereka dalam melaksanakan aksi berlandaskan oleh semangat *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* dan semangat menjalankan ke-

42 Khalifah Ali ibn Abi Thalib tidak memberikan hukuman terhadap para sahabat yang menentang pemerintahannya. Perang Jamal yang disebabkan oleh pemberontakan Thalhah, Zubair dan 'Aisyah berhasil diredam dan Ali tidak memberikan hukuman terhadap 'Aisyah. Begitu pula terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Gubernur Syams Muawiyah Ibn Abu Sufyan ataupun kaum Khawarij. Lihat Sherman A. Jackson, "*Domestic Terrorism in the Islamic Legal Tradition*".

43 Ayat tersebut berbunyi :

44 Khaled Abou El Fadl, "*Ahkam al-Bughat: Irregular Warfare and the Law of Rebellion in Islam*", dalam J.T. Johnson and John Kelsay (eds.), *Cross, Crescent and Sword: The Justification and Limitation of War in Western and Islamic Traditions*, (New York: Greenwood Press, 1990), hal. 153, 160

wajiban mereka sebagai Muslim, maka perlawanan mereka tidak dapat dikategorikan ke dalam aksi *Hirabah*.⁴⁵ Kedua, aksi pemberontakan harus memenuhi faktor kesiapan secara kekuatan yang ditandai oleh kecukupan jumlah tentara dan persenjataan. Para ahli Fiqh berbeda pendapat mengenai batasan jumlah ini. Al-Qarafi mensinyalir bahwa jumlah minimal tentara yang terlibat adalah sepuluh personel. Namun ia menggarisbawahi bahwa yang menjadi pertimbangan utama sebenarnya bukan terletak pada jumlah melainkan pada dukungan. Semakin banyak sebuah gerakan pemberontakan mendapat dukungan berarti semakin diterima motif *ta'wil* utama dari gerakannya. Dan oleh karenanya pemberontakan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam *Hirabah*. Sebaliknya, jika jumlah personel semakin sedikit maka menandakan legitimasi dari gerakannya semakin berkurang dan semakin dekat kepada kategori *Hirabah*.⁴⁶

B. Diskursus Terrorisme di Tengah Masyarakat Muslim Modern

Beberapa kelompok yang kini memegang otoritas kekuasaan di sebagian wilayah dunia pernah ditulis dalam wacana sejarah sebagai teroris. Viet Cong di Vietnam, Tentara Republik Irlandia, Sandinista di Nicaragua bahkan Kongres Nasional Afrika pimpinan Nelson Mandela serta tokoh-tokoh penggagas Republik Islam Iran pernah dicap dengan label 'penyebar terror'. Kelompok-kelompok ini memang menggunakan kekerasan sebagai elemen gerakan mereka. Aksi kekerasan tersebut dilabeli teroris oleh pihak rival penguasa yang mereka lawan, tetapi bagi mereka aksi itu justru merupakan sebuah epic perjuangan yang kemudian menjadi bagian narasi dari

45 Khaled Abou El Fadl, "*Ahkam al-Bughat:..*", hal. 157-158

46 Khaled Abou El Fadl, "*Ahkam al-Bughat:..*", hal. 160. Lihat juga Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Dzakirah*, (Dar al-Gharb al-Islami, 1994), jilid 12, hal. 6.

sejarah nasional mereka.⁴⁷

Dalam kasus di atas, labelisasi terorisme pada fase modern lebih merupakan sebuah pertarungan wacana. Semakin banyak sebuah wacana konsep mempengaruhi audiens maka konsep itulah yang menjadi persepsi umum publik. Fenomena yang sama terjadi di internal masyarakat Muslim. Berbagai wacana konsep tentang terorisme banyak disampaikan oleh para tokoh autorotatif dari bermacam latar belakang aliran pemikiran yang berbeda banyak mempengaruhi pandangan masyarakat Muslim. Pergeseran peta dominasi dan peran Islam di kancah global juga berkontribusi signifikan dalam pembentukan persepsi masyarakat Muslim terhadap konsep terorisme.

Dalam konsep *Hirabah* misalnya, dimana awal yang menjadi fokus adalah ancaman ketersebaran terror dan ketidakberdayaan pada masyarakat umum, terjadi perluasan persepsi yang juga mencakup pada aksi-aksi yang mengancam kehormatan dan pemberlakuan syari'ah Islam sebagai system legal. Tokoh yang mengembangkan konsep *Hirabah* ke arah orientasi baru ini adalah Muhammad Abduh (w.1905) dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha (w.1935). Dalam *Tafsir al-Manar*, keduanya mendefinisikan *Hirabah* sebagai aksi kekerasan yang dilakukan di wilayah kekuasaan Islam yang mengancam kehidupan, property dan kehormatan umat Muslim dengan bersembunyi di balik selimut kekuasaan dan menolak untuk tunduk pada hukum syari'at.⁴⁸ Dalam kalimat yang lain yang lebih spesifik, Ridha merujuk *Hirabah* kepada aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terorganisir secara rapi dengan tujuan untuk mencegah aplikasi hukum syari'at bagi mereka

47 Richard C. Martin, (eds.), *Encyclopedia of Islam...*, hal. 691-692

48 Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1946), jilid 6, hal. 366

dan orang lain.⁴⁹ Munculnya orientasi baru dari definisi *Hirabah* ini sangat rasional jika melihat latar belakang konteks kecenderungan zaman saat kedua tokoh ini hidup. Saat itu, pengaruh kekuasaan dan aplikasi syari'at Islam tengah dalam proses tergerus oleh pengadopsian hukum-hukum Barat yang dilakukan oleh para penguasa Muslim.⁵⁰

Pendapat Abduh dan Ridha ini kemudian banyak diikuti oleh tokoh-tokoh berikutnya. Syaikh Muhammad Sayyid al-Tantawi mantan Mufti besar Mesir dan Rektor Universitas al-Azhar mendefinisikan *Hirabah* sebagai aksi yang dilakukan dengan tujuan menentang system dan aturan yang telah berlaku atas umat.⁵¹ Syaikh Wahbah al-Zuhaili dari Syiria juga menulis bahwa satu-satunya perbedaan antara *Hirabah* dan *Baghy* adalah bahwa *baghy* merupakan penentangan terhadap penguasa yang lebih didasari oleh pertimbangan dalil dan tafsir yang berlandaskan kuat pada syari'ah dan pertimbangan keagamaan sedangkan *Hirabah* mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.⁵² Baik al-Tantawi maupun al-Zuhaili tampak meneruskan tradisi wacana fiqh klasik dalam konsep *Hirabah* dalam menyikapi fenomena aksi kekerasan politik kontemporer dengan pengaruh orientasi baru dalam penafsirannya.

Inspirasi orientasi baru penafsiran Abduh dan Ridha tetapi dengan keluar dari pendekatan wacana fiqh klasik tercermin dalam

49 Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, hal. 358

50 Konteks ini dapat dengan mudah dipahami jika membaca keseluruhan pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat tentang *Hirabah*. Lihat Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, hal. 352-368

51 Muhammad Sayyid al-Tantawi, *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1996), jilid 8, hal. 123

52 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid 6, 128

konsep Sayyid Qutb tentang *Hirabah*. Mantan pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir dan inspirator gerakan Muslim militan ini mendefinisikan *Hirabah* sebagai aksi pembangkangan yang dilakukan secara terorganisir terhadap otoritas kekuasaan Muslim yang memerintah sesuai dengan syari'at Islam, aksi meneror populasi Muslim dan menimbulkan kerusakan pada diri, property dan kehormatan umat Islam. Dengan keleluasaan tafsirnya, Qutb menetapkan karakteristik utama dari *Hirabah* adalah pembangkangan terhadap otoritas Muslim yang memerintah dengan berpegang teguh pada landasan syari'ah.⁵³ Sehingga, siapapun yang melakukan aksi pemberontakan terhadap otoritas pemerintahan yang tidak berdasar pada hukum Islam maka tidak dapat dikenakan sanksi *Hirabah*, sebab berdasarkan al-Qur'an 5:33-34 aksi tersebut bukan dilakukan dalam rangka melawan Allah dan Rasul-Nya melainkan terhadap pemerintah yang justru menegasikan dan menentang hukum Allah.⁵⁴ Dari titik ini, Qutb kemudian berlanjut pada konsep bahwa otoritas muslim yang legitimate tidak sinonim dengan pemerintahan formal negara tetapi juga bisa diartikan sebagai kolektivitas informal yang sepakat membangun dan melaksanakan aturan bersama sesuai dengan hukum Islam. Dengan interpretasi ini, Qutb mampu membangun sebuah rasionalisasi dalam mendelegitimasi pemerintahan Mesir pada masanya dan mendeklarasikan pemerintahan tersebut justru sebagai pelaku aksi penebaran terror atau *Hirabah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an. Alasannya, menurut Qutb, tidak ada lagi bentuk aksi penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang lebih besar daripada pemberangusan atau penghalangan terhadap berlakunya hukum Islam.⁵⁵

53 Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1973), jilid 2, hal. 878

54 Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dhilal al-Qur'an*, jilid 2, hal. 879

55 Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dhilal al-Qur'an*.

Pemikiran-pemikiran dari Sayyid Qutb inilah yang kemudian mengilhami ideology dari gerakan-gerakan militant Islam berikutnya. Hegemoni dominasi kekuatan budaya Barat yang menyebarkan pengaruhnya di dunia Islam dan menempatkan umat Muslim sebagai sub-ordinat menimbulkan gambaran dikhotomis di benak beberapa elemen Muslim. Negara-negara Barat berikutan negara Muslim yang sekular mereka golongkan ke dalam poros *daarul kuffar* yang tengah meneror dan melakukan aksi *Hirabah* terhadap *daarus salam* sehingga menjadikan setiap jengkal tanah di muka bumi ini menjadi ajang perang atau *daarul harb*.⁵⁶ Dalam dua belahan peradaban yang ekstrem tersebut, doktrin “hidup mulia atau mati syahid” (*‘isy kariman aw mut syahidan*⁵⁷) menjadi landasan dari aktivis gerakan perlawanan Islam radikal yang popular sejak tahun 1960-an dan bahkan sejak masa kolonialisme. Militansi kader-kader mereka dibangun atas dasar doktrin ini serta sikap kebencian dan permusuhan terhadap peradaban modern yang diwakili negeri-negeri Barat dan Amerika Serikat. Bagi mereka, menjadi seorang Muslim yang baik, saleh dan beriman berarti wajib ‘*ain* menolak bahkan memerangi bangsa-bangsa yang telah melakukan ‘teror’ terhadap mereka.⁵⁸

Menurut laporan penelitian Hendropriyono, ideology aliran keras ini berasal dari kelompok Wahabi yang kemudian banyak bersentuhan dengan ideology Ikhwanul Muslimin dan Salafi dari

56 Bilveer Singh dan Abdul Munir Mulkhan, *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia: Jejak Sang Pengantin Bom Bunuh Diri*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publishing, 2012), hal. 71

57 Doktrin atau pepatah yang begitu terkenal di kalangan kaum muda Muslim ini adalah bagian kalimat yang juga dikatakan oleh Sayyid Qutb pada detik-detik menjelang eksekusi hukuman gantungnya pada tahun 1966. Kata-kata motivasi ini awalnya adalah ungkapan bijak dari Asma binti Abu Bakar kepada anaknya Abdullah ibn Zubair untuk membesarkan hatinya ketika menghadapi kesulitan dalam peperangan melawan musuh. Lihat Syafi’I Anwar, “Dekonstruksi Fatalisme Keagamaan”, *Jawa Pos*, 26 September 2009, hal. 1, 15.

58 Bilveer Singh dan Abdul Munir Mulkhan, *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia*.

Mesir yang banyak dikaitkan dengan aktifitas Jihad global. Jihad global kaum Wahabis tersebut bersinergi dengan Jamaat Islami Pakistan dalam gagasan Maududi bersamaan dengan pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb, dan al-Qaeda dengan Osama bin Laden nya. Mereka mengagung-agungkan kekerasan atas nama *Jihad fi Sabilillah* sebagai jawaban atas kekerasan serupa dan perlakuan tidak adil oleh negara-negara Barat dan sekutu Amerikanya. Kekerasan dan konflik yang muncul di Afghanistan, Irak, Palestina, dan sebelumnya di Cechnya, Bosnia, hingga Thailand Selatan dan Moro ditempatkan oleh kaum Jihadis sebagai bukti terror tirani dan ketidakadilan peradaban Barat dan Amerika beserta sekutunya terhadap komunitas Muslim. Kekerasan harus dibalas dengan kekerasan dan terror harus dijawab dengan terror karena ini kondisi kekinian menurut mereka adalah momentum perang antara *daarus-salam* dengan *daarul kuffar*. Doktrin *istisyhad* (mencari mati syahid) antara lain dengan menebar terror seperti serangan bom bunuh diri kemudian bersemai dan menemukan habitatnya. Menurut mereka, *istisyhad* adalah bagian integral dari Jihad dan sasarannya tidak terbatas pada target utama bangsa Barat tetapi juga kelompok mana saja termasuk Muslim yang tidak secara tegas menyatakan menolak peradaban Barat. Dalam kondisi tertentu, sasaran-sasaran tersebut adalah halal dibunuh dan hartanya halal dirampas.⁵⁹

Kampanye perang melawan terror yang dicanangkan pemerintahan George W. Bush Junior sebagai reaksi terhadap serangan 11 September 2001 yang memporakporandakan gedung menara kembar WTC dan the Pentagon serta persepsi komunitas internasional dalam menyikapi peristiwa tersebut sangat mempengaruhi bagaimana konsep terorisme didefinisikan akhir-akhir ini. Pihak tersangka utama, al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden, Taliban dan organisasi serta komunitas Muslim yang berafiliasi dengannya den-

59A. M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 76

gan segala aktifitas agresifnya dipandang sebagai representasi nyata dari teroris dan aksi terorisme modern.⁶⁰

Meski sempat beberapa kali menolak keterlibatan langsungnya dalam kejadian 11 September, Osama bin Laden sendiri di lain pihak justru mengapresiasi tinggi aksi tersebut. Ia menyebut aksi pembajakan pesawat secara simultan dan kemudian menabrakannya ke gedung-gedung symbol kebanggaan AS sebagai aksi heroik yang menjawab 'kesombongan' peradaban Barat dan dukungannya terhadap terhadap terror serta penindasan atas masyarakat Muslim. Dalam pernyataannya beberapa waktu setelah peristiwa tersebut Osama bin Laden mengatakan:

Amerika diberi peringatan untuk kesekian kalinya, tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Maka dengan taufik Allah, Mujahidin berhasil melancarkan operasi *istisyhad* yang gemilang. Dalam operasi itu kapal tempur penghancur milik Amerika USS Cole berhasil dihajar Mujahidin di laut 'Adn. Ini merupakan tamparan yang amat menyakitkan bagi tentara Amerika... Mereka (mujahidin) dalam aksi yang gemilang, yang belum pernah ada tandingannya, dengan menggunakan pesawat terbang musuh berhasil menghajar berhala kebanggaan Amerika. Mereka berhasil menohok Departemen Pertahanan Amerika tepat di ulu hatinya, dan berhasil merontokkan ekonomi Amerika tepat di jantung ekonomi mereka. Jadilah Amerika tersungkur, tumbanglah segala arogansi mereka selama ini, terbakarlah langit New York...⁶¹

Osama bin Laden tentu tidak sendiri sendirian dalam mengadopsi pandangan ini. Loyalis dan simpatisan yang berafiliasi dengan organisasi yang dipimpinnya juga berbagi persepsi yang sama. Bagi mereka, aksi 11 September 2001 adalah sebuah perjuangan yang

60 Richard C. Martin, (eds.), *Encyclopedia of Islam...*

61 Transkrip rekaman pembicaraan Osama bin Laden yang dikutip oleh Imam Samudera dalam bukunya *Aku Melawan Terroris*, (Solo: Jazera, 2004), hal. 185-186

mulia, pengorbanan demi kejayaan agama, *Jihad fi sabilillah*. Aksi itu adalah sebuah pengorbanan yang berbalas surga karena pelakunya mati dalam keadaan syahid dan Osama bin Laden kemudian menekankan bahwa setiap Muslim harus lebih sering melakukan aksi-aksi serupa, melancarkan operasi-operasi syahid karena aksi-aksi itu dapat menjadi sumber terror terbesar yang menggentarkan musuh.⁶² Dalam konteks ini, pendapat ekstrim yang tercermin pada pernyataan Osama bin Laden tersebut merupakan tafsiran langsung dari satu-satunya ayat al-Qur'an yang secara langsung dan eksplisit menggunakan kata *irhab* (terror).⁶³ Ayat tersebut memang berupa titah himbauan bagi umat Muslim untuk melakukan langkah-langkah yang bisa 'meneror' musuh, membuat mereka gentar dan takut sehingga tidak akan berbuat hal-hal yang menimbulkan madharat bagi umat Islam. Dalam 'kamus' Osama bin Laden dan pengikutnya, sebuah aksi jika menjadi terror bagi musuhnya maka akan tergolong sebagai sebuah aksi *isytiyyhad* dalam ber-Jihad. Dalam statement yang lain Osama bin Laden mengatakan "Kalau Memang mengobarkan Jihad melawan Yahudi dan Amerika untuk membebaskan al-Aqsha dan Ka'bah sebagai tindakan criminal, maka biarlah sejarah menjadi saksi bahwa saya adalah criminal."⁶⁴

Persepsi tentang terorisme dengan nada yang sama juga diungkapkan oleh Imam Samudera, tersangka pelaku Bom Bali yang telah dieksekusi mati. Pandangan pribadi tentang latar belakang aksinya dituangkan ke dalam sebuah buku dengan judul yang provokatif: "*Aku Melawan Teroris!*". Judul tersebut dengan jelas merefleksikan persepsinya bahwa yang merupakan teroris adalah justru target-target yang dia serang dalam serangkaian aksinya. Di sisi lain,

62 A. M. Hendropriono, *Terorisme...*, hal. 77-79

63 QS. Al-Anfal (8): 60

64 Ahmad Dumyathi Bashori, (ed), *Akhir Petualangan Osama Melawan Amerika*, (Bandung: Mizan, 2011), hal. 196

ia justru mengklaim dirinya sebagai 'pejuang' di jalan Allah, seorang mujahid. Imam Samudera mengatakan: "Jihad Bom Syahid Bali mesti terjadi sebagaimana mesti terjadinya *isytiyhad* Kenya dan Tanzania, Yaman, WTC dan lain-lain. Latar belakang bom syahid Bali adalah sama dengan yang telah disebutkan di atas. Bahwa ini adalah perlawanan, bahwa ini adalah pembelaan, bahwa ini adalah *jihad fi sabilillah*".⁶⁵

Di banyak bagian dalam bukunya, Imam Samudera seringkali mengungkapkan rasionalisasi pembenaran terhadap aksi-aksinya. Dia juga memback-up alasan tersebut dengan dilengkapi dalil-dalil yang diambil dari teks al-Qur'an, Hadits serta pendapat ulama yang mendukung penafsirannya. Pada satu titik tertentu Imam Samudera bahkan berani menyalahkan pendapat ulama lain sekaliber Yusuf Qardhawi misalnya yang tidak sejalan dengan argumentasinya:

Pembatasan bom syahid hanya boleh di Palestina, atau yang semisal (daerah konflik lainnya), menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi kurang memahami atau menyadari hakikat Perang Salib yang bersifat global. Di mana, dalam keadaan umat Islam terjajah, setiap jengkal tanah di muka bumi ini dapat dikatakan sebagai tempat konflik. Dengan sendirinya, segala syari'at perang dalam Islam dapat diaplikasikan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada. Dalam menghadapi Perang salib, al-Qaeda telah beberapa kali mengadakan *istisyhad* global.⁶⁶

Menyadari konsekuensi global yang mungkin timbul dari persepsi ekstrim seperti yang diadopsi oleh Osama bin Laden dan pengikutnya, Organisasi Konferensi Islam (*Organization of Islamic Conference / OIC*) justru mengadopsi sebagian besar definisi terorisme yang dikemukakan oleh pihak Amerika Serikat. Di saat Osama bin Laden mencari dukungan Muslim internasional untuk menjustifikasi serangan di New York dan Pentagon, OKI pada tanggal 10 Ok-

65 Imam Samudera, *Aku Melawan Terroris*, hal. 188

66 Imam Samudera, *Aku Melawan Terroris*, hal. 185

tober 2001 merilis pernyataan yang mengutuk keras aksi tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan brutal yang anti kemanusiaan. OKI juga menekankan bahwa aksi tersebut sangat bertentangan dengan semangat dasar ajaran Islam yang menolak segala macam agresi, menjunjung tinggi perdamaian dan ko-eksistensi serta sangat menghargai kehidupan dan menolak pembunuhan terhadap pihak yang tak bersalah.⁶⁷ Walaupun demikian, OKI juga berusaha untuk mengeksklusikan beberapa gerakan perjuangan murni yang dilakukan oleh berbagai komunitas Muslim dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan dari definisi global tentang terorisme. Pada tahun 2002 misalnya, para menteri luar negeri OKI menolak gagasan untuk mengkategorikan pejuang Palestina sebagai teroris dalam perjuangan mereka membebaskan diri dari okupasi Israel. Selanjutnya, pada tahun 2009 OKI juga merilis sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa terorisme tidaklah berkaitan dengan isu keamanan global melainkan hanya merupakan problem ideologis dengan manifestasi politis dan cultural yang spesifik.⁶⁸

Persepsi lain yang juga berusaha mengakomodasi definisi terorisme yang dianut dunia internasional dengan tanpa mengenyampingkan usaha-usaha perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa kalangan komunitas Muslim juga tampak dalam sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang tokoh ulama pemikir Mesir Syaikh Shalih ibn Ghanim al-Sadlan. Dalam sebuah wawancaranya dengan harian *al-Syarq al-Awsath*, al-Sadlan mengemukakan bahwa terorisme atau *al-Irhab* bisa mempunyai dua wajah. Jika melihat pada ayat QS. 6:80, menurutnya, *al-Irhab* mempunyai wajah yang positif jika diartikan sebagai mempersiapkan diri, menambah kekuatan, latihan senjata (militer), membuat senjata dan menyiapkan kekuatan yang membuat *irhâb terhadap musuh* sehingga

67 Ishtiaq Hossein, "The Organization of Islamic Conference: Nature, Role and the Issues", in *Journal of Third World Studies*; Spring 2012; 29, 1, hal. 304

68 Ishtiaq Hossein, "The Organization of Islamic Conference...".

tidak lancang terhadap agama, aqidah dan individu-individu umat. “Ini adalah perkara yang dituntut (diinginkan) keberadaannya pada kaum muslimin”, lanjutnya.⁶⁹ Sedangkan *Irhab* menjadi berwajah sangat negatif dan destruktif jika aksi ini berupa penyerangan terhadap pihak-pihak yang dalam keadaan aman, tentram dan lapang yang tidak mempunyai urusan dengan masalah kekuatan, peperangan dan kezholiman, lalu disergap secara tiba-tiba dengan pembunuhan, perusakan harta benda, menimbulkan berbagai macam ketakutan, terlepas pihak target tersebut adalah dari kalangan orang kafir atau dari kalangan kaum muslimin. Al-Sadlan juga memberikan beberapa pengecualian terhadap aksi penyerangan dalam situasi konflik terbuka yang tidak terikat oleh perjanjian internasional.⁷⁰

Berbeda dengan persepsi-persepsi di atas, kelompok moderat umumnya menolak segala preskripsi pembenaran terhadap penggunaan aksi kekerasan dan teror atas nama agama. Khaled Abou El Fadl, seorang professor Hukum Islam dari UCLA, dalam bukunya *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* mewanti-wanti kaum Muslimin agar waspada terhadap kelompok-kelompok militan yang menafsirkan makna Jihad secara serampangan dan tidak sesuai dengan semangat al-Qur’an serta misi otentik Islam sebagai agama kemanusiaan. Kelompok-kelompok inilah yang tak ubahnya ibarat “maling besar” yang telah mengkorupsi makna Jihad yang suci menjadi kalam sehingga membuat imej Islam sebagai agama

69 Ungkapan Syaikh Shalih ibn Ghanim al-Sadlan dalam wawancara dengan harian al-Syarq al-Ausath ini dapat ditemukan dalam sebuah artikel online jihadbukankenistaan.com, “Makna Terorisme dalam Syari’at Islam”, dipost pada tanggal 06 Februari 2009 di <http://jihadbukankenistaan.com/terorisme/makna-terorisme-dalam-syari%E2%80%99at-islam.html>, diakses tanggal 15 April 2014

70 Pendapat serupa juga dianut oleh Ismail Luthfi dalam bukunya *Al-Irhab wa al-’Unfu wa al-Tat}{arruf **Fi> Mizân al- Syar’i*** hal. 9 dan ‘Ali bin ‘Abdul ‘Azîz Asy-Syibli dalam bukunya *Al-Judhûr al-Târikhiyyah li Haqî>qat al-’uluww wa al-Tat}{arruf wa al-Irhab wa al-’Unfi* hal. 9-10. Lihat jihadbukankenistaan.com, “Makna Terorisme dalam Syari’at Islam”.

rahmat menjadi begitu suram dan menempatkan kaum Muslim secara umum dalam gambaran yang stereotip.⁷¹ Menurut El Fadl, jihad dalam Islam berorientasi spiritual dan etika kerja material berbasis kemanusiaan. Jadi bukan pada tafsiran yang elitis dan fatalistic. Karena itu penting bagi para ulama modern dan kaum intelektual bekerja bahu-membahu membebaskan umat dari fatalisme keagamaan yang sempit dan parochial.⁷²

Dengan alasan yang sama, Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa pembenaran terhadap penggunaan kekerasan atas nama agama hanya akan menampakkan sisi wajah jahat dari agama itu sendiri. Mengutip QS. An-Nahl ayat 125, Azra menegaskan bahwa seharusnya aksi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran harus berangkat dari tiga metode dalam ayat tersebut yang mengemukakan hikmah (kebijakan), *maw'izah hasanah* (pelajaran yang baik), dan *mujadalah* (diskusi dan perdebatan yang beradab). Jika tidak berdasarkan ketiga prinsip ini dan sebaliknya lebih menekankan kekuatan, lanjut Azra, Islam bisa terlihat "jahat" dan menakutkan bagi banyak orang, termasuk mayoritas umat Islam sendiri.⁷³ Meminjam kerangka Charles Kimball (*When Religion Becomes Evil*, 2003) dengan mengangkat pengalaman Yudaisme, Kristianitas, dan Islam sepanjang sejarah, Azra mengingatkan bahwa setiap agama ini dapat mengalami kerusakan dan menakutkan ketika di kalangan penganutnya terdapat lima gejala dan pertanda berikut: *Pertama*, klaim kebenaran absolut oleh individu dan kelompok bahwa pemahamannya sendiri paling benar dan mereka saja yang punya akses kepada kebenaran. *Kedua*, penetapan waktu sekarang sebagai paling pas bagi individu atau kelompok yang mengklaim memiliki restu

71 Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (New York: HarperCollins, 2007), hal. 124.

72 Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft*:...

73 Azyumardi Azra, "Teror Atas Nama Agama", *Kompas*, 25 Februari 2012

Tuhan untuk mengakhiri segala kemungkarannya. *Ketiga*, taklid buta pada pemahaman, ketentuan praktik keagamaan, dan komando tertentu. *Keempat*, menghalalkan cara apa pun untuk melakukan perubahan yang diyakini diperintahkan Tuhan. *Kelima*, pemakluman holy war (jihad) terhadap individu atau kelompok yang dianggap "menyimpang" dari agamanya sendiri atau untuk menyucikan dunia dari kemungkarannya. Adanya kelima gejala itu di lingkungan ketiga agama tadi pastilah tak representatif mewakili agama-agama tersebut. Namun, jelas gejala itu sedikit banyak memberikan kontribusi bagi adanya prisma citra negatif bagi agama bersangkutan.⁷⁴

Warna-warni persepsi yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika internal kalangan Muslim dalam memandang konsep terorisme memang begitu beragam. Latar belakang *schism* yang heterogen dalam Islam ditambah dengan fakta absennya terminologi definitive tentang terorisme yang dapat diterima oleh berbagai kalangan adalah dua faktor utama yang menyebabkan tidak seragam persepsi masyarakat Muslim dalam memandang konsep terorisme. Gambaran pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas setidaknya dapat mewakili pandangan mainstream yang dominan menghiasi wacana internal kalangan Muslim.

74 Azyumardi Azra, "Teror Atas Nama Agama".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terrorisme dalam prakteknya telah menghiasi sejarah kehidupan bahkan sejak pertama kali manusia mengenal pola-pola interaksi sosial dan komunal. Bentuk-bentuk intimidasi satu individu atau sekelompok orang terhadap yang lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu yang cenderung asosial seringkali dibingkai dalam cerita tamsil pembelajaran yang termaktub dalam kitab-kitab dogmatic atau dalam tradisi cerita oral yang turun temurun. Istilah “terror” sebagai medium pencapaian tujuan politis sendiri bahkan telah dikenal dalam sejarah sejak masa sebelum masehi.

Adapun sebagai sebuah formulasi konseptual, kemunculan terrorisme sebagai sebuah diskursus politik jelas tidak terlepas dari arus modernisme Barat yang membidani kelahirannya. Kemajuan budaya yang dicapai oleh bangsa Barat mengantar mereka melakukan ekspansi dan mempraktekkan kolonialisme di wilayah-wilayah yang jauh dari rumah asalnya. Penguasaan wilayah lain dilandasi oleh latar belakang tujuan penguatan ekonomi dan politik sehingga setiap kekuatan colonial masing-masing terus berusaha mempertahankan

dominasi pengaruhnya di tengah arus perlawanan masyarakat lokal dan kekuatan colonial lain yang ingin menyingkirkannya. Berbagai modifikasi pelanggaran kolonialisasi dalam bentuk pemecahan teritorial hingga memasang pemerintahan boneka adalah beberapa diantara langkah yang sering memicu ketidakpuasan dan berujung tindak kekerasan berdarah dengan intensitas yang mencekam. Suasana terror yang mencuat dari konflik di fase modernitas inilah yang mengorbitkan diskursus terrorisme pada tataran global sehingga mendapatkan perhatian dunia dan menjadi topic pembicaraan dalam forum-forum institusi internasional.

Namun, kentalnya hegemoni politis dan ekonomis yang melatarbelakangi diskursus terrorisme menjadi penghalang utama dari terbentuknya sebuah konsep baku yang mendefinisikan terrorisme dan disepakati secara global. Perjalanan konferensi institusi internasional seputar isu terrorisme yang telah berjalan hampir satu abad tak pernah berhasil mencapai consensus. Terrorisme terus bergulir sebagai sebuah konsep yang dipakai oleh satu kekuatan politik untuk mendiskreditkan gerakan lawan-lawan politiknya. Yang paling menjadi korban dari fenomena tersebut adalah wilayah dan komunitas di mana kekuatan colonial besar saling berebut pengaruh dan mayoritas dari tipikal wilayah serta komunitas itu nota bene adalah dunia Islam dan masyarakat Muslim. Hampir lebih dari 80 persen diskursus terrorisme global di sepanjang periode tahun 1900-an selalu dikaitkan dengan Islam dan Muslim.

Hampir seluruh dunia kemudian mencapai kesepakatan tentang definisi terrorisme ketika Amerika Serikat menabuh genderang kampanye *War against Terrorism*, sebagai respon terhadap peristiwa tragedi besar serangan teroris yang menimpa negara adi daya itu. Namun, definisi terrorisme yang diterima kemudian menjadi begitu monolitik, dalam arti bahwa semua menerima apapun konsep terrorisme yang didefinisikan oleh Amerika Serikat. Dalam prakteknya, Islam dan Muslim lagi-lagi menjadi korban karena sasaran perang melawan terrorisme versi AS hampir selalu menyerang wilayah dan

target-target individu maupun kelompok yang sangat kental dengan label Islam. Konsekuensinya, terorisme dan Islam kemudian seakan menjadi idiom yang tak terpisahkan sehingga konsep “Terorisme Islam” pun menjadi trending sebagai diskursus global.

Penyandingan kata Terorisme yang berkesan horror dengan Islam sebagai agama yang secara harfiah berarti damai menjadi begitu ironis. Tetapi kecenderungan diskursus global yang secara intens mengekspos idiom tersebut dalam skala massif membentuk sebuah pola *conditioning* yang membuat sebagian besar public dunia meyakini akan eksistensi dari terorisme Islam ini. Eskalasi fenomena Islamophobia di kalangan non-Muslim adalah efek langsungnya. Sedangkan di kalangan masyarakat Muslim sendiri, tak sedikit yang juga mengamini eksistensi terorisme yang berlandaskan ajaran Islam.

Sebagai agama besar yang berhasil menarik seperlima populasi penduduk dunia, Islam adalah sebuah ideology yang anti terror dan kekerasan. Dalam lintasan sejarah kejayaannya, dunia Islam juga pernah mengalami kasus-kasus besar yang serupa dengan terorisme. Beberapa khazanah literature klasik menyitir serangkaian peristiwa terror yang mengancam keharmonisan komunitas besar Muslim. Tetapi kesemuanya itu tidak sampai pada aksi pembentukan formulasi konsep independen yang mengaddress issu tersebut secara khusus. Konsep yang “serupa” dengan diskursus terorisme modern tertimbun rapi dalam bingkai konsep-konsep criminal umum yang telah terkodifikasi dengan baik dan dapat ditemukan dalam literature-literatur klasik seputar diskursus Fiqh. Konsep-konsep Jinayat seperti Hirabah, Qishash dan Bughat adalah pendekatan yang paling sering diterapkan oleh otoritas Muslim klasik dalam menangani kasus-kasus serupa terorisme.

Nuansa politis juga memang tidak lepas dari penerapan konsep-konsep jinayat ketika otoritas Muslim pada masa kejayaannya menangani kasus-kasus kekerasan. Penerapan hukum Qishash, Bughat dan Hirabah dilakukan secara bergantian pada kasus-kasus

yang sebenarnya serupa. Penentuan hukum apa yang akan dipakai sangat ditentukan oleh visi politik otoritas yang tengah berkuasa pada masanya. Namun satu yang pasti adalah bahwa argumen-argumen dari pemilihan hukum yang diterapkan selalu berlandaskan pada basis teks-teks al-Qur'an dan Hadis dengan seperangkat interpretasinya.

Pertimbangan politik serta tradisi melandaskan argumen pada interpretasi teks-teks dogmatic adalah juga merupakan tipikal utama dari pola masyarakat Muslim modern dalam menyikapi isu terorisme yang dikaitkan dengan agama yang mereka anut. Masyarakat Muslim modern faktanya berada dibawah subordinasi kekuatan Barat sehingga mereka senantiasa dipengaruhi oleh mainstream diskursus yang dikembangkan oleh patron mereka dan cenderung berada pada posisi defensif. Oleh karenanya, sikap mereka terhadap wacana terorisme pun menggambarkan pola apologetic yang mendeskripsikan ketersudutan. Reaksi sikap dari posisi ini terelaborasi dalam tiga bentuk; pertama, mengakui penuh wacana terorisme Islam tapi memandangnya sebagai sesuatu yang justified karena merupakan aksi counter dari terorisme yang awalnya digagas lawan Islam dalam bentuk penindasan. Kedua, mengakui bahwa memang ada sebagian elemen Muslim yang menempuh pengamalan ajaran melalui jalur kekerasan namun perlu membedakan aksi mereka menggunakan pendekatan perjuangan dan pembelaan diri. Ketiga, menegaskan wacana terorisme Islam dengan memandang bahwa para pelaku terror yang mengatasnamakan Islam sebagai non-Muslim karena telah melanggar ketentuan ajaran agama. Ketiga jenis reaksi ini sangat ditentukan dengan tingkat jauh-dekatnya kebersentuhan mereka dengan Barat secara politis.

Di samping tiga kelompok yang disebutkan di atas, sebetulnya muncul sebuah kesadaran pemahaman baru dalam masyarakat Muslim modern dalam memandang diskursus terorisme ini. Aliran baru ini dominan berkembang dalam strata Muslim kelas menengah dan berpendidikan serta bercirikan pandangan yang lebih universal

serta komprehensif dalam memandang isu terrorisme. Bagi aliran ini terrorisme sama sekali tidak berkaitan dengan agama. Melainkan merupakan aksi kekerasan terorganisir dengan tujuan murni politis dimana agama dijadikan sebagai cover. Menurut kelompok ini setiap pemeluk agama seharusnya berdiri paling depan dalam segala upaya counter-terrorism.

B. SARAN

Data dan konteks yang menjadi setting dari penelitian ini adalah potret factual dari peristiwa yang tercakup dalam rangkaian aksi terror dan counter-terror dalam framework kebijakan kampanye War against Terror pimpinan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, kebijakan kampanye tersebut mulai menurun intensitasnya pasca Barack Obama dilantik sebagai Presiden AS. Bahkan dalam kebijakannya, Obama merevisi total pendekatan perang melawan terrorisme ini menjadi lebih bersifat defensive. Sementara itu, wacana terrorisme terus bergulir dan pola juga organisasi yang mengembangkan terror terus berevolusi. Fenomena-fenomena terbaru yang timbul pasca tahun 2010 seperti munculnya ISIS, Arab Springs yang melanda beberapa negara Timur Tengah, serta bangkitnya Iran dan Russia sebagai kekuatan rival baru dari AS sebagai penentu arah kebijakan politik global sama sekali belum tersentuh dalam pembahasan ini. Oleh karenanya, analisa lebih mendalam terhadap fakta-fakta baru yang bermunculan kemudian pasti akan lebih memperkaya wawasan dalam bidang ini.

Selain itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Critical Discourse Analysis yang lebih cenderung bersifat Contextual Political Analysis. Konsekuensinya, nuansa politis akan tampak begitu kental menjadi kesimpulannya. Tidak menutup kemungkinan, kesimpulan dalam bentuk yang sama sekali berbeda akan dihasilkan jika jenis pendekatan lain digunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisa fakta-fakta yang disodorkan dalam pembahasan ini.

REFERENSI

- 'Abd al-Wahhab, al-Qadhi, *al-Ma'unah 'ala Madzhab 'Alim al-Madinah*, (Mekkah: Nizar M. al-Baz, 1995)
- Abduh, Muhammad, dan Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1946)
- Abu Khali, As'ad, 'Book Review: "The Islam Industry" and Scholarship', *Middle East Journal*, 58: 1 (2004)
- Akiner, Shirin, "The Politicisation of Islam in Postsovyet Central Asia", *Religion, State & Society*, 31: 2 (2003)
- Al-Anshari, Fauzan, *Saya Teroris? (Sebuah Pledoi)*, (Jakarta: Republik, 2002)
- Al-Barr, Ibn 'Abd, *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997)
- Al-Dasuqi, Syams al-Din, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Cairo: Dar al-Fikr, t.t)
- al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Al-Kasani, Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud, *Bada' al-Shana' l fi Tartib al-Syara' i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Imam al-Syafi' l*, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

- Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1995)
- Al-Qarafi, Syihab al-Din, *al-Dzakirah*, (Dar al-Gharb al-Islami, 1994)
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999)
- Al-Sawi, Ahmad, *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, (Cairo:al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t)
- Al-Tantawi, Muhammad Sayyid, *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1996)
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Anwar, Syafi 'I, "Dekonstruksi Fatalisme Keagamaan", *Jawa Pos*, 26 September 2009
- Austin, Greg, *The Next Attack: 'Know Your Enemy and Know Yourself'*, (London: Foreign Policy Centre, 2005)
- Ayoob, Mohammed, "The Future of Political Islam: The Importance of External Variables", *International Affairs*, 81: 5 (2005)
- Ba'albaki, Munir, *al-Mawrid*, (Rembang: Halim Jaya, 2006)
- Baran, Zeyno, "Fighting the War of Ideas", *Foreign Affairs*, 84: 6 (2005)
- Barber, Benjamin, "Democracy and Terror in the Era of Jihad vs. McWorld", dalam Ken Booth and TimDunne (eds), *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002)
- Bashori, Ahmad Dumyathi, (ed), *Akhir Petualangan Osama Melawan Amerika*, (Bandung: Mizan, 2011)
- Bayoumi, Moustafa, "Between Acceptance and Rejection: Muslim Americans and the Legacies of September 11", *Magazine of History*; Jul 2011; 25, 3.
- Benjamin, Daniel & Simon, Steven *The Age of Sacred Terror*, (New York: Random House, 2002).

- Benjamin, Daniel, & Simon, Steven, *The Age of Sacred Terror*, (New York: Random House, 2002)
- Bergen, Peter, *Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden*, (London: Weidenfeld and Nicholson, 2001)
- Berman, Paul, *Terror and Liberalism*, (New York: W.W. Norton, 2003)
- Blair, Tony, "PM's Press Conference", 5 August 2005, at <http://www.number10.gov.uk/output/Page8041.asp>, diakses tanggal 05 Desember 2012
- Burgess, Mark, *A Brief History of Terrorism*, (Washington DC: Center for Defense Information, 2003) at <https://www.ciaonet.org/wps/bum09/> diakses tanggal 23 Juli 2013
- Byman, Daniel, "Al-Qaeda as an Adversary: Do We Understand Our Enemy?", *World Politics*, 56 (2003)
- Collins, L., & Lapierre, D., *O Jerusalem!*, (New York: Simon & Schuster, 1972)
- Conte, Alex, *Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism*, (Heidelberg: Springer, 2010)
- Cook, David, "The Recovery of Radical Islam in the Wake of the Defeat of the Taliban", *Terrorism and Political Violence*, 15: 1 (2003)
- Cooper, Mary H., "Definitions of Terrorism often Vary", *the CQ Research*, vol. 5, No. 27, July 1995
- Copeland, Thomas, "Is the New Terrorism Really New? An Analysis of the New Paradigm for Terrorism", *Journal of Conflict Studies*, 21: 2 (2001)
- Crenshaw, Martha, *Terrorism in Context*, (Penn: Penn State University Press, 1995)
- Croft, Stuart, *Culture, Crisis and America's War on Terror*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Deen, Thaliuf, "POLITICS: U.N. Member States Struggle to Define Terrorism", *IPS*, 25 July 2005
- DeLong-Bas, Natana, *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to*

- Global Jihad*, (Oxford: Oxford University Press, 2004)
- Denoeux, Guilain, "The Forgotten Swamp: *Navigating Political Islam*", *Middle East Policy*, 9: 2 (2002)
- Dershowitz, Alan, *The Case for Israel*, (Hoboken NJ: John Wiley and Sons, 2003)
- Diaz-Paniagua, C. F., *Negotiating Terrorism: The Negotiation Dynamics of Four UN Counter-Terrorism Treatises 1997-2005*, (New York: City University of New York, 2008)
- Doty, Roxanne, "Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines", *International Studies Quarterly*, 37 (1993)
- Duyvesteyn, Isabelle, "How New is the New Terrorism", *Studies of Conflict and Terrorism*, 27: 5 (2004)
- Editorial The Washington Post, "Washington Post – ABC News Poll", *The Washington Post*, September 07, 2010.
- El Fadl, Khaled Abou, (ed.), *Shattered Illusions: Analyzing the War on Terrorism*, (Bristol: Amal Press, 2002)
- El Fadl, Khaled Abou, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (New York: HarperCollins, 2007)
- Esposito, John L & Voll, John O., *Democracy and Islam*, (New York: Oxford University Press, 1996)
- Esposito, John L., "Political Islam: Beyond the Green Menace", *Current History*, 93: 579 (1994)
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Euban, Roxanne, "Killing (for) Politics: Jihad, Martyrdom, and Political Actions", *Political Theory*, 30: 1 (2002)
- Fromkin, D., *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, (New York: Henry Holt, 1992)
- Gallup World, "Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West", *Gallup.com*, <http://www.gallup.com/poll/157082/>

[islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx](#), diakses pada tanggal 01 Februari 2014.

- Gibb, H. A R., & J. H. Kramers, *Concise Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 2001)
- Gregory, Frank, and Wilkinson, Paul,, “*Riding Pillion for Tackling Terrorism is a High-Risk Policy*”, *Security, Terrorism and the UK*, Chatham House ISP/NSC Briefing Paper 05/01, July 2005
- Gunaratna, Rohan, *Inside Al Qaeda*, (New York: Columbia University Press, 2002)
- Hafez, Kai, (ed.), *Islam and the West in the Mass Media: Fragmented Images in a Globalizing World*, (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2000)
- Halliday, Fred, *Two Hours that Shook the World – September 11, 2001: Causes & Consequences*, (London: Saqi Books, 2002)
- Haqqani, Husain, “*Islam’s Medieval Outposts*”, *Foreign Policy*, 133 (2002)
- Hardin, R., *One for all: The logic of group conflict*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995)
- Harper, Douglas, “*Terrorism*”, *Dictionary.com: Online Etymology Dictionary*, at <http://dictionary.reference.com/browse/terrorism>, diakses tanggal 23 Juli 2013
- Hendropriyono, A.M., *Terorisme Fundamentalism Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Hilton, I., “*The Pashtun code*” dalam *New Yorker*, 77(38), (2001)
- Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism*, (New York: Columbia University Press, 1998)
- Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism*, (New York: Columbia University Press, 1998)
- Hossein, Ishtiaq, “*The Organization of Islamic Conference: Nature, Role and the Issues*”, in *Journal of Third World Studies*; Spring 2012; 29, 1
- Howard, Russell, and Reid Slayer (eds), *Terrorism and Counterter-*

- rorism: Understanding the New Security Environment*, (Guildford: McGraw-Hill, 2003)
- Huntington, Samuel, 'The Clash of Civilizations?', *Foreign Affairs*, 72: 3 (1993)
- Hurd, Elizabeth, 'Appropriating Islam: The Islamic Other in the Consolidation of Western Modernity', *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 12: 1 (2003)
- Ibn Anas, Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Ibn Manzhur, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Mishriyyah, 1968)
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t)
- Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah*,
- Ismail, *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism*, (London: IB Tauris, 2006)
- Israeli, Raphael, "A Manual of Islamic Fundamentalist Terrorism", *Terrorism and Political Violence*, 14: 4 (2002)
- Jackson, Richard, "Constructing Enemies: 'Islamic Terrorism' in Political and Academic Discourse", *Government and Oppositions*, 42: 3 (2007)
- Jackson, Richard, *Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counterterrorism*, (Manchester: Manchester University Press, 2005)
- Jackson, Sherman A., "Domestic Terrorism in the Islamic Legal Tradition", in *The Muslim World*, Fall 2001: 91, 3/4
- jihadbukankenistaan.com, "Makna Terorisme dalam Syari'at Islam", dipost pada tanggal 06 Februari 2009 di <http://jihadbukankenistaan.com/terorisme/makna-terorisme-dalam-syari%E2%80%99at-islam.html>, diakses tanggal 15 April 2014
- Johnson, J.T., and John Kelsay (eds.), *Cross, Crescent and Sword: The Justification and Limitation of War in Western and Islamic*

- Traditions*, (New York: Greenwood Press, 1990)
- Jordan, Javier and Box, Luisa, “*Al-Qaeda and Western Islam*”, *Terrorism and Political Violence*, 16: 1 (2004)
- Juergensmeyer, Mark, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (Berkeley, CA: University of California Press, 2000)
- Kabuli, Niaz, *Democracy According to Islam*, (Pittsburgh PA: Dorrance Publications, 1994)
- Kazmi, Zaheer, “*Discipline and Power: Interpreting Global Islam*”, *Review of international Studies*, 30 (2004)
- Keegan, J., *The Iraq War*, (New York: Knopf, 2004)
- Kegley, Jr., Charles, (ed.), *The New Global Terrorism: Characteristics, Causes, Controls*, (New Jersey: Prentice Hall, 2003)
- Khalid, Usman, “*US War on Terror and Muslim Response*”, *Counter-currents.org*, August 02, 2007, diakses di <http://www.counter-currents.org/khalid020807.htm> pada tanggal 05 Februari 2014
- Khan, L. Ali Khan, *Phenomenology of International Terrorism: Understanding Islamic Militancy*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2006)
- Kushner, Harvey, (ed.), *The Future of Terrorism: Violence in the New Millennium*, (London: Sage, 1998).
- Lacquer, W., *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*, (Oxford and New York:
- Laffey, Mark, & Weldes, Jutta, “*Beyond Belief: Ideas and Symbolic Technologies in the Study of International Relations*”, *European Journal of International Relations*, 3: 2 (1997)
- Laqueur, W., *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*, (New York: Oxford University Press, 1999)
- Lawrence, Bruce, (ed.), *Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden*, (London: Verso, 2005)
- Lesser, Ian, et al., *Countering the New Terrorism*, (Santa Monica,

- CA: Rand Corporation Publications, 1999)
- Lewis, Bernard, 'The Roots of Muslim Rage', *Atlantic Monthly*, 266: 3 (1990)
- Ma'louf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Malik, Habib, "Political Islam and the Roots of Violence", in Elliott Abrams (ed.), *The Influence of Faith: Religious Groups and U.S. Foreign Policy*, (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001)
- Martin, Gus, *Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues*, (London: Sage, 2003)
- Martin, Richard C., (eds.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, (New York: Thomson and Gale, 2004)
- Mendelsohn, Barak, "Sovereignty Under Attack: The International Society Meets the Al Qaeda Network", *Review of International Studies*, 31 (2005)
- Milliken, Jennifer, "The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods", *European Journal of International Relations*, 5:2, (1999)
- Mishal, Saul, and Rosenthal, Maoz, "Al Qaeda as a Dune Organization: Towards a Typology of Islamic Terrorist Organizations", *Studies in Conflict & Terrorism*, 28 (2005)
- Munson, Henry, "Islam, Nationalism, and Resentment of Foreign Domination", *Middle East Policy*, 10: 2 (2003), hal. 40-53. Lihat Juga Robert Pape, *Dying to Win*, hal. 104.
- Mustofa, Muhammad, "Memahami Terrorisme: Suatu Perspektif Kriminologis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, FSISIP UI, Vol. 2, No. 111, Desember 2002
- Norris, Pippa, Montague Kern, and Marion Just (eds.), *Framing Terrorism: The News Media, the Governments and the Public*, (London: Routledge, 2003).
- NS interview, "Patricia Hewitt", *Newstatesman*, 25 July 2005
- Oxford University Press, 1999)

- Pape, Robert, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*, (New York: Random House, 2005)
- Pati, Roza, *Due Process and International Terrorism*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2009)
- Paz, Reuven, "Is There an 'Islamic Terrorism'?", *International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT) Publication*, Herzilya, Israel, 7 September 1998, at <http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=46>, diakses pada tanggal 05 Desember 2012,
- Paz, Reuven, "Radical Islamist Terrorism: Points for Pondering", *International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT) Publication*, Herzilya, Israel, 20 June 2001, at <http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=367>, diakses tanggal 05 Desember 2012
- PEWglobal.org, "Islamic Extremism: Common Concern for Muslim and Western Publics", *PEWglobal.org.*, July 14, 2005, <http://www.pewglobal.org/2005/07/14/islamic-extremism-common-concern-for-muslim-and-western-publics/> diakses pada tanggal 1 Februari 2014
- PEWglobal.org, "Muslim Views on Extremism and Conflict", *PEWglobal.org.*, 17 September 2008. Artikel ini dapat diakses melalui tautan <http://www.pewglobal.org/2008/09/17/chapter-3-muslim-views-on-extremism-and-conflict/> pada tanggal 01 Februari 2014
- Pillar, Paul, "Terrorism Goes Global: Extremist Groups Extend their Reach Worldwide", *Brookings Review*, 19: 4 (2001)
- Pipes, Daniel, "Who is the Enemy?", *Commentary*, 113: 1 (January 2002)
- Poole, Elizabeth Poole and Richardson, John, *Muslims and the News Media*, (London: I.B. Tauris, 2006)
- Pustogarov, V., "Fyodor Fyodorovich Martens (1845-1909) – a Humanist of Modern Times", *International Review of the Red Cross (IRRC)*, No. 312, May-June 1996

- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Dhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1973)
- R. M. The Economist, "Mosque Building and Its Discontents", *The Economist*, August 19, 2010
- Ranstorp, Magnus, 'Terrorism in the Name of Religion', *Journal of International Affairs*, 50: 1 (1996)
- Rapoport, David, 'Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions', *American Political Science Review*, 78: 3 (1984)
- Rashid, Ahmed, *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, (New Haven and London: Yale Nota Bene, 2001)
- Richardson, John, *(Mis) Representing Islam: The Racism and Rhetoric of British Broadsheet Newspapers*, (Amsterdam: John Benjamins, 2004)
- Sadowsky, Yahya, 'The New Orientalism and the Democracy Debate', dalam Joel Beinin and Joe Stork (eds), *Political Islam*, (Berkeley, CA: University of California Press, 1996).
- Sageman, Marc, *Understanding Terror Networks*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004)
- Said, Edward, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, (London: Vintage, 1981), revised edition 1997
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Terroris*, (Solo: Jazera, 2004)
- Saul, Ben, "Defining 'Terrorism' to Protect Human Rights", *Sydney Law School Legal Studies Research Paper*, No. 08-125, 2008
- Schbley, Ayla, "Religious Terrorism, the Media, and International Islamization Terrorism: Justifying the Unjustifiable", *Studies in Conflict & Terrorism*, 27 (2004)
- Schmid, Alex P., Jongman, Albert J., (et.al.), *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature*, (New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, 1988)

- Scwartz, Joseph, "Misreading Islamist Terrorism: The 'War Against Terrorism' and Just War Theory", *Metaphilosophy*, 35: 3 (2004)
- Sedgwick, Mark, "Al-Qaeda and the Nature of Religious Terrorism", *Terrorism and Political Violence*, 16: 4 (2004),
- Shadid, Anthony, *Legacy of the Prophet: Despots, Democrats, and the New Politics of Islam*, (Boulder CO: Westview Press, 2001).
- Sheehan, Jack, *Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People*, (Northampton, MA: Interlink Publishing Group, 2004)
- Shugart II, William F, "An Analytical History of Terrorism: 1945-2000", *Public Choice*, vol. 128, 2006
- Singh, Bilveer, dan Mulkhan, Abdul Munir, *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia: Jejak Sang Pengantin Bom Bunuh Diri*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publishing, 2012)
- Smith, B. L., *Terrorism in America*, (New York: New York University Press, 1994)
- Spencer, Alexander, "Questioning the Concept of 'New Terrorism'", *Peace, Conflict and Development*, 8 (2006)
- Stern, Jessica, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*, (New York: HarperCollins, 2003)
- Takeyh, Ray, and Nikolas Gvosdev, 'Radical Islam: The Death of an Ideology?', *Middle East Policy*, 11: 4 (2004)
- The 9/11 Commission, *Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, (New York: W. W. Norton & Co., 2004)
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Paris Peace Conference", *Encyclopaedia Britannica*, online version at <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/443901/Paris-Peace-Conference> diakses tanggal 4 November 2013.
- The Gallup Poll Editorial Staff, "Blame for Sept. 11 Attacks Unclear for Many in Islamic World", *Gallup.com*, March 01, 2002, <http://www.gallup.com/poll/5404/Blame-Sept-Attacks-Unclear-Many-Islamic-World.aspx>, diakses pada tanggal 01 Februari 2002

- UK Foreign and Commonwealth Office/Home Office, “*Draft Report on Young Muslims and Extremism*”, April 2004, dapat ditemukan di <http://www.globalsecurity.org/security/library/report/2004/muslimext-uk.htm>, diakses tanggal 05 Desember 2012
- UN General Assembly, “*Report of the Ad Hoc Committee*”, 6th Session, 28 January – 1 February 2002
- UN General Assembly, “*Report of the Ad Hoc Committee*”, 6th Session, 28 January – 1 February 2002
- United Nations Security Council resolution 1566, 8 October 2004, arsip dokumen ini dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/82/PDF/N0454282.pdf?OpenElement> pada tanggal 9 Januari 2014
- US Department of State, “*Significant Terrorist Incidents, 1961–2003: A Brief Chronology*”, at <http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5902pf.htm>.
- US Department of State, *Patterns of Global Terrorism 1994*, April 1995
- Wike, Richard & Grimm, Brian J., “*Widespread Negativity: Muslims Distrust Westerners more than Vice Versa*”, *PEWglobal.org*, October 7, 2007, di <http://www.pewglobal.org/2007/10/30/widespread-negativity-muslims-distrust-westerners-more-than-vice-versa/> diakses pada tanggal 6 Februari 2014.
- Wike, Richard Wike & Grimm, Brian J., “*Western Views toward Muslims: Evidence from a 2006 Cross-National Survey*”, *International Journal of Public Opinion Research*, February 4, 2010, di <http://ijpor.oxfordjournals.org/content/early/2010/02/04/ijpor.edq002.full.pdf+html> diakses tanggal 5 Februari 2014
- Wiktorowicz, Quintan, “*A Genealogy of Radical Islam*”, *Studies in Conflict & Terrorism*, 28 (2005)
- Williamson, Myra, *Terrorism, War and International Law: The Legality of the Use of Force against Afghanistan in 2001*, (London: Ashgate Publishing, 2009)

Williamson, Myra, *Terrorism, War and International Law: The Legality of the Use of Force against Afghanistan in 2001*, (London: Ashgate Publishing, 2009).

Youtube, "Why Islam is Linked with Terrorism", Youtubel 14 Maret 2002 dengan tautan <http://www.youtube.com/watch?v=5viqyyt2RbQ>. Video tersebut masih dapat diakses pada tanggal 10 januari 2014

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990)

Zeidan, Sami, "Desperately Seeking Definition: The International Community's Quest for Identifying the Specter of Terrorism", *Cornell International Law Journal*, vol. 36, 2004

INDEKS

- agama 3, 4, 5, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 74, 77, 78, 81, 82
- aksi 2
- aksiomatis, 30
- al- Qaeda, 27, 31, 34
- al-Irhab, 77
- ancaman, 2, 9, 18, 26, 32, 33, 34, 35, 41, 52, 54, 64, 70
- autoritatif, 6
- Central Asia, 11, 12, 13, 45
- definisi, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 60, 62, 64, 70, 76, 80
- deradikalisasi, 1
- destruktif, 4, 77
- diskursus, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 43, 52, 57, 59, 60, 68, 79, 80, 81, 82
- distingtif, 4
- dunia Islam, 3, 4, 6, 30, 33, 35, 38, 52, 72, 80, 81
- ekstremis, 20, 27, 29, 32, 35, 38, 39, 43
- ekstremisme, 26, 31, 39, 43, 51
- entitas, 4, 9, 27, 43
- evolusi, 5, 6, 21
- fanatisme, 26, 29, 35
- fundamentalis, 3, 23, 27, 30, 37, 43, 44
- genealogis, 6
- global, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 35, 37, 42, 50, 51, 57, 70, 73, 75, 76, 80,

81, 83

Hamas, 27, 37, 45

hegemoni, 40, 41, 80

Hirabah, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81

ideologi, 4, 30, 31, 35, 58

ideology, 1, 33, 47, 48, 50, 57, 58, 72, 73, 81

implikasi, 16

inherent, 4, 29

Islam., 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 53, 55, 57, 68, 69, 71, 75, 80, 81

issu, 3, 10, 22, 27, 36, 45, 48, 53, 55, 59, 76, 80, 81, 82

Jihad, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 47, 48, 73, 74, 75, 77

kekerasan, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 80, 81, 82

kekuasaan, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 32, 40, 45, 52, 58, 60, 68, 69, 70, 71

klasik, 6, 60, 61, 68, 71, 81

konteks, 4, 15, 28, 29, 43, 47, 57, 70, 74, 82

kontroversi, 8, 15

labelisasi, 8, 29, 58, 70

Mujahid, 51

musuh, 1, 2, 8, 9, 14, 26, 28, 34, 39, 40, 48, 59, 72, 74, 77

narasi, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 56, 70

perang, 1, 2, 3, 11, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 53, 59, 72, 73, 76, 80, 83

perjuangan, 8, 10, 11, 21, 44, 45, 48, 51, 58, 70, 74, 76, 82

politis, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 68, 76, 79, 80, 81, 82, 83

propaganda, 1, 36, 38, 39, 55

Qath' al-Thariq, 61

radikal, 13, 29, 31, 32, 33, 35, 50, 51, 72

restorasi, 9

revolusi, 9, 22

schism, 78

segmen, 4, 5, 53

simbol, 3, 46

stigma, 11

stigmatisasi, 3, 4, 5

Sunni, 13, 22, 43

Syi'ah, 13, 22, 43

Taliban, 1, 2, 3, 11, 13, 18, 23,
32, 34, 73

terror, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 33, 35,
40, 41, 42, 45, 50, 51, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74,
79, 80, 81, 82

terroris, 3, 8, 9, 18, 19, 21, 28,
34, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 47,
48, 52, 70

terrorisme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 56, 59, 65, 79,
80, 81, 82, 83

Timur Tengah, 11, 12, 25, 57,
58, 83